



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa ilmu pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Induk
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

##### Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah.
- b. mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan;
- c. untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengembangan produk-produk unggulan daerah yang berbasis pada hasil riset yang sistematis dan berkelanjutan.

## BAB II

### RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025 – 2029

#### Pasal 3

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun berdasarkan:

- a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya;
- b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- c. isu-isu strategis yang berkembang;
- d. kebijakan nasional; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I pendahuluan;
  - b. Bab II gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi Daerah;
  - c. Bab III tantangan dan peluang riset dan inovasi Daerah;
  - d. Bab IV analisis kesenjangan riset dan inovasi daerah;
  - e. Bab V strategi riset dan inovasi Daerah;
  - f. Bab VI peta jalan riset dan inovasi Daerah;
  - g. Bab VII rencana aksi tahunan riset dan inovasi Daerah; dan
  - h. Bab VIII penutup.
- (2) Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana aksi tahunan program pengembangan ekosistem riset dan inovasi Daerah, dan
  - b. rencana aksi tahunan program prioritas riset dan inovasi Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 57



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA  
JALAN PEMAJUAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB 1  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun politik. Terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Banten berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, serta menjadi pintu gerbang laut Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra. Wilayah ini terdiri dari delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 9.662,92 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, Provinsi Banten memainkan peranan penting dalam konstelasi pembangunan nasional.

Dalam struktur ekonomi nasional, Banten dikenal sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri dan jasa yang pesat. Kawasan industri besar seperti Cilegon dan Tangerang menjadi pusat manufaktur dan logistik yang menopang sektor ekspor-impor nasional. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Namun demikian, di tengah potensi tersebut, Provinsi Banten masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dan memerlukan penanganan berbasis pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029, sejumlah permasalahan utama masih membayangi proses pembangunan di wilayah ini. Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan pembangunan antar-wilayah, pengangguran terbuka yang masih tinggi, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata, serta lemahnya kapasitas riset dan inovasi di tingkat daerah. Selain itu, isu lingkungan seperti banjir, abrasi pantai, dan kerusakan ekosistem pesisir masih menjadi persoalan yang belum tertangani secara optimal. Di sektor ekonomi, masih terjadi ketimpangan antara kawasan industri maju dengan daerah tertinggal seperti di wilayah selatan Banten (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Ketimpangan ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut menjadi indikasi bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini masih belum sepenuhnya berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. Dalam era yang ditandai dengan percepatan transformasi digital dan globalisasi pengetahuan, ketertinggalan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dapat memperlebar kesenjangan antar-wilayah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan elemen fundamental dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah bukan hanya menjadi wacana semata, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak. Riset dapat membantu pemerintah daerah memahami akar permasalahan publik secara lebih mendalam, menyusun kebijakan yang tepat sasaran, serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Sementara itu, inovasi berperan penting dalam menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan daerah, mendorong efisiensi layanan publik, meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi, dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Di Provinsi Banten, urgensi penguatan ekosistem riset dan inovasi tidak dapat ditunda lagi. Selama ini, aktivitas riset dan inovasi di Provinsi Banten masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan publik maupun dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis. Dengan demikian, perlu dilakukan langkah strategis untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Salah satu alasan mendesak perlunya riset dan inovasi adalah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tingkat daerah. Saat ini, masih banyak kebijakan publik disusun tanpa didasarkan pada data dan analisis yang memadai. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak efektif, tidak efisien, atau bahkan kontraproduktif. Dengan penguatan riset, Pemerintah Provinsi Banten dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta potensi risiko dari setiap alternatif kebijakan yang tersedia. Ini akan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih rasional dan akuntabel.

Riset berperan sebagai penyedia data berbasis bukti ilmiah yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan yang kontekstual, realistis, dan mampu memberikan hasil yang optimal. Sebagai contoh, untuk mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, riset dapat memberikan analisis spasial terhadap pola pertumbuhan ekonomi, akses infrastruktur, serta dinamika demografi di Banten Selatan. Temuan ini akan membantu pemerintah menetapkan strategi intervensi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Begitu pula dalam isu pengangguran, riset dapat mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan efisien, serta memetakan kesenjangan

keterampilan tenaga kerja yang perlu dijumpai melalui program pelatihan. Tanpa data dan riset yang kuat, intervensi kebijakan semacam ini berisiko gagal dalam pelaksanaan.

Namun demikian, hingga saat ini pemanfaatan hasil riset sebagai dasar kebijakan di tingkat pemerintah daerah masih tergolong rendah. Banyak kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan intuisi, tekanan politik, atau asumsi semata, tanpa didukung oleh proses analisis ilmiah yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum terbangunnya mekanisme koordinasi antara lembaga riset dan perangkat daerah, keterbatasan kapasitas SDM di bidang riset dan inovasi, ketidakterediaan platform repositori yang mengakibatkan masih tercernya data-data riset sehingga kerap tidak siap digunakan saat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan, hingga belum adanya sistem yang mengintegrasikan hasil riset ke dalam siklus perencanaan dan pembangunan di daerah.

Lebih jauh lagi, riset dan inovasi juga memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah serta menyelesaikan berbagai persoalan publik yang dihadapi oleh Provinsi Banten. Salah satu contoh konkret dari peran riset dalam percepatan pembangunan adalah pemanfaatan data spasial dan *big data* untuk memetakan kebutuhan infrastruktur dasar dan potensi wilayah secara lebih akurat. Dengan dukungan riset, pemerintah daerah dapat mengetahui prioritas pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat dan proyeksi pertumbuhan wilayah. Di sisi lain, inovasi di bidang konstruksi dan pengelolaan proyek publik dapat mempercepat realisasi proyek pembangunan dengan kualitas yang lebih baik dan biaya yang lebih efisien.

Dalam hal penyelesaian permasalahan publik, riset dan inovasi juga dapat berperan sebagai sumber solusi terhadap masalah kronis di Provinsi Banten seperti kemiskinan, *stunting*, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Misalnya, riset sosial ekonomi dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan dan mengembangkan intervensi yang spesifik sesuai karakteristik lokal, seperti model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, pelatihan vokasional berbasis permintaan pasar, atau skema perlindungan sosial adaptif. Begitu pula dengan masalah lingkungan, riset ekologis dan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi basis pengembangan sistem pengelolaan sampah, konservasi kawasan lindung, atau penanggulangan banjir yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Riset dan inovasi juga diperlukan untuk merespons isu strategis dan darurat publik, seperti penanggulangan bencana alam, krisis pangan, atau pandemi. Provinsi Banten, sebagai wilayah pesisir yang rawan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, dan abrasi pantai, sangat membutuhkan sistem mitigasi dan manajemen bencana yang berbasis teknologi. Dengan mengintegrasikan data pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta skema evakuasi berbasis kecerdasan buatan, Pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dan mengurangi potensi kerugian secara signifikan.

Selanjutnya, riset dan inovasi juga sangat penting dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah. Provinsi Banten memiliki berbagai potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui pendekatan berbasis sains dan teknologi. Misalnya, di

sektor pertanian dan perikanan, teknologi budidaya dan pengolahan hasil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Di sektor industri kreatif, riset dapat mendukung pengembangan desain produk, strategi pemasaran, dan model bisnis inovatif. Di sektor pariwisata, inovasi digital dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperluas jangkauan promosi destinasi wisata. Semua upaya ini memerlukan sinergi antara lembaga riset, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam suatu ekosistem riset dan inovasi yang dinamis.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, diperlukan adanya dokumen perencanaan strategis yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Provinsi Banten Tahun 2025–2030 menjadi sangat penting dan relevan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah, sasaran, dan strategi yang jelas dalam mengembangkan kapasitas riset dan inovasi di Provinsi Banten, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, kolaborasi, maupun pendanaan.

Penyusunan dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Dokumen ini harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta memberikan kontribusi konkret terhadap luaran indikator kinerja utama untuk mempercepat pencapaian program pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen ini perlu disusun dengan mengacu pada pendekatan yang integratif, partisipatif, dan berbasis data ilmiah, serta memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Selain itu, penyusunan dokumen ini juga merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Peraturan ini memberikan kerangka normatif bagi daerah dalam menyusun kebijakan pemajuan iptek yang terstruktur dan terukur, serta mendorong harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang riset dan inovasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terdapat standar minimum dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis di bidang riset dan inovasi, sehingga setiap daerah memiliki peta jalan yang jelas dalam memajukan iptek sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Provinsi Banten perlu mengambil langkah proaktif dalam menyusun dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 sebagai wujud komitmen untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang tangguh. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknokratis, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Melalui dokumen ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat, dalam merancang dan mengimplementasikan program-program riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Dalam hal ini, penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang adil, merata,

dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan pendekatan baru yang berbasis pengetahuan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 merupakan langkah strategis dan mendesak yang perlu segera direalisasikan demi masa depan Provinsi Banten yang berdaya saing.

Adapun arah, sasaran, dan strategi riset dan inovasi dalam dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 disusun dengan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang dituangkan di dalam arah kebijakan, strategi, dan program-program prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 juga disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, dan program-program prioritas pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024–2029 serta data-data lainnya yang teraktual dan dapat divalidasi secara ilmiah terkait isu, perkembangan, dan kebutuhan pembangunan di Provinsi Banten.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Provinsi Banten Tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 antara lain sebagai berikut: Pertama, memperkuat pembuatan kebijakan berbasis bukti. RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 disusun dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah. Agenda-agenda prioritas riset dan inovasi dalam dokumen ini diarahkan sebagai pondasi penyediaan bukti-bukti empiris terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah serta proses penyusunan regulasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan kebijakan diharapkan tidak lagi bersifat asuntif, melainkan ditopang oleh data-data yang valid.

Kedua, mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan. RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 disusun sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian program-program prioritas pembangunan daerah melalui optimalisasi peran riset dan inovasi. Dalam konteks tersebut, seluruh agenda prioritas riset dan inovasi yang dirumuskan dalam RIPJPID wajib mengacu pada dan selaras dengan arah kebijakan serta sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Sinkronisasi ini dimaksudkan agar luaran riset dan inovasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditentukan secara formal oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Ketiga, mendorong pengembangan produk-produk unggulan daerah. RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 dirancang untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengembangan produk-produk unggulan daerah yang berbasis pada hasil riset yang sistematis dan berkelanjutan. Provinsi Banten memiliki beragam potensi sumber daya lokal yang bernilai strategis sebagai basis produk unggulan khas daerah. Potensi tersebut perlu diidentifikasi, dikaji, dan dikembangkan secara ilmiah melalui pendekatan riset dan inovasi yang terarah. Oleh karena itu, agenda-agenda prioritas riset dan inovasi dalam RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 harus difokuskan pada penguatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan produk-produk unggulan Provinsi Banten, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran dari penyusunan RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan agenda prioritas riset dan inovasi untuk memperkuat pembuatan kebijakan berbasis bukti, meliputi identifikasi kebutuhan kebijakan, strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta peta jalan

dan rencana aksi tahunan riset dan inovasi untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti;

2. Menetapkan agenda prioritas riset dan inovasi untuk mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan, meliputi pengembangan tema prioritas riset dan inovasi, identifikasi kebutuhan pembangunan, strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta peta jalan dan rencana aksi tahunan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan penyelesaian permasalahan utama daerah; dan
3. Menetapkan agenda prioritas riset dan inovasi untuk mengembangkan produk-produk unggulan daerah, meliputi pengembangan tema prioritas riset dan inovasi, identifikasi kebutuhan produk unggulan daerah, strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta peta jalan dan rencana aksi tahunan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan produk-produk unggulan daerah.

#### 1.4. Sistematika

Adapun sistematika dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2030 dijabarkan sebagai berikut.

##### Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika

##### Bab 2. Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah

###### 2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Aspek Geografis, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

2.1.2. Aspek Ekonomi, Industri, dan Daya Saing

2.1.3. Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas Sumber Daya

Manusia

2.1.4. Aspek Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5. Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1.6. Usulan Tema Prioritas Produk Unggulan Daerah

2.1.7. Usulan Tema Prioritas Permasalahan Utama Daerah

###### 2.2. Kondisi Riset dan Inovasi Saat Ini

2.2.1. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dalam

## Pengembangan Produk Unggulan Daerah

### 2.2.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

- Bab 3. Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi Daerah
  - 3.1. Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang
  - 3.2. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang
  - 3.3. Kondisi Riset dan Inovasi yang Diharapkan
    - 3.3.1. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
    - 3.3.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah
    - 3.3.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah
- Bab 4. Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah
  - 4.1. Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
  - 4.2. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah
  - 4.3. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah
- Bab 5. Strategi Riset dan Inovasi Daerah
  - 5.1. Strategi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
  - 5.2. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
  - 5.3. Strategi Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
- Bab 6. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah
  - 6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
  - 6.2. Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah
  - 6.3. Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah
- Bab 7. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah

- 7.1. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti
  - 7.2. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah
  - 7.3. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah
- Bab 8. Penutup

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 2.1. Gambaran Umum

##### 2.1.1. Aspek Geografis, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa pada posisi koordinat 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Samudera Hindia di selatan, Selat Sunda di barat, serta Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Dengan luas wilayah 9.352,77 km<sup>2</sup>, Banten terbagi ke dalam delapan wilayah administratif, yang terdiri dari empat kabupaten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang) serta empat kota (Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	2.771,41	29,63
2	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	3.305,07	35,34
3	Kabupaten Serang	Ciruas	1.467,35	15,69
4	Kabupaten Tangerang	Tigaraksa	959,61	10,26
5	Kota Serang	Serang	266,71	2,85
6	Kota Cilegon	Purwakarta	175,51	1,88
7	Kota Tangerang	Tangerang	164,54	1,76
8	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	147,61	1,57
	Provinsi Banten	Kota Serang	9.352,77	100,00

Dari perspektif geostrategis, Provinsi Banten menempati posisi yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, wilayah Provinsi Banten merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Kedekatannya dengan Jakarta dan posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dari arah barat menjadikan Banten sebagai simpul ekonomi dan logistik yang potensial.

Pada masa lampau, Pelabuhan Banten merupakan pelabuhan internasional utama, dan kini pengembangan pelabuhan serta pusat logistik kembali menjadi agenda strategis untuk mengembalikan kejayaan historis

tersebut. Provinsi Banten juga memiliki karakteristik geografis dan ekologi yang unik, menjadikannya salah satu wilayah dengan potensi pengembangan wilayah yang sangat luas di Indonesia, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial-budaya. Potensi ini tidak hanya bersifat fisik dan sumber daya alam, tetapi juga mencakup nilai strategis spasial dan geopolitik yang memberikan keuntungan kompetitif dalam konteks pembangunan nasional dan regional.

Secara geografis, Banten berada di titik temu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra serta berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, yakni DKI Jakarta. Posisi ini membuat Banten masuk dalam koridor ekonomi nasional dan kawasan metropolitan strategis, yakni Jabodetabek-Punjur. Dengan keberadaan Pelabuhan Merak dan Jalur Tol Trans-Jawa serta jaringan rel kereta api lintas Pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki keunggulan aksesibilitas tinggi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun sentra logistik dan industri terpadu berbasis keberlanjutan. Potensi ini dapat dikembangkan melalui penguatan *transport hub*, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), dan optimalisasi kawasan industri ramah lingkungan di Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Serang, serta mendukung konektivitas antar-wilayah Banten Selatan yang selama ini masih terisolasi.

Provinsi Banten menyimpan kekayaan luar biasa dalam bidang ekowisata dan warisan budaya alam, terutama di wilayah selatan yang mencakup bentang alam berupa hutan hujan tropis, taman nasional, pegunungan, dan wilayah pesisir yang masih relatif terjaga. Keunikan topografi, keberagaman hayati, serta warisan sejarah dan spiritualitas yang melekat kuat pada masyarakat lokal, menjadi kombinasi ideal dalam pengembangan ekowisata berbasis pelestarian alam dan budaya. Ekowisata tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan lindung.

Ekowisata ini mengandung nilai ekologis tinggi dan menjadi penyimpan jasa lingkungan penting (*ecosystem services*), seperti penyediaan air, penyerap karbon, pelindung kawasan pesisir, dan penyokong keanekaragaman hayati. Ekowisata berbasis konservasi memiliki prospek besar sebagai sumber ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Pandeglang dan Lebak. Dukungan riset dalam pengelolaan destinasi berkelanjutan, sistem zonasi wisata, hingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan.

Secara administratif, terdapat 35 kawasan wisata alam dan 17 kawasan konservasi di Banten yang memiliki nilai ekologis dan estetika tinggi. Salah satu ikon utama adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat bagi Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*), satwa langka yang hanya dapat ditemukan pada wilayah ini. Dengan luas mencapai 122.956, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1991 dan menawarkan potensi luar biasa untuk wisata konservasi, *trekking*, wisata bahari, dan edukasi lingkungan.

Selain Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat Taman Wisata Alam Carita, Cagar Alam Rawa Danau, Gunung Pulosari, serta kawasan pesisir seperti Pantai Sawarna, Pantai Anyer, dan Pantai Tanjung Lesung. Kawasan Tanjung Lesung

telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dengan target pengembangan seluas 1.500 hektar, yang meliputi fasilitas resort, pusat budaya, pelabuhan marina, dan ekowisata bahari. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan yang berkunjung ke KEK Tanjung Lesung tercatat sebanyak 317.424 orang, meningkat sebesar 18,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi budaya alam, Provinsi Banten memiliki kekayaan spiritual dan nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan lanskap alam. Kawasan Banten Lama, misalnya, merupakan situs bersejarah Kesultanan Banten yang masih aktif menjadi pusat ziarah. Situs ini dikunjungi oleh lebih dari satu juta peziarah setiap tahunnya, menjadikannya salah satu destinasi budaya dengan daya tarik tinggi di Pulau Jawa. Pada sisi selatan, Gunung Pulosari tidak hanya menjadi lokasi pendakian alam, tetapi juga tempat ritual keagamaan dan adat oleh masyarakat Baduy dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara pelestarian ekosistem dan identitas budaya yang kuat di Provinsi Banten.

Warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) seperti ritual Seren Taun, pembuatan gula aren secara tradisional, kerajinan anyaman Baduy, serta narasi mitos Gunung Karang dan Ujung Kulon turut memperkaya potensi ekowisata berbasis budaya. Sebagian besar aktivitas wisata budaya ini berkembang di desa-desa wisata seperti Desa Kanekes (Suku Baduy), Desa Wisata Ciboleger, Desa Ciherang, dan Desa Caringin di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023, terdapat 78 desa wisata yang telah teridentifikasi, dan 18 desa di antaranya masuk dalam kategori berkembang dan siap dikembangkan sebagai *tourism village* berbasis konservasi.

Tabel 2. Sebaran Kawasan Ekowisata Alam dan Budaya di Provinsi Banten

Kawasan Ekowisata	Lokasi	Luas (Ha)	Daya Tarik Utama
Taman Nasional Ujung Kulon	Pandeglang	123	Badak Jawa, hutan hujan tropis, <i>trekking</i> , wisata bahari
Taman Wisata Alam Carita	Pandeglang	±95	Pantai alami, <i>snorkeling</i> , konservasi laut
Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan	Pandeglang, Serang	-	Pendakian, wisata spiritual, sumber air panas
Cagar Alam Rawa Danau	Serang	±3.000	Kawasan danau alami, keanekaragaman burung
Kawasan Banten Lama	Serang	115	Situs Kesultanan Banten, ziarah budaya

Kawasan Ekowisata	Lokasi	Luas (Ha)	Daya Tarik Utama
Kawasan Adat Baduy	Lebak	±5.100	Budaya adat, kerajinan, ekowisata sosial

Dengan potensi geografis, ekologis, dan budaya yang dimilikinya, sektor ekowisata di Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai tulang punggung ekonomi hijau daerah. Pengembangan ini idealnya diarahkan melalui pendekatan *community-based ecotourism*, yakni model pariwisata berbasis komunitas yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pengelola, penyedia jasa wisata, sekaligus pelestari sumber daya alam dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial masyarakat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan ekowisata di Banten masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya infrastruktur penunjang di kawasan-kawasan wisata terpencil, seperti akses jalan yang layak, sarana transportasi publik, serta jaringan komunikasi dan informasi yang memadai. Selain itu, promosi destinasi wisata alam dan budaya masih belum optimal, terutama dalam hal digitalisasi dan integrasi antarwilayah maupun antarinstansi. Kesiapan sumber daya manusia lokal juga menjadi kendala signifikan, mengingat masih terbatasnya kapasitas dalam hal manajemen pariwisata, pelayanan wisatawan, dan pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, risiko degradasi lingkungan mulai mengemuka sebagai dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan yang tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan dan zonasi kawasan yang memadai, sehingga memicu eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekosistem.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui dokumen RPJMD Provinsi Banten 2025–2029 telah menetapkan arah kebijakan strategis yang mencakup lima pilar utama. Pertama, pengembangan sistem informasi destinasi wisata berbasis digital, termasuk integrasi teknologi Sistem Informasi Geografis untuk memetakan dan mengelola kawasan konservasi dan wisata. Kedua, revitalisasi sarana dan prasarana wisata dengan pendekatan ekologis dan berprinsip pada pembangunan rendah karbon. Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang ekowirausaha, pengelolaan *homestay*, pelayanan pemandu wisata, serta produksi dan pemasaran kerajinan lokal. Keempat, mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam skema *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Kelima, penerapan mekanisme sertifikasi ekowisata dan pemberian insentif berbasis konservasi kepada pelaku pariwisata yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

Kemudian, Provinsi Banten memiliki posisi strategis untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi sektor energi dan pemenuhan target nasional Net Zero Emission tahun 2060. Potensi EBT di Provinsi Banten tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik topografi, iklim, dan sumber daya yang mendukung.

Pengembangan EBT juga relevan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, khususnya dalam peningkatan ketahanan energi daerah dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Saat ini, pemanfaatan EBT di Provinsi Banten masih tergolong rendah. Berdasarkan data RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, kontribusi EBT dalam bauran energi di Provinsi Banten baru mencapai 3,03% pada tahun 2023, dengan target peningkatan secara bertahap menjadi 4,40% pada tahun 2025 dan 6,92% pada tahun 2030. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar untuk ekspansi dan optimalisasi EBT di wilayah ini.

Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih di berbagai jenis EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta biomassa dan biogas. Berbagai wilayah di Provinsi Banten berpotensi dalam menyediakan sumber daya alam yang mendukung pemanfaatan EBT. Potensi ini sangat strategis untuk mendorong transisi energi di Provinsi Banten dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dukungan riset dan investasi teknologi sangat dibutuhkan untuk melakukan pemetaan, studi kelayakan, hingga pengembangan *pilot project* energi terbarukan berbasis masyarakat.

Tabel 3. Data Potensi EBT di Provinsi Banten

No	Jenis EBT	Lokasi Potensial	Estimasi Potensi Teknis	Bentuk Pemanfaatan	Tantangan
1	PLTS	Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak	Radiasi matahari 4,5–5,5 kWh/m <sup>2</sup> /hari	PLTS atap, PLTS desa mandiri, PLTS industri	Investasi awal tinggi, kurangnya insentif, keterbatasan SDM teknis
2	PLTMH	Sungai Cibaliung, Ciberang, Ciliman, Cilemer (Lebak, Pandeglang)	≥ 25 titik potensial, kapasitas <1 MW	PLTMH komunal, desa mandiri energi	Akses lokasi sulit, biaya pembangunan saluran air yang besar, pendanaan terbatas
3	PLTPB	Gunung Karang, Gunung Pulosari, Rawadanu,	Potensi sedang–tinggi, memerlukan survei lanjutan	PLTPB skala sedang	Investasi besar, risiko geologi, studi AMDAL dan

No	Jenis EBT	Lokasi Potensial	Estimasi Potensi Teknis	Bentuk Pemanfaatan	Tantangan
		dan Gunung Endut			sosial panjang
4	PLTB	Pesisir Anyer, Carita, Ujung Kulon (Pandeglang, Serang)	Kecepatan angin 4–6 m/s (skala kecil)	PLTB hybrid (angin-surya) untuk penerangan, <i>cold storage</i> perikanan	Kecepatan angin belum ideal untuk skala besar, peralatan mahal
5	Biomassa dan Biogas	Limbah pertanian dan peternakan (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang)	Belum terpetakan detail, potensi tinggi (limbah jerami, kotoran ternak)	Biogas rumah tangga, pembangkit kecil berbasis biomassa	Pengumpulan bahan baku, kesadaran masyarakat, teknologi skala kecil

Selain itu, Provinsi Banten memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, terutama di wilayah selatan dan tengah. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, total lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mencapai sekitar 113.000 hektar, tersebar di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Lahan-lahan ini berkontribusi terhadap ketersediaan pangan regional dan nasional, terutama pada produksi padi. Namun, kawasan utara (seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) telah mengalami tekanan besar akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan jasa. Laju konversi lahan pertanian di Provinsi Banten diperkirakan mencapai 2.400–2.600 hektar per tahun, terutama di wilayah Tangerang Raya. Adapun data estimasi sebaran LP2B di Provinsi Banten sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 4. Estimasi Sebaran LP2B di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian Produktif (Ha)	Komoditas Unggulan
1	Kabupaten Pandeglang	39.500	Padi, cabai, durian
2	Kabupaten Lebak	31.000	Padi, kopi, karet, gula aren
3	Kabupaten Serang	25.000	Padi, sayuran, bawang merah
4	Kabupaten Tangerang	17.500	Padi, hortikultura
	Total	113.000	

Di sisi lain, Provinsi Banten menyimpan kekayaan agrobiodiversitas lokal yang sangat melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal. Keanekaragaman hayati pertanian ini tidak hanya mencerminkan kekhasan ekologi dan budaya masyarakat Banten, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Salah satu komoditas utama yang telah mendapat pengakuan nasional adalah gula aren Lebak yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan memiliki permintaan ekspor yang terus meningkat, terutama ke negara-negara yang mengutamakan produk organik dan berbasis keberlanjutan. Komoditas lainnya adalah kopi arabika dan robusta Pandeglang yang dibudidayakan secara organik di dataran tinggi Gunung Pulosari. Kopi ini memiliki aroma dan cita rasa khas serta berpotensi menjadi kopi premium jika ditopang oleh sistem pengolahan dan pemasaran yang baik. Selain itu, varietas lokal durian Ciomas dan Cibaliung juga memiliki rasa yang khas dan unik serta semakin diminati di pasar domestik, terutama pada musim panen raya.

Potensi lain datang dari pisang sale khas Banten Selatan, sebuah produk olahan tradisional yang telah mendukung pengembangan UMKM lokal dan mampu menjadi ikon kuliner khas daerah. Tidak kalah penting adalah keberadaan kerbau rawa Lebak, yang merupakan bagian dari sistem peternakan tradisional berbasis lahan basah dan sangat langka di Indonesia. Kerbau ini memiliki nilai budaya tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan dalam skema *heritage livestock farming* sebagai bagian dari agrowisata edukatif. Seluruh komoditas tersebut merepresentasikan kekayaan alam dan budaya Banten yang, jika dikembangkan secara sistematis berbasis riset dan inovasi, akan menjadi pendorong utama ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hayati daerah.

Potensi agrobiodiversitas ini tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kesuburan tanah, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Banyak varietas lokal yang memiliki ketahanan tinggi terhadap hama, penyakit, dan kekeringan, menjadikannya kandidat penting untuk dikembangkan dalam sistem pertanian berkelanjutan. Lebih lanjut, pengembangan sektor pertanian dan agrobiodiversitas lokal di Banten memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten 2023, lebih dari 43% penduduk di Kabupaten Pandeglang dan 46% di Kabupaten Lebak bekerja di sektor pertanian. Dengan demikian, revitalisasi sektor ini berpotensi langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Selain terkait alih fungsi lahan, sektor pertanian di Banten masih menghadapi permasalahan, seperti rendahnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern, terbatasnya akses ke pasar dan pembiayaan, keterbatasan penyuluh pertanian lapangan, dan kurangnya sistem perlindungan varietas lokal dan penguatan rantai pasok produk khas daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan berbasis riset dan inovasi, antara lain seperti penguatan sistem informasi pertanian berbasis geospasial untuk melacak dan melindungi lahan pertanian strategis, penyusunan rencana induk pengembangan komoditas

unggulan lokal yang didukung oleh data riset agroklimat dan pasar, penerapan pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*) untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan degradasi lahan, pengembangan rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir, dan pelestarian plasma nutfah dan pembentukan bank benih lokal yang bekerja sama dengan universitas dan BRIN. Dengan pendekatan integratif tersebut, Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pertanian dan agrobiodiversitas lokal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi strategis yang tinggi, Banten juga dihadapkan pada sejumlah persoalan serius, khususnya dalam aspek lingkungan hidup dan kebencanaan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, wilayah ini rawan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi akibat lokasinya yang dekat dengan patahan Sumatera dan Cincin Api Pasifik. Kawasan-kawasan dengan topografi rendah seperti di wilayah utara dan sepanjang sungai menjadi langganan banjir musiman, sedangkan wilayah selatan dengan kontur perbukitan rawan terhadap tanah longsor. Adapun jumlah kejadian bencana di Provinsi Banten sepanjang tahun 2019–2024 dirangkum dalam tabel di bawah.

Tabel 5. Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Banten Tahun 2019–2024

No	Jenis Bencana	Total Kejadian
1	Cuaca Ekstrem	1.679
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.023
3	Banjir	1.014
4	Gempa Bumi	910
5	Kekeringan	577
6	Tanah Longsor	276

Selain itu, Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tergolong memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis dan kondisi geologis yang berada pada zona tektonik aktif dan dikelilingi oleh potensi ancaman hidrometeorologi serta geologi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dikutip dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Banten berada pada angka 151,69 yang menempatkannya pada kategori risiko tinggi secara nasional. Nilai IRB digunakan untuk mengidentifikasi prioritas wilayah dalam penanggulangan bencana dan penguatan ketahanan daerah. Dalam hal ini, IRB dihitung per kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Nilai IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai IRB	Kategori Risiko
1	Kabupaten Pandeglang	192,52	Tinggi
2	Kabupaten Lebak	185,64	Tinggi
3	Kabupaten Serang	153,77	Tinggi
	Provinsi Banten	151,69	Tinggi
4	Kota Cilegon	121,07	Sedang
5	Kota Serang	134,12	Sedang
	Nasional	123,65	Sedang
6	Kabupaten Tangerang	112,45	Sedang
7	Kota Tangerang	109,88	Sedang
8	Kota Tangerang Selatan	97,81	Rendah

Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup juga menghadapi tantangan serius. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan pada tiga parameter utama yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan pada data dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, nilai IKLH Provinsi Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar 62,52 yang tergolong dalam kategori sedang, dan masih berada di bawah IKLH nasional.

Tabel 7. Nilai IKLH Provinsi Banten Tahun 2020–2023

Tahun	IKLH (Nasional)	IKLH (Provinsi Banten)	IKA	IKU	IKTL
2020	70,27	61,24	55,30	71,20	57,21
2021	71,45	61,85	56,80	72,10	56,64
2022	72,42	62,40	58,20	71,50	57,50
2023	72,54	62,52	58,93	71,62	56,99

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Provinsi Banten menghadapi tekanan dari aktivitas domestik, industri, dan alih fungsi lahan yang belum terkendali secara optimal. Rendahnya nilai IKA disebabkan oleh meningkatnya pencemaran domestik dan limbah industri, emisi kendaraan bermotor di wilayah perkotaan, serta berkurangnya tutupan vegetasi akibat urbanisasi cepat. Sedangkan IKTL menunjukkan nilai rendah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan pembangunan yang tidak terkendali dan merupakan faktor utama penyumbang rendahnya skor IKLH di wilayah ini. Untuk mendorong perbaikan IKLH, Pemerintah Provinsi Banten merencanakan

penguatan pengawasan lingkungan, peningkatan reboisasi kawasan kritis, dan pelibatan masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah serta konservasi wilayah.

Permasalahan lingkungan lain yang semakin mengemuka di Provinsi Banten adalah rendahnya efektivitas pengelolaan sampah dan air limbah domestik. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, jumlah timbunan sampah juga mengalami peningkatan signifikan. Namun sayangnya, infrastruktur dan sistem pengelolaan persampahan, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, belum berkembang secara optimal. Berdasarkan data dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, total timbunan sampah di Provinsi Banten mencapai 8.629,7 ton per hari pada tahun 2022, tetapi hanya sekitar 45,12% yang tertangani melalui sistem formal. Sementara itu, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih didominasi oleh sistem *open dumping*, dan hanya sebagian kecil TPA yang menerapkan metode *sanitary landfill*. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, serta belum terbangunnya sistem ekonomi sirkular secara komprehensif, turut memperparah akumulasi sampah yang tidak tertangani.

Tabel 8. Data Timbunan Sampah dan Pencemaran Sungai di Provinsi Banten Tahun 2018-2022

Tahun	Timbunan Sampah (ton/hari)	Persentase Sampah Tertangani (%)	Jumlah Lokasi Sungai Tercemar
2018	7.950,0	38,20	21
2019	8.120,5	39,75	21
2020	8.309,0	42,11	22
2021	8.507,5	44,50	22
2022	8.629,7	45,12	22

Di sisi lain, kualitas air permukaan juga menunjukkan tren penurunan akibat pencemaran dari limbah rumah tangga dan aktivitas industri. Salah satu indikator yang paling nyata adalah peningkatan jumlah titik pencemaran sungai yang teridentifikasi. Jika pada tahun 2018 terdapat 21 lokasi sungai yang tercemar, maka pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 22 lokasi, terutama di daerah aliran sungai (DAS) yang melewati kawasan industri dan pemukiman padat seperti Cisadane, Cibanten, dan Ciujung. Limbah cair domestik yang tidak diolah terlebih dahulu, pembuangan limbah industri tanpa izin, serta rendahnya cakupan layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi penyebab utama pencemaran tersebut. Cakupan layanan air limbah domestik di Provinsi Banten sendiri masih sangat rendah, yakni di bawah 25% dari total rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan air limbah terpadu, pengawasan ketat terhadap industri, serta edukasi publik mengenai pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih.

Isu keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi Banten semakin krusial seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan laju pembangunan. Berdasarkan data RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, estimasi luas lahan kritis di Provinsi Banten mencapai lebih dari 110.000 hektar, yang tersebar terutama di wilayah selatan, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Di sisi lain, ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama, mengingat cakupan pelayanan air minum layak di Provinsi Banten baru mencapai 79,3% (gabungan kawasan perkotaan dan perdesaan) pada tahun 2024.

Tabel 9. Perbandingan Akses Air Minum Layak Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020–2024

Tahun	Banten (%)	Nasional (%)
2020	73,1	84,1
2021	75,4	86,2
2022	77,8	87,4
2023	78,6	88,1
2024	79,3	89,5

Kondisi ini diperburuk oleh laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang mencapai rata-rata 2.400 hektar per tahun. Alih fungsi ini berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis kawasan dan semakin menurunnya cadangan pangan lokal. Selain itu, eksploitasi sumber daya air tanah yang berlebihan di wilayah utara, terutama Tangerang Raya dan Cilegon, menyebabkan penurunan muka air tanah dan berisiko menimbulkan penurunan tanah (*land subsidence*).

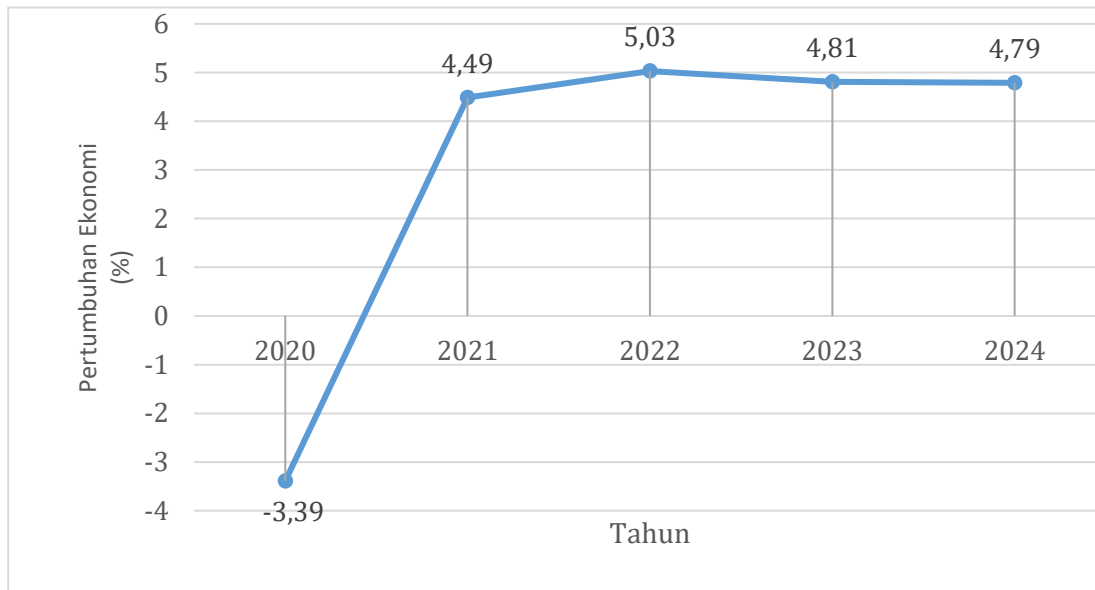
### 2.1.2. Aspek Ekonomi, Industri, dan Daya Saing

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah strategis dalam struktur ekonomi nasional Indonesia. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, Banten berperan sebagai penghubung vital antara Pulau Jawa dan Sumatera, serta menjadi daerah *hinterland* dari pusat kegiatan nasional, yakni DKI Jakarta. Karakteristik geografis yang sedemikian strategis tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi regional. Dalam perspektif ekonomi makro, Provinsi Banten memiliki struktur ekonomi yang relatif kuat dan terdiversifikasi, yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa transportasi. Struktur ekonomi ini menjadi pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan PDRB yang stabil dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikutip dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten menunjukkan pemulihan ekonomi yang mencerminkan dampak langsung dari pandemi COVID-19 dan respons kebijakan ekonomi daerah yang adaptif. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami

kontraksi signifikan sebesar -3,39% yang menandai tekanan hebat terhadap sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa transportasi akibat pembatasan aktivitas sosial dan gangguan rantai pasok global. Penurunan ini juga merefleksikan lemahnya permintaan domestik, turunnya ekspor, dan stagnasi investasi selama periode awal pandemi.

Gambar 1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2020–2024



Namun, pada tahun 2021, perekonomian mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 4,49%, seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, pemulihan aktivitas industri, dan mulai pulihnya kepercayaan pasar. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, ketika ekonomi Banten mencatat pertumbuhan tertinggi selama periode lima tahun terakhir sebesar 5,03%, didorong oleh pemulihan penuh sektor industri pengolahan dan peningkatan ekspor hasil manufaktur. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 4,81% dan diproyeksikan stabil pada angka 4,79% di tahun 2024, yang mencerminkan konsolidasi pertumbuhan pasca-pandemi dan normalisasi aktivitas ekonomi.

Tabel 10. PDRB dan Kontribusi Sektor Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Sektor Ekonomi (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,5	5,3	5,2	5,0	5,0
Pertambangan dan Penggalian	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0
Industri Pengolahan	30,5	30,8	31,0	31,0	31,0
Listrik dan Gas	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Pengadaan Air serta Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Konstruksi	11,0	11,2	11,4	12,0	12,0

Sektor Ekonomi (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,5	11,7	11,8	12,0	12,0
Transportasi dan Pergudangan	8,3	8,6	8,8	9,0	9,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
Informasi dan Komunikasi	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
Real Estat	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
Jasa Perusahaan	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1
Jasa Pendidikan	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
Jasa lainnya	4,8	4,6	4,5	4,5	4,5
PDRB Provinsi Banten (triliun rupiah)	657,3	682,5	720,1	757,1	790,3

Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Banten, yakni mencapai 31%. Wilayah industri di Provinsi Banten, seperti Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, menjadi basis produksi dari berbagai komoditas industri nasional, termasuk industri kimia dasar, petrokimia, semen, logam dasar, tekstil, serta makanan dan minuman. Kota Cilegon, misalnya, dikenal sebagai kota industri berat karena keberadaan Krakatau Steel dan berbagai industri hilir lainnya yang menyuplai kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kawasan industri modern seperti Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Modern Cikande Industrial Estate, dan Banten Industrial Park telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan daya tarik investasi yang sangat tinggi.

Peluang pengembangan sektor industri di Banten semakin terbuka lebar dengan adanya integrasi kawasan industri dengan infrastruktur strategis. Keberadaan Pelabuhan Merak dan konektivitas dengan Tol Trans-Jawa memperkuat posisi Banten sebagai pintu gerbang distribusi barang dari dan ke wilayah barat Indonesia. Selain itu, kedekatan Banten dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberikan akses logistik yang sangat kompetitif bagi sektor industri yang berorientasi ekspor. Hal ini juga diperkuat dengan rencana pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai pelabuhan pendukung Tanjung Priok, yang diharapkan dapat menjadi salah satu simpul logistik baru nasional.

Selain sektor industri, sektor perdagangan dan jasa juga memberikan kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian Provinsi Banten. Perkembangan kawasan urban seperti Kota Tangerang, Kota Serang, dan Tangerang Selatan telah menjadikan Banten sebagai salah satu pusat

perdagangan dan jasa baru di luar DKI Jakarta. Tercatat bahwa sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 12% terhadap PDRB Provinsi Banten. Dalam konteks ini, Banten berperan sebagai wilayah komersial sekaligus pasar potensial dengan populasi lebih dari 12 juta jiwa, yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Hal ini membuka peluang besar dalam pengembangan sektor jasa modern seperti jasa keuangan, logistik, teknologi informasi, serta ekonomi digital yang berbasis elektronik (*e-commerce*).

Di sektor transportasi dan pergudangan, Provinsi Banten mencatatkan kontribusi sebesar 9% terhadap PDRB. Hal ini sangat wajar mengingat letak geografis Banten yang sangat strategis sebagai koridor distribusi lintas pulau dan internasional. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat logistik nasional melalui pembangunan *dry port*, kawasan pergudangan terpadu, dan sistem distribusi berbasis digital. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur, integrasi sistem transportasi dan logistik di Banten juga akan meningkatkan efisiensi biaya distribusi nasional yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam daya saing logistik Indonesia.

Selain sektor sekunder dan tersier, Provinsi Banten juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, yakni sekitar 5%. Wilayah selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan kantong pertanian dan peternakan rakyat yang masih memiliki ruang pengembangan melalui pendekatan hilirisasi dan integrasi dengan ekowisata. Produk-produk khas Banten seperti gula aren Lebak, kopi Pandeglang, dan kerbau rawa Lebak memiliki nilai kultural dan ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan berbasis kearifan lokal.

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menjadi landasan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis pesisir dan bahari. Selain itu, potensi wisata budaya seperti Banten Lama, wisata adat Baduy, serta destinasi alam seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Pulosari, dan Pantai Sawarna menjadi aset besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Dengan penerapan pendekatan *community-based tourism*, Banten berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian budaya dan lingkungan.

Dalam konteks transformasi ekonomi global, Banten juga memiliki peluang strategis untuk mengembangkan sektor ekonomi hijau dan industri berkelanjutan. Program transisi energi nasional membuka peluang pengembangan EBT di Provinsi Banten, termasuk potensi energi surya, mikrohidro, serta biogas dan biomassa. Wilayah selatan Banten yang relatif belum terindustrialisasi dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan kawasan ekonomi hijau yang berbasis energi bersih dan ekonomi sirkular.

Dari sisi sumber daya manusia, Banten memiliki bonus demografi dengan persentase penduduk usia produktif yang tinggi. Hal ini menjadi peluang besar untuk mendorong penciptaan wirausaha baru dan tenaga kerja industri melalui peningkatan kapasitas SDM, pendidikan vokasi, dan pelatihan berbasis pada kebutuhan industri (*demand-driven*). Pemerintah Provinsi Banten melalui

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 telah menetapkan program prioritas untuk memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja sebagai bagian dari strategi menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi.

Meskipun memiliki potensi dan nilai strategis yang tinggi, Provinsi Banten juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan ekonomi dan penguatan daya saing daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka. Data BPS mencatat bahwa pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten sebesar 6,68%, tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 6,75% dan jauh di atas nilai TPT nasional yang berada di angka 4,91%. Permasalahan ini sebagian besar terjadi karena *mismatch* antara kebutuhan dunia kerja dan keterampilan angkatan kerja, serta masih terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal di luar kawasan industri.

Tabel 11. TPT di Provinsi Banten Tahun 2019–2024

Tahun	Banten (%)	Nasional (%)
2019	8,11	5,23
2020	10,64	7,07
2021	9,10	6,49
2022	8,09	5,86
2023	7,52	5,32
2024	6,68	4,91

Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat belum mendapatkan dukungan maksimal, baik dari segi pembiayaan, akses pasar, maupun digitalisasi. UMKM di Provinsi Banten menghadapi tantangan dalam integrasi dengan rantai pasok industri besar serta kurangnya perlindungan terhadap produk lokal yang bersaing dengan produk impor murah. Kesenjangan wilayah antara utara dan selatan juga menjadi permasalahan penting. Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah utara (Tangerang, Cilegon, dan Serang) yang memiliki infrastruktur dan industri mapan, sementara untuk wilayah selatan (Pandeglang dan Lebak) masih tertinggal baik dari segi PDRB per kapita, akses layanan dasar, maupun investasi ekonomi. Sektor pertanian dan perikanan sebagai penyangga ekonomi wilayah selatan juga menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, serta minimnya adopsi teknologi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Banten hanya sekitar 5%, jauh di bawah sektor industri dan jasa, meskipun tenaga kerja yang terserap di sektor ini masih signifikan, terutama di Pandeglang dan Lebak.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi dan industri, Pemerintah Provinsi Banten melalui RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 telah menetapkan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini difokuskan pada penguatan sektor industri unggulan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor UMKM, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta pengembangan ekosistem inovasi dan digitalisasi. Langkah awal yang penting adalah mendorong transformasi sektor industri dari industri berbasis komoditas dan ekstraktif ke arah industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Pengembangan kawasan industri modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan (*green industrial estate*) menjadi prioritas utama, termasuk transformasi kawasan industri lama menjadi kawasan *eco-industrial park* (EIP) yang mengadopsi prinsip efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah berkelanjutan.

Di sisi lain, untuk menurunkan angka pengangguran, pemerintah daerah perlu memperkuat program *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, perluasan program pelatihan berbasis kompetensi, serta penyediaan insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, pengembangan pusat inkubasi bisnis dan inovasi daerah dapat menjadi katalisator bagi penciptaan wirausaha baru yang berbasis teknologi dan ekonomi kreatif.

Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong pembangunan ekonomi berbasis kawasan untuk menjawab ketimpangan antarwilayah. Salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan di wilayah selatan seperti pertanian organik, perikanan tangkap, peternakan rakyat, dan agrowisata. Dukungan terhadap infrastruktur dasar, jalan produksi, irigasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah perdesaan dan mengurangi kesenjangan.

Sementara itu, sektor UMKM dan ekonomi kreatif akan difokuskan pada transformasi digital, peningkatan akses pasar, serta integrasi dengan rantai pasok industri besar dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen memperkuat sistem perlindungan dan promosi produk lokal, termasuk sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual (HKI), dan branding daerah. Strategi ini ditujukan terutama untuk menopang pengembangan produk-produk serta usaha lokal ditengah gempuran globalisasi yang masif. Dalam rangka memperkuat daya saing daerah secara menyeluruh, Provinsi Banten juga akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas, termasuk pengembangan kawasan logistik terpadu, pelabuhan pengumpul, revitalisasi pasar tradisional, serta peningkatan layanan digital publik dan jaringan internet perdesaan. Peningkatan indeks daya saing akan dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan investasi yang ramah dan cepat, serta kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media) dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Tabel 12. Fokus Strategis Peningkatan Ekonomi Provinsi Banten

Fokus Strategis	Upaya yang Dapat Dilakukan
Penguatan Industri	Revitalisasi kawasan industri, pengembangan EIP, industrialisasi dan insentif produk lokal

Fokus Strategis	Upaya yang Dapat Dilakukan
Penyerapan Tenaga Kerja	Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, insentif tenaga kerja lokal
Penguatan UMKM	Akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, perlindungan produk lokal
Pemerataan Wilayah	Pengembangan ekonomi wilayah selatan (Lebak, Pandeglang)
Daya Saing dan Inovasi	Inkubator bisnis, kemitraan riset dan industri, strategi kolaborasi <i>pentahelix</i> , digitalisasi layanan

Selain itu, daya saing Provinsi Banten masih dibatasi oleh faktor-faktor seperti rendahnya kapasitas inovasi daerah, keterbatasan infrastruktur digital di luar wilayah urban, serta birokrasi pemerintahan yang masih belum sepenuhnya efisien dalam mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Banten pada tahun 2024 tercatat cukup tinggi yakni 3,89 dan berada di atas peringkat IDSD nasional yang berada di angka 3,43. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar-indikator, terutama dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan ekosistem riset dan inovasi.

Tabel 12. IDSD Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Tahun	Banten (skor)	Nasional (skor)
2020	3,42	
2021	3,46	
2022	3,62	3,26
2023	3,60	3,44
2024	3,89	3,43

### 2.1.3. Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor fundamental yang berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Di Provinsi Banten, peran strategis kedua sektor ini menjadi semakin penting seiring dengan dinamika pembangunan yang menuntut kemampuan adaptif terhadap perubahan global, regional, dan nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kelima di Indonesia dan komposisi demografis yang didominasi oleh usia produktif, Provinsi Banten berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan momentum bonus demografi. Namun demikian, keberhasilan mengubah potensi demografis tersebut menjadi modal pembangunan yang produktif sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya.

Provinsi Banten, sebagai salah satu provinsi muda di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000, memiliki keunggulan demografis yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dengan populasi lebih dari 12 juta jiwa pada tahun 2023, Banten merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kelima di Indonesia. Sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun), yakni sekitar 68% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten tengah berada dalam masa bonus demografi, yakni situasi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini, jika dimanfaatkan secara optimal, dapat menjadi pendorong utama akselerasi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini.

Indikator utama yang dapat menggambarkan kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggabungkan tiga dimensi penting: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Banten mengalami tren positif dalam empat tahun terakhir yakni dari 72,45 pada tahun 2020 menjadi 74,48 pada tahun 2024, masuk dalam kategori “tinggi”. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan secara sistemik dalam layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat. Jika ditinjau dari komponennya, rata-rata lama sekolah (RLS) tercatat sebesar 9,23 tahun, sementara harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,10 tahun pada tahun 2024. Artinya, secara umum masyarakat Banten mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMP, dengan harapan dapat menempuh hingga setara SMA atau lebih. Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, namun sekaligus menyoroti pentingnya intervensi lanjutan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi serta pendidikan vokasional pasca sekolah menengah.

Tabel 13. IPM Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Tahun	IPM	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Umur Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita (juta Rp/th)
2020	72,45	12,89	8,89	69,96	11,96
2021	72,72	13,02	8,93	70,02	12,03
2022	73,32	13,05	9,13	70,39	12,22
2023	73,87	13,09	9,15	70,77	12,60
2024	74,48	13,10	9,23	71,02	13,09

Sektor pendidikan memiliki nilai strategis sebagai pilar utama pembentukan sumber daya manusia unggul. Secara spasial, Provinsi Banten memiliki sebaran lembaga pendidikan formal yang cukup merata, dengan lebih dari 14.000 satuan pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan memiliki konsentrasi lembaga pendidikan tinggi dan sekolah unggulan yang lebih tinggi dibandingkan daerah selatan seperti Pandeglang dan Lebak. Hal ini menunjukkan potensi

wilayah utara dalam menjadi pusat pertumbuhan sektor pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pendidikan tidak hanya memiliki nilai ekonomi dalam meningkatkan peluang kerja dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memiliki nilai sosial yang besar dalam membentuk warga negara yang kritis, adaptif, dan berintegritas. Di tengah disrupsi teknologi dan globalisasi, tantangan pendidikan di Banten kini tidak lagi hanya pada akses, tetapi pada peningkatan kualitas. Masih terdapat kesenjangan signifikan antara kualitas pendidikan di wilayah utara (Tangerang Raya, Kota Serang) dengan wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak. Hal ini terlihat dari rasio guru bersertifikat, tingkat kelulusan siswa, capaian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), serta akses terhadap fasilitas TIK dan pembelajaran daring. Dengan demikian, pendidikan di Banten harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga menutup kesenjangan kualitas antarwilayah melalui penguatan tata kelola, pemerataan sarana-prasarana, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Nilai strategis pendidikan di Banten juga terletak pada perannya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri lokal. Sebagai provinsi dengan basis industri manufaktur dan jasa yang kuat, Banten menghadapi tantangan mismatch antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi utama yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui revitalisasi SMK dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Program magang, kurikulum adaptif, dan sertifikasi kompetensi menjadi strategi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara sekolah dan pasar kerja. Dengan pengembangan klaster industri seperti petrokimia, logam, makanan-minuman, dan ekonomi kreatif digital, pendidikan vokasi di Banten memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai penopang utama transformasi ekonomi berbasis SDM unggul.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga memainkan peran strategis yang tidak kalah penting dalam memastikan kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Kesehatan bukan hanya prasyarat fisik bagi partisipasi dalam dunia kerja dan aktivitas sosial, tetapi juga berkontribusi besar terhadap indikator pembangunan manusia. Dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia, dimensi kesehatan diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup, yang pada tahun 2024 di Provinsi Banten tercatat mencapai 71,02 tahun, meningkat dari 69,96 tahun pada 2020. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Banten hidup lebih sehat dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang semakin baik. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 72,39 tahun pada tahun 2024 dan berada di bawah target ideal provinsi maju, sehingga memerlukan akselerasi perbaikan layanan dan peningkatan cakupan.

Nilai strategis sektor kesehatan juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan ketahanan keluarga. Masalah-masalah kesehatan seperti angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), stunting, dan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes, masih menjadi tantangan utama di Banten, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Stunting, misalnya, bukan hanya masalah gizi, tetapi juga merupakan indikator

kegagalan intervensi lintas sektor mulai dari sanitasi, pendidikan ibu, hingga akses layanan kesehatan anak. Oleh karena itu, investasi pada layanan kesehatan primer, pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) menjadi langkah prioritas yang harus terus diperkuat.

Di sektor kesehatan, Provinsi Banten memiliki 128 rumah sakit dan lebih dari 900 puskesmas dan klinik, dengan distribusi yang relatif merata di kawasan urban. Capaian indikator kesehatan seperti angka harapan hidup juga terus meningkat, dari 69,92 tahun pada 2020 menjadi 70,58 tahun pada 2023, mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan dasar dan akses gizi masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah menjangkau lebih dari 85% penduduk Banten, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial di sektor kesehatan relatif berjalan baik. Rasio fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit, meskipun belum sepenuhnya merata, mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas, terutama di wilayah perkotaan seperti Tangerang dan Cilegon. Namun demikian, ketimpangan layanan kesehatan pada wilayah selatan Provinsi Banten perlu mendapatkan perhatian serius untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berdaya saing.

Penting pula untuk dicermati bahwa tantangan di sektor kesehatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan mental dan sosial. Provinsi Banten, sebagaimana wilayah lain di Indonesia, menghadapi peningkatan kasus gangguan kesehatan jiwa, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu, nilai strategis sektor kesehatan juga mencakup penguatan layanan kesehatan jiwa, konseling sekolah, dan pengembangan program promotif dan preventif berbasis komunitas. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan SDM yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara mental dan mampu berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dari sisi infrastruktur dan tata kelola, potensi digitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan juga sangat besar. Dengan tingkat penetrasi internet rumah tangga mencapai lebih dari 70%, Provinsi Banten memiliki peluang untuk memperluas layanan berbasis digital seperti *e-learning*, *telemedicine*, dan sistem monitoring kesehatan ibu dan anak berbasis aplikasi. Dengan penetrasi internet yang tinggi dan populasi urban yang besar, Provinsi Banten dapat memperluas adopsi *e-learning* di sekolah dan *telemedicine* di layanan kesehatan primer, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menggagas penguatan ekosistem digital pendidikan dan kesehatan melalui integrasi data lintas Perangkat Daerah, pemanfaatan aplikasi layanan masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, peran pendidikan dan kesehatan di Banten juga sangat strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-3 (kehidupan sehat dan sejahtera) dan ke-4 (pendidikan berkualitas). Dengan posisi geografis yang dekat dengan pusat ekonomi nasional, Banten memiliki peluang untuk menjadi model integrasi SDGs dalam kebijakan pembangunan daerah berbasis SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, melibatkan aktif masyarakat sipil, serta adopsi pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala.

Sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten bukan hanya instrumen pelayanan dasar, tetapi juga pondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, terdidik, produktif, dan inovatif. Keberhasilan pembangunan kedua sektor ini akan menentukan keberlanjutan transformasi ekonomi, ketahanan sosial, serta kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi teknologi, krisis iklim, dan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus diposisikan sebagai prioritas strategis dalam seluruh perencanaan dan penganggaran daerah, dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, dimensi standar hidup layak dalam IPM diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang juga meningkat dari Rp11,96 juta pada 2020 menjadi Rp13,09 juta pada 2024. Meskipun angka ini masih tergolong moderat dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat atau DKI Jakarta, tren positifnya menandakan peningkatan daya beli masyarakat dan akses terhadap kebutuhan dasar yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari program perlindungan sosial, stimulus ekonomi daerah, dan pertumbuhan sektor informal maupun UMKM yang cukup signifikan selama periode pemulihan pasca-pandemi. Meskipun angka ini masih tergolong moderat dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat atau DKI Jakarta, tren positifnya menandakan peningkatan daya beli masyarakat dan akses terhadap kebutuhan dasar yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari program perlindungan sosial, stimulus ekonomi daerah, dan pertumbuhan sektor informal maupun UMKM yang cukup signifikan selama periode pemulihan pasca-pandemi.

Peluang pembangunan SDM di Banten juga didukung oleh infrastruktur yang relatif lebih baik dibandingkan banyak provinsi lain di luar Jawa. Tingkat penetrasi internet rumah tangga di Banten mencapai lebih dari 70%, yang membuka peluang besar untuk memperluas program pendidikan dan kesehatan berbasis digital, termasuk di dalamnya *e-learning*, *telemedicine*, serta sistem informasi layanan publik berbasis daring. Kota Tangerang Selatan, misalnya, menjadi pionir dalam pengembangan “Smart City” yang berbasis pada konektivitas digital untuk layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, keberadaan institusi pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi yang semakin berkembang juga menjadi kekuatan utama pembangunan SDM. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Politeknik dan SMK berbasis industri memberikan dukungan terhadap peningkatan keterampilan teknis generasi muda. Program revitalisasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri menjadi krusial dalam menjawab tantangan mismatch antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Dari perspektif wilayah, peluang pengembangan SDM secara spasial masih terbuka lebar, terutama di wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak yang memiliki tantangan infrastruktur, namun juga menyimpan potensi sumber daya lokal yang kaya. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah ini akan memperkuat pembangunan SDM yang inklusif dan mengurangi ketimpangan antar-wilayah. Pemerintah Provinsi Banten melalui RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 telah menetapkan pembangunan SDM

unggul sebagai salah satu prioritas utama, dengan fokus pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Di balik capaian positif, Provinsi Banten masih menghadapi permasalahan struktural dalam pembangunan SDM. Salah satu permasalahan utama di sektor pendidikan adalah tingginya disparitas kualitas dan akses antarwilayah, terutama antara wilayah utara dan selatan. Wilayah seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih memiliki angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP dan SMA yang lebih rendah dibandingkan kota/kabupaten di wilayah utara. Kualitas guru dan sarana prasarana juga belum merata, terutama di sekolah-sekolah daerah terpencil yang minim akses teknologi dan pembelajaran digital. Permasalahan lainnya adalah rendahnya anggaran pendidikan untuk program inovatif seperti pelatihan guru, beasiswa prestasi, dan pengembangan pendidikan vokasi. Banyak lulusan SMA/SMK di Banten yang mengalami kesulitan transisi ke dunia kerja karena kurangnya keterampilan kerja praktis dan literasi digital.

Di sektor kesehatan, meskipun cakupan layanan dasar meningkat, masih terdapat tantangan dalam hal rasio tenaga kesehatan, terutama dokter dan bidan di daerah perdesaan. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Banten masih di bawah standar WHO, yakni hanya sekitar 16 orang, sedangkan idealnya di atas 30. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di wilayah tertentu, terutama di daerah tertinggal. Di sisi lain, penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat, seiring dengan gaya hidup perkotaan dan konsumsi makanan olahan.

Tabel 14. Beberapa Permasalahan Kunci Pembangunan SDM di Provinsi Banten

Isu Strategis	Indikator	Capaian	Tantangan
Akses pendidikan menengah	APM SMA	±73%	Disparitas wilayah selatan
Kualitas guru	Proporsi guru tersertifikasi	±68%	Kesenjangan antar-wilayah
Rasio tenaga kesehatan	Dokter umum/100.000 penduduk	16	Di bawah standar WHO (30)
Kematian ibu dan bayi	AKI/AKB	Tinggi	Akses fasilitas, gizi, dan pengetahuan dasar
Digitalisasi layanan	Sekolah/puskesmas daring	Sedang	Infrastruktur TIK dan literasi digital

#### 2.1.4. Aspek Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi strategis di Indonesia dengan karakteristik geografis, demografis, dan ekonomi yang saling memperkuat. Dari sisi kependudukan, provinsi ini mencatat jumlah penduduk sebesar lebih dari 12,5 juta jiwa pada tahun 2025, dengan tren pertumbuhan yang konsisten hingga diproyeksikan mencapai lebih dari 13 juta jiwa pada

tahun 2030. Komposisi penduduk yang dominan berada pada kelompok usia produktif menjadikan Banten sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi, yakni situasi di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan kelompok usia tidak produktif. Kondisi ini merupakan momentum emas bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi dengan berbasis pada penguatan sumber daya manusia (SDM).

Kelebihan demografis ini menjadi potensi utama dalam mendukung produktivitas sektor ketenagakerjaan, kewirausahaan, serta konsumsi domestik. Struktur demografis Provinsi Banten menunjukkan bahwa lebih dari 66% penduduk berada pada rentang usia 15–64 tahun. Hal ini menandakan bahwa Banten memiliki kapasitas tenaga kerja yang sangat besar. Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 6 juta orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 66,17%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menunjukkan tren peningkatan, dari 46,16% pada 2023 menjadi 47,02% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses perempuan terhadap pasar kerja, serta membuka peluang bagi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif gender.

Tabel 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2020–2024

Tahun	TPAK (%)	TPAK Perempuan (%)
2020	64,32	44,80
2021	65,21	45,21
2022	65,88	45,90
2023	65,91	46,16
2024	66,17	47,02

Secara spasial, wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi di Banten. Wilayah ini memiliki keunggulan dalam infrastruktur, konektivitas, serta konsentrasi kawasan industri, jasa, dan pendidikan. Hal ini menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan tenaga kerja sektor formal dan profesional. Sebaliknya, wilayah selatan Banten (Pandeglang dan Lebak) memiliki potensi dalam pengembangan ketenagakerjaan berbasis sektor primer dan informal seperti pertanian, perikanan, dan agrowisata. Dengan demikian, struktur demografis dan spasial di Provinsi Banten dapat menyediakan basis yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan wilayah dan spesialisasi sektor.

Sektor lapangan usaha di Banten menunjukkan diversifikasi yang menjanjikan. Perdagangan besar dan eceran menyerap lebih dari 23% tenaga kerja, disusul oleh pertanian sebesar 21,1% dan industri pengolahan di angka

15,8%. Sektor konstruksi dan transportasi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Komposisi ini menandakan adanya peluang untuk melakukan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan jasa profesional, khususnya di wilayah urban seperti Tangerang Selatan dan Kota Serang. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong skema kemitraan antar sektor melalui pendekatan *pentahelix* untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja.

Tabel 16. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2024

Sektor Lapangan Usaha	Proporsi Pekerja (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,1
Industri Pengolahan	15,8
Perdagangan Besar dan Eceran	23,4
Konstruksi	9,3
Transportasi dan Pergudangan	7,5
Jasa Pendidikan	4,0
Administrasi Pemerintahan	3,1
Sektor Lainnya	15,8

Peluang besar lainnya terletak pada pertumbuhan sektor kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Berdasarkan indikator rasio kewirausahaan, Banten menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan tingginya semangat berusaha masyarakat, terutama kalangan muda. Potensi ini dapat dikembangkan melalui inkubator bisnis, pelatihan keterampilan berbasis digital, serta kemudahan akses terhadap permodalan mikro. Kota Tangerang Selatan, misalnya, memiliki komunitas startup dan pelaku ekonomi kreatif yang tumbuh cepat di bidang kuliner, teknologi informasi, desain grafis, dan animasi. Dengan penguatan infrastruktur digital dan kebijakan afirmatif, Banten memiliki peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa bagian barat.

Konektivitas wilayah Banten dengan pusat ekonomi nasional juga merupakan peluang strategis untuk memperluas akses ketenagakerjaan dan investasi. Dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, dan jaringan jalan tol Trans-Jawa serta Serang–Panimbang, mobilitas tenaga kerja dan arus barang menjadi lebih efisien. Ini menjadikan Banten sebagai kawasan penyangga logistik, distribusi, dan industri yang sangat potensial. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan kawasan industri halal dapat membuka ribuan lapangan kerja baru serta memperkuat integrasi antara sektor pariwisata, pertanian, dan industri berbasis komunitas.

Namun, di balik berbagai nilai strategis tersebut, Provinsi Banten juga menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang kompleks dan saling terkait. Pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi dalam struktur

tenaga kerja di Provinsi Banten. Berdasarkan data tahun 2024, sebesar 27,2% pekerja hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SD/ sederajat, 16,5% lulusan SMP, dan 34,9% lulusan SMA/SMK/ Sederajat. Sementara itu, proporsi pekerja dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, dan pascasarjana) hanya mencapai 14,5%. Ini menjadi hambatan besar bagi transformasi produktivitas tenaga kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sejalan dengan tuntutan industri berbasis teknologi dan jasa modern. Kurangnya program pelatihan berkelanjutan dan keterbatasan akses pendidikan tinggi, khususnya di wilayah selatan Banten, memperparah ketimpangan ini.

Tabel 17. Distribusi Pendidikan Terakhir Masyarakat di Provinsi Banten Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Persentase (%)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	2,1
Tidak Tamat SD	4,8
SD/ Sederajat	27,2
SMP/ Sederajat	16,5
SMA/ SMK/ Sederajat	34,9
Diploma I/ II/ III	5,5
Sarjana	8,1
Pascasarjana (Magister/ Doktor)	0,9

Isu lain yang tidak kalah krusial adalah ketimpangan wilayah dalam hal pembangunan kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Kota Tangerang Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan terendah sebesar 2,36%, sementara Kabupaten Pandeglang masih berada di angka tinggi yakni 9,18%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah utara yang memiliki infrastruktur lebih baik dan konektivitas tinggi. Sementara itu, wilayah selatan cenderung tertinggal dalam hal investasi, layanan dasar, dan kesempatan kerja formal. Oleh karena itu, salah satu tantangan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah mengembangkan model pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keadilan wilayah.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Provinsi Banten secara umum, terjadi tren penurunan sepanjang tahun 2024 yang mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat meskipun masih menyisakan tantangan yang signifikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,84%, kemudian menurun menjadi 5,70% pada September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang dari 791,61 ribu jiwa menjadi 777,49 ribu jiwa dalam periode enam bulan tersebut. Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 5,69% menjadi 5,57%,

sementara di perdesaan terjadi penurunan dari 6,44% menjadi 6,20%. Meskipun demikian, kesenjangan antar-wilayah tetap tampak, dengan kemiskinan perdesaan masih berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel 18. Statistik Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2024

Indikator	Maret 2024	September 2024
• Persentase Penduduk Miskin (Total)	5,84 %	5,70 %
• Perkotaan	5,69 %	5,57 %
• Perdesaan	6,44 %	6,20 %
• Jumlah Penduduk Miskin	791,61 ribu	777,49 ribu
• Perkotaan	615,07 ribu	606,52 ribu
• Perdesaan	176,54 ribu	170,98 ribu
• Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	654.213	667.403
• Makanan (proporsi dari garis kemiskinan)	474.039 (72,5 %)	486.415 (72,9 %)
• Bukan Makanan	180.174 (27,5 %)	180.988 (27,1 %)
• Rerata Anggota Rumah Tangga Miskin	5,09 orang	5,32 orang
• Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	—	0,799

Salah satu indikator penting yang turut mengalami kenaikan adalah garis kemiskinan, yakni batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan Banten meningkat dari Rp654.213 pada Maret menjadi Rp667.403 pada September 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 72,9% digunakan untuk konsumsi makanan, mencerminkan dominasi komponen pangan dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin. Adapun pengeluaran non-makanan (seperti pendidikan, transportasi, dan perumahan) menyumbang sekitar 27,1%. Peningkatan garis kemiskinan ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi, khususnya dari sektor pangan, yang memerlukan respons kebijakan stabilisasi harga dan jaminan ketahanan pangan rumah tangga miskin.

Profil rumah tangga miskin di Provinsi Banten juga menunjukkan karakteristik sosial yang perlu diperhatikan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin meningkat dari 5,09 menjadi 5,32 orang, yang berimplikasi pada tingginya beban tanggungan dalam satu keluarga miskin. Ini dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,799 pada September 2024 menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, sebagian dari mereka masih mengalami kekurangan pengeluaran yang relatif dalam dibandingkan dengan garis kemiskinan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin belum jauh di atas ambang batas kemiskinan dan masih rentan kembali miskin akibat guncangan ekonomi kecil.

Permasalahan kesejahteraan lainnya muncul dalam bentuk keterbatasan sistem perlindungan sosial yang efektif. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, masih terdapat kelompok rentan yang belum terjangkau program bantuan sosial secara optimal, terutama masyarakat di daerah terpencil dan pekerja sektor informal. Selain itu, pendataan yang belum terintegrasi antara Dinas Sosial, Disnaker, dan Dinas Kesehatan menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan serta tumpang tindih program. Upaya harmonisasi data melalui integrasi basis data kesejahteraan sosial seperti DTKS, P3KE, dan SIKS-NG menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan intervensi.

Sektor ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi tantangan serius. Dari total 22.027 penyandang disabilitas di Provinsi Banten, hanya sekitar 5,6% yang bekerja di sektor formal, yakni sebanyak 1.230 orang. Angka ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan afirmatif dan minimnya peluang kerja yang layak bagi kelompok disabilitas. Hal ini diperparah oleh kurangnya aksesibilitas fisik terhadap fasilitas publik dan tempat kerja, serta rendahnya pelatihan vokasi khusus bagi difabel. Padahal, penyandang disabilitas memiliki potensi besar apabila didukung dengan ekosistem kerja yang ramah inklusi.

Di sisi lain, kendala dalam pembangunan kesejahteraan juga berkaitan erat dengan belum optimalnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak pelaku UMKM yang masih beroperasi secara konvensional, tanpa pencatatan keuangan yang rapi dan belum terhubung ke platform digital. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan akses perbankan, investasi, dan kemitraan bisnis. Rendahnya literasi digital ini menjadi hambatan serius dalam upaya modernisasi ekonomi lokal dan inklusi keuangan di Banten.

Selain itu, permasalahan lain yang tak kalah signifikan adalah terbatasnya sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Banyak kebijakan yang berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka besar pembangunan SDM. Misalnya, program pelatihan kerja oleh Disnaker belum terhubung dengan peta kebutuhan tenaga kerja industri dari Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan. Ini menyebabkan ketidakefisienan dalam anggaran, serta luputnya peluang untuk membangun sistem vokasi dan pelatihan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa meskipun Provinsi Banten memiliki nilai-nilai strategis yang sangat besar dari sisi kependudukan, ketenagakerjaan, dan potensi kesejahteraan, berbagai permasalahan struktural tetap menjadi tantangan nyata yang memerlukan intervensi kebijakan sistematis dan terintegrasi. Pemerintah Provinsi Banten perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan sektoral, tetapi berbasis kolaborasi multipihak (*pentahelix*), data yang valid dan terintegrasi, serta evaluasi berbasis hasil. Pendekatan ini akan membuka jalan menuju transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif di seluruh wilayah Banten.

### 2.1.5. Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pemerintahan dan pelayanan publik merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam konteks Provinsi Banten, aspek ini memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan tata kelola yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern. Letak geografis Banten yang berada di jalur strategis antara Pulau Jawa dan Sumatera menjadikan provinsi ini sebagai simpul penting dalam arus logistik nasional, perdagangan antarwilayah, dan pelayanan lintas sektor. Kedekatannya dengan pusat pemerintahan nasional juga memperkuat posisi Banten dalam hal integrasi kebijakan, percepatan transformasi digital, dan reformasi birokrasi yang adaptif.

Potensi awal yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di Banten terletak pada kapasitas fiskalnya yang relatif kuat dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa. Hal ini tercermin dari peningkatan skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang naik dari 77,01 pada tahun 2023 menjadi 77,93 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran, efisiensi belanja publik, serta komitmen terhadap transparansi fiskal. Pemerintah Provinsi Banten juga telah mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis digital dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) guna mendukung efisiensi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan tata kelola fiskal yang sehat, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran secara lebih strategis dalam peningkatan layanan publik dan penguatan sistem birokrasi.

Salah satu peluang paling signifikan dalam pengembangan pelayanan publik di Provinsi Banten adalah kemajuan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nilai SPBE Provinsi Banten adalah 3,47 pada tahun 2024, yang termasuk dalam kategori “Baik” menurut Kementerian PANRB. Capaian ini menandakan bahwa proses digitalisasi administrasi pemerintahan berjalan ke arah yang positif. SPBE menjadi instrumen penting untuk mempercepat penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan aplikasi layanan terpadu (Super Apps), sistem perizinan daring, serta pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik memberikan peluang bagi Banten untuk menjangkau pelayanan hingga ke pelosok desa dengan lebih cepat dan murah. Di sisi lain, transformasi digital juga memberikan ruang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pemerintah secara lebih interaktif dan akuntabel.

Potensi digitalisasi pelayanan publik di Banten semakin diperkuat oleh peningkatan penetrasi internet dan infrastruktur teknologi informasi, terutama di kawasan urban seperti Tangerang Raya dan Serang. Kota Tangerang Selatan, misalnya, telah mengembangkan sistem Smart City yang mengintegrasikan layanan publik, data kependudukan, pengaduan warga, dan sistem informasi manajemen pemerintahan dalam satu platform. Ini menciptakan ekosistem pelayanan yang tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga memberikan ruang partisipatif bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lokal.

Pengalaman kota/kabupaten di Banten dalam membangun layanan digital ini menjadi model yang dapat direplikasi ke wilayah-wilayah lain di provinsi ini.

Selain aspek teknologi dan fiskal, potensi strategis lainnya terletak pada kapasitas kelembagaan daerah dalam mendukung inovasi tata kelola. Provinsi Banten memiliki jaringan perangkat daerah yang relatif lengkap dan tersebar, termasuk dinas-dinas teknis yang menangani pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi struktural telah dilakukan untuk menyelaraskan peran antarperangkat daerah agar lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Layanan Pengadaan (ULP) berbasis elektronik, serta layanan pengaduan masyarakat terintegrasi yang mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Nilai strategis yang tidak kalah penting dalam konteks pemerintahan di Banten adalah komitmen terhadap pencapaian visi reformasi birokrasi nasional, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Pemerintah Provinsi Banten secara aktif mengembangkan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur, mendorong rekrutmen berbasis kompetensi, dan melakukan pembinaan ASN melalui pelatihan teknis serta manajerial. Skor Indeks Reformasi Hukum (IRH) Provinsi Banten bahkan mengalami lonjakan dari 77,20 pada tahun 2022 menjadi 99,40 pada 2024 dengan kategori istimewa. Capaian ini menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun budaya hukum di lingkungan birokrasi serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peluang lainnya terletak pada upaya membangun pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Banten telah mendorong terbentuknya model pelayanan publik yang menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan penduduk di daerah terpencil. Program pelayanan administrasi kependudukan keliling, mobil layanan kesehatan terpadu, dan gerakan pelayanan terpadu di kecamatan/desa menjadi pendekatan inovatif untuk menjamin hak dasar warga terpenuhi tanpa diskriminasi. Konsep pelayanan publik partisipatif juga mulai diadopsi, di mana masyarakat dilibatkan dalam forum konsultasi layanan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan forum layanan publik daerah.

Dalam tataran nilai strategis, aspek pemerintahan dan pelayanan publik memiliki korelasi langsung dengan kepercayaan publik terhadap negara dan keberhasilan agenda pembangunan. Pemerintahan yang responsif, efisien, dan adil akan mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan aspek ini juga menjadi prioritas dalam kerangka RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Komitmen terhadap prinsip *good governance*, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan, merupakan pondasi nilai strategis yang harus dijaga dan diperkuat melalui sistem pengawasan internal yang kuat serta keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti inspektorat dan DPRD.

Perlu juga disoroti bahwa nilai-nilai strategis pemerintahan dan pelayanan publik tidak hanya berdampak pada sektor administratif, tetapi juga memiliki efek multiplikatif terhadap kualitas pembangunan di sektor lain seperti

pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Misalnya, pelayanan publik yang cepat dan akurat di sektor perizinan dapat mempercepat investasi sektor pendidikan atau kesehatan. Sebaliknya, lambannya pengurusan dokumen kependudukan dapat menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial, beasiswa, dan jaminan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan agenda lintas sektor yang berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Aspek pemerintahan serta pelayanan publik di Provinsi Banten memiliki potensi, peluang, dan nilai-nilai strategis yang sangat besar dan menjanjikan. Dengan dorongan digitalisasi, dukungan fiskal, kematangan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang terus berkembang, Provinsi Banten berpeluang menjadi model tata kelola daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, potensi ini hanya akan maksimal apabila disertai dengan keberanian dalam reformasi, inovasi kebijakan berbasis bukti, dan konsistensi dalam pengawasan pelaksanaan program. Oleh karena itu, agenda pemerintahan dan pelayanan publik harus terus dikawal dengan pendekatan strategis dan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di level pemerintahan, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun lembaga akademik.

Meskipun Provinsi Banten mencatat berbagai kemajuan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik selama beberapa tahun terakhir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan struktural dan kelembagaan masih menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam kapasitas institusional, kualitas sumber daya aparatur, dan integritas birokrasi daerah.

Salah satu permasalahan paling menonjol adalah masih rendahnya kualitas pelayanan publik di sebagian besar sektor strategis. Berdasarkan data dari Kementerian PAN-RB, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Banten pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 3,73, dengan kategori "B". Nilai ini menunjukkan stagnasi dari capaian tahun 2023 (3,74) dan lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (4,76), Jawa Tengah (4,53), dan Jawa Timur (4,63). Rendahnya IPP ini mencerminkan bahwa pelayanan publik di Banten belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip standar pelayanan minimal (SPM) seperti aksesibilitas, kecepatan, kepastian hukum, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan kesehatan dasar masih sering dikeluhkan karena prosedur yang panjang, tidak transparan, dan minimnya kanal pengaduan yang efektif.

Selain itu, tata kelola pemerintahan di Banten juga masih menghadapi tantangan serius dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini tercermin dalam turunnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 3,2 pada tahun 2023 menjadi 2,76 pada 2024, sebagaimana tercatat dalam laporan evaluasi KPK dan BPS. Penurunan ini menunjukkan melemahnya persepsi masyarakat terhadap integritas birokrasi daerah. Praktik-praktik tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik, dan

lemahnya sistem pengawasan internal menjadi akar dari rendahnya nilai IPAK tersebut. Selain itu, pelibatan masyarakat dan media sebagai pengawas kebijakan publik masih belum optimal, ditandai dengan terbatasnya forum konsultasi publik dan minimnya keterbukaan informasi layanan.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), terutama di tingkat teknis dan operasional. Banyak ASN yang belum memiliki kompetensi manajerial, digital, dan analitis yang memadai untuk menjawab tantangan kompleksitas pelayanan publik di era digital. Hasil audit kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa sekitar 40% ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten masih belum memenuhi standar kompetensi jabatan. Hal ini diperparah oleh ketimpangan distribusi ASN, di mana banyak tenaga ahli atau pejabat fungsional terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan daerah perdesaan dan pinggiran justru kekurangan tenaga pelayanan publik yang memadai. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan layanan antarwilayah dan kualitas pelayanan dasar yang tidak merata.

Meskipun digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dikembangkan, implementasi SPBE di lapangan masih menemui banyak kendala. Skor SPBE Provinsi Banten memang meningkat menjadi 3,47 pada 2024, namun ini belum menyentuh kategori “sangat baik” (4,0 ke atas). Banyak unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang belum sepenuhnya menerapkan SPBE secara end-to-end. Sistem informasi pelayanan publik masih terfragmentasi antar dinas, belum terintegrasi dalam satu platform terpadu, dan minim interoperabilitas data. Akibatnya, masyarakat masih harus mengakses layanan secara manual atau berpindah-pindah kanal, yang mengurangi efisiensi serta memperbesar kemungkinan terjadinya mal-administrasi. Bahkan pada level dasar seperti pelayanan administrasi kependudukan, masih ditemukan kasus pengolahan data yang tidak sinkron antara Dukcapil, BPJS, dan lembaga pendidikan.

Permasalahan dalam pelayanan publik juga mencakup rendahnya literasi digital masyarakat dan ASN terhadap layanan daring. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan dan kelompok rentan, tidak mengetahui prosedur layanan daring, tidak memiliki perangkat memadai, atau tidak paham cara mengakses aplikasi pelayanan publik. Di sisi lain, ASN yang bertugas pada front desk juga belum memiliki kapasitas digital dan pelayanan yang mumpuni. Masih sering ditemui pelayanan yang lambat, tidak ramah, serta kurang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan lansia.

Dari aspek kelembagaan, masalah kelemahan koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi hambatan signifikan. Banyak kebijakan yang berjalan secara sektoral, tidak terkoordinasi, dan bahkan tumpang tindih. Misalnya, kebijakan pelatihan kerja oleh Disnakertrans belum terhubung dengan kebutuhan industri dari Disperindag. Hal yang sama terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sinkron dengan sistem perlindungan sosial di Dinas Sosial. Akibatnya, efektivitas kebijakan pelayanan publik menurun, sementara beban anggaran semakin besar karena adanya inefisiensi kebijakan.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas regulasi dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan publik. Banyak perda dan pergub yang belum berbasis pada hasil riset atau analisis dampak kebijakan. Di sisi lain, instrumen evaluasi kinerja seperti SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih belum digunakan secara maksimal sebagai alat refleksi dan perbaikan program. Berdasarkan evaluasi KemenPAN-RB tahun 2023, nilai SAKIP Provinsi Banten masih dalam kategori “B”, yang menunjukkan bahwa manajemen kinerja berbasis hasil belum sepenuhnya berjalan secara sistematis.

Dalam pelayanan publik yang menysasar kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin, masih banyak tantangan yang belum terjawab. Misalnya, banyak fasilitas layanan publik yang belum ramah disabilitas, seperti tidak adanya jalur kursi roda, petugas pendamping, atau informasi dalam huruf braille di kantor pelayanan publik. Selain itu, pendekatan pelayanan publik yang *top-down* membuat kebutuhan spesifik kelompok rentan kurang terakomodasi. Masyarakat hanya dijadikan objek layanan, bukan subjek dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan layanan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik juga menjadi salah satu penyebab minimnya akuntabilitas dan responsivitas birokrasi. Kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR memang tersedia, namun tingkat penggunaannya masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan, atau merasa tidak percaya bahwa aduan mereka akan ditindaklanjuti. Ketiadaan feedback loop yang jelas dan tidak adanya publikasi respons dari pemerintah membuat sistem pengaduan menjadi formalitas semata, bukan instrumen pemberdayaan warga.

Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan juga dipengaruhi oleh kultur birokrasi yang masih feodal, hierarkis, dan kurang adaptif terhadap perubahan. Inovasi yang berasal dari level bawah sering tidak mendapat dukungan dari pimpinan, sedangkan ASN yang mencoba keluar dari pola rutinitas birokrasi seringkali dianggap melanggar norma. Hal ini menyebabkan stagnasi inovasi publik dan minimnya replikasi praktik-praktik baik antarwilayah.

Secara umum, permasalahan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Banten merupakan kombinasi dari tantangan struktural, kelembagaan, teknologi, dan budaya organisasi. Untuk mengatasi semua ini, diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga perubahan kultur pelayanan, peningkatan kapasitas ASN, penguatan sistem pengawasan, serta melibatkan aktif masyarakat dalam setiap siklus kebijakan publik. Tanpa upaya yang sistematis dan kolaboratif, berbagai inisiatif reformasi akan sulit menghasilkan perubahan yang berdampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat.

#### 2.1.6. Usulan Tema Prioritas Produk Unggulan Daerah

Kajian penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Banten disusun sebagai dasar strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pendekatan berbasis keunggulan lokal, kearifan budaya, dan inovasi

teknologi. PUD dalam hal ini tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai instrumen pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat Provinsi Banten. Dalam konteks RIPJPID, pengembangan PUD merupakan wujud nyata penerapan prinsip *science for development*, di mana riset dan inovasi digunakan untuk mengakselerasi hilirisasi sumber daya lokal, sekaligus memperkuat basis pengetahuan (*development of science*) melalui riset terapan dan teknologi inovatif.

Hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 12 sektor unggulan utama di wilayah Banten berdasarkan analisis overlay potensi ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan listrik dan gas;
2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
3. Konstruksi;
4. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor;
5. Transportasi dan pergudangan;
6. Penyediaan akomodasi dan makan dan minum;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Jasa keuangan dan asuransi;
9. Real estate;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
12. Jasa lainnya.

Dalam hal ini, pengembangan PUD diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir dengan orientasi pasar yang kuat. Di bagian hulu, strategi yang direkomendasikan mencakup penataan kawasan produksi, pemberdayaan pelaku bisnis lokal, pendampingan inovasi dan teknologi, serta penguatan lembaga keuangan mikro. Sedangkan di bagian hilir, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas produk, pemasaran berbasis digital, serta penguatan ekosistem industri dan bisnis lokal. Penetapan produk-produk tersebut memperhatikan delapan kriteria utama, yakni:

1. Keunikan atau trade mark daerah;
2. Kontribusi terhadap perekonomian daerah;
3. Potensi pasar;
4. Ketersediaan input seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan;
5. Kemitraan;
6. Dukungan kebijakan dan kelembagaan;
7. Dampak terhadap lingkungan; dan
8. Tingkat daya saing.

Kajian juga menekankan pentingnya pengembangan kelembagaan lokal sebagai penopang keberlanjutan PUD. Banyak kawasan produksi yang tumbuh secara organik berdasarkan local wisdom masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan perlu bersifat penguatan, bukan perubahan struktural. Peningkatan kapasitas SDM, perlindungan kelembagaan, serta adaptasi terhadap teknologi modern menjadi faktor kunci agar produk unggulan tetap relevan dan berdaya saing.

Dalam kerangka pengembangan PUD, model yang diusulkan adalah pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Model ini mendorong setiap desa atau wilayah untuk mengembangkan satu produk khas dengan nilai budaya dan keunikan lokal, yang memiliki potensi pasar domestik dan ekspor. Kriteria produk OVOP mencakup keunikan lokal, kualitas dan tampilan produk, potensi pasar terbuka, serta keberlanjutan produksi berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari persaingan tidak sehat antarwilayah dan mendorong diferensiasi produk berdasarkan kekhasan daerah masing-masing.

Dari hasil penilaian dengan metode pembobotan multi-kriteria, produk dengan skor tertinggi dan dianggap paling prospektif meliputi kopi untuk kategori sektor perkebunan; ikan bandeng untuk kategori sektor perikanan; kambing kosta dan kerbau untuk peternakan; kopi bubuk, gula aren, sate bandeng, dan emping melinjo untuk kategori sektor industri pengolahan; serta wisata religi Banten Lama dan wisata budaya Baduy untuk sektor pariwisata. Dalam konteks PUD, produk-produk tersebut memiliki potensi ekonomi dengan kekhasan budaya lokal. Secara spesifik, PUD Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 19 Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten

Sektor	Produk Unggulan Daerah
Perkebunan	Kopi sebagai komoditas unggulan, terutama di wilayah pegunungan di Lebak dan Pandeglang
Perikanan	Budidaya ikan bandeng, yang telah berkembang di wilayah pesisir Serang dan Tangerang
Peternakan	Kambing kosta dan kerbau yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi tinggi
Industri Pengolahan Hasil	Kopi bubuk, gula aren, sate bandeng, dan emping melinjo sebagai produk yang menggabungkan nilai tradisional, inovasi, dan potensi pasar
Pariwisata	Banten Lama (wisata religi) dan Baduy (wisata budaya) sebagai sektor jasa unggulan berbasis warisan sejarah dan kearifan lokal

PUD tersebut dinilai memiliki kombinasi ideal antara daya saing ekonomi, nilai budaya, serta potensi untuk dikembangkan melalui inovasi dan riset terapan. Kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dalam pengembangan PUD, antara lain seperti lemahnya pemasaran dan branding produk lokal, keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan, belum optimalnya sinergi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dan standarisasi mutu. Selain itu, pengembangan berbasis klaster masih bersifat parsial dan belum memiliki peta jalan yang jelas untuk tiap komoditas unggulan.

Setiap sektor tersebut tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal, tetapi juga menjadi representasi identitas sosial, budaya, dan pengetahuan masyarakat Banten. Dalam konteks penguatan daya saing ekonomi daerah serta implementasi RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030, kelima sektor tersebut perlu diintegrasikan ke dalam satu kerangka besar yang berorientasi pada PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun model ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi dengan tetap berakar pada potensi serta kearifan lokal, sehingga mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi serta berdaya saing di pasar nasional dan global. Hal ini sejalan untuk mendukung pencapaian misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertulis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, yakni “Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial”.

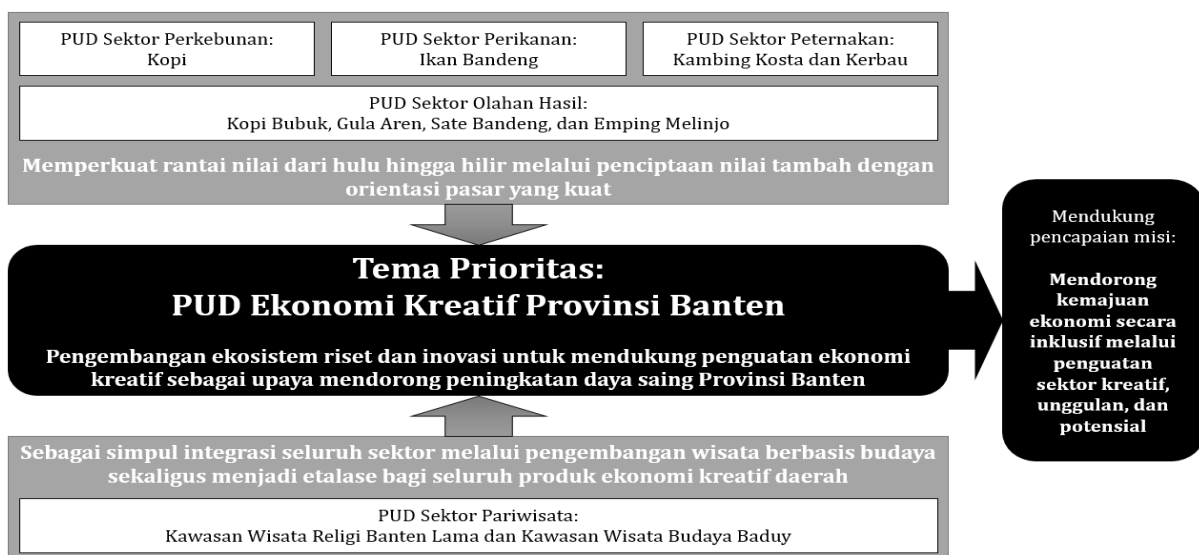
PUD Ekonomi Kreatif dimaknai sebagai kerangka integratif yang menghubungkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan inovasi ilmiah, teknologi, dan nilai budaya. Melalui pendekatan ini, aktivitas ekonomi di Banten tidak lagi hanya mengandalkan produksi primer, tetapi juga menekankan aspek kreativitas, diferensiasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai faktor pembeda. PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten menjadi instrumen strategis untuk menjembatani dua prinsip utama dalam RIPJPID yakni *development of science* dan *science for development*. Prinsip pertama diwujudkan melalui pembangunan kapasitas riset, infrastruktur pengetahuan, dan kelembagaan inovasi di tingkat daerah. Sementara prinsip kedua diwujudkan melalui penerapan hasil riset dan inovasi untuk memperkuat perekonomian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi lima sektor unggulan ke dalam PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten didasarkan pada keterkaitan rantai nilai hulu hingga hilir dan peluang pengembangan lintas sektor. Sektor perkebunan, dengan komoditas utama kopi di wilayah Lebak dan Pandeglang, diarahkan untuk membangun *coffee culture* berbasis lokal dengan inovasi pada proses pascapanen, kemasan kreatif, sertifikasi mutu, dan pengembangan wisata agrowisata kopi. Sektor perikanan, khususnya budidaya dan pengolahan bandeng, dikembangkan melalui inovasi produk seperti sate bandeng, bandeng asap, atau abon bandeng dengan sentuhan teknologi pengolahan modern dan pemasaran digital yang memperluas akses pasar hingga ekspor.

Kemudian, sektor peternakan, dengan unggulan kambing kostan dan kerbau, berfokus pada inovasi produk olahan seperti susu fermentasi dan daging olahan khas, serta penguatan citra budaya melalui festival kuliner dan

promosi peternakan tradisional. Sektor industri pengolahan hasil menjadi motor hilirisasi ekonomi kreatif dengan fokus pada diversifikasi produk kopi bubuk, gula aren, emping melinjo, dan kuliner khas Banten. Nilai tambah diciptakan melalui peningkatan desain kemasan, sertifikasi halal dan SNI, serta penguatan branding daerah. Sementara itu, sektor pariwisata, khususnya destinasi unggulan seperti Banten Lama dan Baduy, ditempatkan sebagai simpul integrasi seluruh sektor melalui pengembangan wisata berbasis budaya, sejarah, dan pengalaman lokal, sekaligus menjadi etalase bagi seluruh produk ekonomi kreatif daerah.

Gambar 2 Prioritas Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten



Pada bagian hulu, pengembangan PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan kemampuan inovasi, dan pemberdayaan pelaku lokal. Strategi yang direkomendasikan meliputi penataan kawasan produksi berbasis klaster yang mengintegrasikan kegiatan riset, produksi, dan distribusi. Setiap kawasan diarahkan menjadi *innovation zone* dengan fasilitas riset terapan, pusat pelatihan, dan inkubasi bisnis yang mendukung pengembangan teknologi lokal. Pemberdayaan pelaku bisnis lokal juga menjadi prioritas utama dengan memperkuat kapasitas petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, serta akses terhadap rantai pasok modern. Selanjutnya, pendampingan riset dan inovasi teknologi menjadi agenda strategis, di mana Bappeda, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga litbang serta seluruh perangkat daerah terkait, industri, pelaku usaha, dan masyarakat berperan aktif dalam pengembangan teknologi pascapanen, digitalisasi proses produksi, dan adaptasi terhadap standar mutu global. Di sisi lain, penguatan lembaga keuangan mikro juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah, dengan menciptakan skema pembiayaan inklusif melalui kerja sama antara perbankan daerah, koperasi, dan lembaga keuangan berbasis komunitas.

Sementara itu, pada bagian hilir, strategi difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk, perluasan akses pasar, dan pembentukan ekosistem bisnis kreatif yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas dan standarisasi produk melalui penerapan sertifikasi mutu, pengawasan rantai pasok, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Transformasi digital menjadi instrumen utama dalam memperluas pasar, dengan mendorong penggunaan *e-commerce*, media sosial, dan platform digital sebagai sarana promosi dan penjualan produk ekonomi kreatif Banten. Penguatan ekosistem industri dan bisnis lokal dilakukan dengan membangun creative industry hub sebagai wadah kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga riset, pemerintah daerah, dan komunitas kreatif dalam riset pasar, desain produk, dan inovasi bisnis. Selain itu, strategi branding dan diplomasi ekonomi daerah menjadi elemen penting untuk memperkuat citra PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten sebagai produk yang inovatif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai budaya lokal.

Berdasarkan integrasi tersebut, arah prioritas PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten ditetapkan pada tiga pilar utama. Pertama, inovasi berbasis lokalitas, di mana pengembangan produk berlandaskan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan identitas daerah sehingga setiap inovasi mencerminkan keunikan sosial dan ekonomi Banten. Kedua, transformasi digital dan hilirisasi, yang menempatkan teknologi digital sebagai pendorong efisiensi, peningkatan kualitas, dan akses pasar, sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di tingkat daerah. Ketiga, konektivitas ekosistem inovasi, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk mempercepat alih teknologi, pembiayaan, dan komersialisasi hasil riset.

#### 2.1.7. Usulan Tema Prioritas Permasalahan Utama Daerah

Keberadaan RIPJPID dalam hal ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Peran utamanya adalah mengarahkan riset dan inovasi agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan masalah pembangunan. Dengan kata lain, dokumen ini menjadi instrumen pendukung strategis untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam kerangka tersebut, dokumen utama yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi arah dan fokus RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 adalah dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan, prioritas program, serta sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, yang menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan strategi sektoral, yang kemudian dijabarkan dalam masing-masing Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Oleh karena itu, seluruh proses penentuan tema prioritas riset dan inovasi harus berangkat dari pemahaman yang komprehensif terhadap arah pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD. Adapun misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten juga memiliki delapan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Adapun kedelapan program unggulan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 20 Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

No	PU	Penjelasan
1	Banten Bagus	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air, dan hunian layak
2	Banten Sehat	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan akses kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi
3	Banten Cerdas	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten
4	Banten Kuat	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi
5	Banten Indah	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
6	Banten Makmur	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
7	Banten Ramah	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan investasi, kemudahan industri, dan penyerapan tenaga kerja
8	Banten Melayani	Prioritas pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi

Selain itu, penyusunan dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 perlu mempertimbangkan pula keterkaitannya dengan delapan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan 17 program prioritas RPJMN Tahun 2024–2029 serta isu strategis nasional yang memiliki pertalian antara agenda pembangunan

nasional dengan agenda pembangunan di Provinsi Banten. Adapun delapan misi Asta Cita dirangkum dalam tabel di bawah.

Tabel 21. Delapan Misi Asta Cita

No	Asta Cita	Penjelasan
1	Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.
2	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional	Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.
3	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender	Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

No	Asta Cita	Penjelasan
5	Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi	Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
6	Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi	Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.
7	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.
8	Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 mengacu pada program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 serta delapan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur (PU). Tema prioritas riset dan inovasi Provinsi Banten harus mencerminkan respons terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti reformasi birokrasi, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan, serta sesuai dengan misi yang diangkat dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2025–2029.

Namun demikian, Provinsi Banten sebagai pemerintahan di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia, penyusunan RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, dan program-program prioritas pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN Tahun 2024–2029. Dalam hal ini, penentuan isu strategis daerah harus selaras dengan delapan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tabel 22 Permasalahan Utama Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029

No	Permasalahan Utama	Deskripsi Permasalahan Utama	Keterkaitan dengan Misi Asta Cita
1	Produktivitas ekonomi wilayah (PU4, PU5, PU7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM dengan prioritas:</li> <li>• Produktivitas ekonomi di sektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif seperti sektor kuliner, fashion, dan kriya terutama di UMKM;</li> <li>• Penyebaran kebermanfaatan ekonomi yang adil dan merata bagi Masyarakat;</li> <li>• Investasi yang merata antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan guna mengurangi ketimpangan; dan</li> <li>• Inisiasi program industri hijau, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 3: Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan</li> <li>• Misi Asta Cita 5: Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi</li> </ul>
2	Kemiskinan dan pengangguran (PU2, PU3, PU4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banten memprioritaskan pengurangan kemiskinan, pengangguran, perlindungan terhadap kelompok rentan, peningkatan kohesi sosial dengan prioritas:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 3: Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan</li> </ul>

No	Permasalahan Utama	Deskripsi Permasalahan Utama	Keterkaitan dengan Misi Asta Cita
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses pelayanan disabilitas dan lanjut usia;</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dan karakteristik komunitas; dan</li> <li>• Sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil pasar kerja, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi, serta perluasan akses informasi pasar kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 6: Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi</li> </ul>
3	Kualitas SDM dan daya saing daerah (PU2, PU3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas utama adalah peningkatan kualitas dan layanan SDM yang sehat, berpendidikan, dan kompetitif melalui program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi dengan prioritas:</li> <li>• Penguatan layanan pendidikan inklusif dan digitalisasi sekolah;</li> <li>• Penguatan layanan pendidikan vokasi dan akses terhadap pelatihan kerja;</li> <li>• Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan; dan</li> <li>• Pemerataan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender</li> </ul>
4	Infrastruktur daerah dan interkonektivitas pembangunan (PU1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antar-wilayah, serta infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 2: Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional</li> <li>• Misi Asta Cita 6:</li> </ul>

No	Permasalahan Utama	Deskripsi Permasalahan Utama	Keterkaitan dengan Misi Asta Cita
		<p>pendukung layanan publik dan logistik dengan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi;</li> <li>• Peningkatan layanan transportasi publik dan integrasi moda;</li> <li>• Pembangunan konektivitas digital;</li> <li>• Penyediaan akses air bersih, sanitasi, dan listrik bagi wilayah tertinggal; dan</li> <li>• Pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.</li> </ul>	<p>Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi</p>
5	<p>Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan (PU8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya untuk mendapatkan skor yang baik tetapi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif, dan efisien, serta kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat dengan prioritas:</li> <li>• Digitalisasi layanan publik melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>• Penguatan kinerja aparatur dan integrasi data lintas sektor; dan</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik melalui forum konsultasi, e-musrenbang, dan keterbukaan informasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM</li> <li>• Misi Asta Cita 7: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba</li> </ul>

No	Permasalahan Utama	Deskripsi Permasalahan Utama	Keterkaitan dengan Misi Asta Cita
6	Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana (PU1, PU6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran akan perubahan iklim dan risiko bencana menjadi bagian integral dari arah pembangunan ke depan dengan prioritas:</li> <li>• Pengelolaan sampah terpadu dan pengurangan emisi karbon;</li> <li>• Restorasi daerah aliran sungai (DAS), reboisasi, dan rehabilitasi pesisir; dan</li> <li>• Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi Asta Cita 8: Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama</li> </ul>

Berdasarkan analisis konten terhadap dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, terdapat enam tema prioritas riset dan inovasi Provinsi Banten yang menjadi fokus utama dalam perencanaan jangka menengah. Keenam tema prioritas ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam mewujudkan Banten yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keenam tema prioritas tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan struktural sekaligus mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pertama, *Produktivitas Ekonomi Wilayah* menjadi isu strategis utama, di mana pemerintah daerah menargetkan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM, termasuk sub-sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, dan kriya. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor ini serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata antara wilayah Banten Utara dan Selatan. Pemerintah juga mulai mendorong industrialisasi hijau melalui program efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai respon terhadap tantangan global seperti perubahan iklim. Isu ini merupakan penjabaran nyata dari program unggulan Banten Kuat (PU4), Banten Indah (PU5), dan Banten Ramah (PU7) serta berkorelasi dengan misi Asta Cita 3 (Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan) dan misi Asta Cita 5 (Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi). Upaya Provinsi Banten dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif, serta distribusi investasi yang merata antara wilayah utara dan selatan, sejalan dengan agenda hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah secara nasional.

Kedua, *Kemiskinan dan Pengangguran* masih menjadi permasalahan struktural yang harus segera diatasi. Provinsi Banten menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran dengan pendekatan berbasis wilayah serta karakteristik komunitas. Prioritas lainnya mencakup

peningkatan akses layanan bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia, serta penguatan sinergi antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan nyata dunia kerja, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Akses informasi pasar kerja juga diperluas sebagai bagian dari reformasi sistem ketenagakerjaan daerah.

Isu ini merupakan penjabaran nyata dari program unggulan Banten Sehat (PU2), Banten Cerdas (PU3), dan Banten Kuat (PU4) serta berkaitan dengan misi Asta Cita 6 (Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi) dan kembali bersinggungan dengan misi Asta Cita 3 (Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan). Strategi Banten untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah, meningkatkan layanan untuk kelompok rentan, dan memperluas akses terhadap informasi dan pelatihan kerja menunjukkan respons terhadap agenda pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara merata.

Ketiga, isu terkait *Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah* menjadi pijakan penting dalam visi pembangunan Banten. Pemerintah fokus pada peningkatan mutu pendidikan inklusif melalui digitalisasi sekolah, penguatan pendidikan vokasi, dan akses terhadap pelatihan kerja. Di sektor kesehatan, prioritas diarahkan pada peningkatan layanan dasar dan rujukan, serta pemerataan tenaga medis dan guru berkualitas ke seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan terluar.

Isu ini menjadi bagian dari pengembangan program unggulan Banten Sehat (PU2) dan Banten Cerdas (PU3) serta merupakan perwujudan dari misi Asta Cita 4 (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender). Program-program peningkatan pendidikan inklusif, pelatihan vokasi, layanan kesehatan, serta pemerataan tenaga pengajar dan kesehatan di Banten mendukung agenda nasional dalam membangun SDM unggul yang kompetitif dan berdaya saing global, termasuk perhatian terhadap kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Keempat, *Infrastruktur Daerah dan Interkonektivitas Pembangunan* menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Program prioritas meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, penguatan transportasi publik, integrasi moda, serta perluasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas digital. Selain itu, pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung terus didorong untuk meningkatkan investasi dan mobilitas regional.

Isu tersebut merupakan perwujudan dari program unggulan Banten Bagus (PU1) serta terkait dengan misi Asta Cita 2 (Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional), dalam dimensi kemandirian energi dan konektivitas wilayah, serta misi Asta Cita 6. Pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan digitalisasi wilayah tertinggal di Banten mencerminkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan serta penguatan ketahanan daerah.

Kelima, *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan* diorientasikan pada penguatan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Strategi ini diwujudkan melalui digitalisasi layanan berbasis SPBE, integrasi data antar-perangkat daerah, serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui forum konsultasi, musrenbang elektronik, dan keterbukaan informasi.

Isu ini merupakan penjabaran dari program unggulan Banten Melayani (PU8) dan secara langsung mencerminkan misi Asta Cita 1 (Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM) dan misi Asta Cita 7 (Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba). Upaya Banten dalam memperluas digitalisasi layanan publik, meningkatkan integritas aparatur, serta membuka ruang partisipasi publik mencerminkan agenda nasional untuk memperkuat tata kelola yang demokratis transparan, akuntabel, dan responsif dengan menjunjung tinggi hak masyarakat sebagai elemen penting dalam pembangunan di Provinsi Banten.

Keenam, *Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana* menjadi prioritas dalam rangka menghadapi krisis iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Pemerintah berfokus pada penguatan sistem peringatan dini, restorasi daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi pesisir, serta pengelolaan sampah terpadu, dan pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen menuju pembangunan hijau dan berketahanan iklim.

Isu tersebut merupakan perwujudan dari program unggulan Banten Bagus (PU1) dan Banten Makmur (PU6) serta selaras dengan misi Asta Cita 8 (Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama). Program seperti restorasi DAS, pengurangan emisi karbon, dan penguatan sistem mitigasi bencana yang diusung Pemerintah Provinsi Banten merupakan bagian dari respons terhadap tantangan perubahan iklim, serta kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial.

Keenam isu tersebut mencerminkan tantangan struktural pembangunan Banten yang saling terkait, antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, peningkatan kapasitas manusia, hingga keberlanjutan lingkungan, yang jika dikelola secara terintegrasi dapat menjadi fondasi bagi arah riset dan inovasi daerah lima tahun ke depan. Dalam konteks RIPJPID Provinsi Banten 2025–2030, seluruh isu strategis tersebut dapat dirajut dalam satu tema prioritas riset dan inovasi, yakni Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten.



Gambar 3 Prioritas Permasalahan Utama Daerah Provinsi Banten

Pada aspek produktivitas ekonomi wilayah, transformasi diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan daerah seperti perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan hasil, dan pariwisata melalui inovasi teknologi, diversifikasi produk, serta digitalisasi proses produksi dan pemasaran. Upaya ini diharapkan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperluas pemerataan manfaat pembangunan antara Banten Utara yang lebih industrial dengan Banten Selatan yang lebih berbasis sumber daya alam.

Dalam kaitannya dengan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, tema prioritas ini memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi. Melalui pengembangan UMKM, industri rumah tangga, dan wirausaha berbasis budaya lokal, ekonomi kreatif dapat menjadi instrumen untuk membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi diarahkan pada inovasi sosial, teknologi tepat guna, dan transformasi digital untuk mengatasi kemiskinan struktural dan memperkuat kohesi sosial.

Selanjutnya, permasalahan kualitas SDM dan daya saing daerah diintegrasikan dengan agenda penguatan kapasitas inovator, pelaku UMKM, dan tenaga kerja kreatif. Pendidikan vokasi, pelatihan wirausaha, dan literasi digital diarahkan agar sejalan dengan kebutuhan penguatan dan peningkatan ekonomi kreatif daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak sekadar peningkatan kapasitas individu, tetapi juga penciptaan pengetahuan yang mendukung inovasi berkelanjutan di sektor ekonomi lokal. Dengan demikian, ekosistem riset dan inovasi berfungsi ganda: memperkuat kapasitas manusia sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing di pasar global.

Permasalahan ketimpangan infrastruktur dan interkoneksi pembangunan juga menjadi elemen pendukung penting dalam tema ini. Pengembangan kawasan ekonomi memerlukan dukungan infrastruktur fisik dan digital yang memadai, mulai dari akses jalan, energi, jaringan internet,

hingga pusat-pusat logistik dan distribusi. Infrastruktur yang merata antar wilayah di Provinsi Banten menjadi prasyarat bagi integrasi rantai nilai antar sektor, dari produksi hingga pemasaran, sehingga mendorong efisiensi dan kolaborasi lintas wilayah. Dalam konteks ini, *innovation hub* dan *creative industry cluster* dapat menjadi simpul konektivitas antara riset, bisnis, dan masyarakat.

Permasalahan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan turut menjadi fondasi bagi keberhasilan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi. Reformasi birokrasi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga untuk membangun tata kelola riset dan inovasi daerah yang transparan, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Pemerintah daerah perlu berperan sebagai fasilitator ekosistem riset dan inovasi, bukan sekadar regulator, dengan mempermudah perizinan, menyediakan insentif, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pendekatan *governance for innovation* ini akan memastikan bahwa kebijakan riset dan inovasi benar-benar berpihak pada pelaku ekonomi kreatif dan mendorong lahirnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media (model *pentahelix*).

Terakhir, permasalahan terkait kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana diintegrasikan dalam tema prioritas ini melalui konsep *green creative economy*, yaitu pengembangan ekonomi kreatif yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Setiap proses produksi, inovasi teknologi, dan pengembangan kawasan diarahkan agar ramah lingkungan, efisien energi, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Penerapan prinsip ekonomi sirkular, penggunaan bahan baku lokal berkelanjutan, serta restorasi ekosistem dalam kawasan produksi ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

## 2.2. Kondisi Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini

### 2.2.1. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Dalam menghadapi era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, Provinsi Banten menunjukkan komitmen untuk memperkuat kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerahnya. Berbagai langkah strategis telah dan tengah dijalankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Meskipun masih menghadapi tantangan struktural, arah kebijakan riset dan inovasi daerah semakin menunjukkan pendekatan sistemik, kolaboratif, dan berbasis data. Terdapat enam elemen yang perlu dicermati dalam memetakan kondisi riset dan inovasi di Provinsi Banten, antara lain meliputi kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan keselarasan dengan perkembangan global.

#### *Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini*

Salah satu bentuk reformasi kebijakan yang menonjol adalah dorongan integrasi agenda riset ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti

RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan dokumen RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 yang menjadi upaya konkrit bagi pemerintah Provinsi Banten untuk mendorong kontribusi riset dan inovasi daerah dalam mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan birokratis sektoral menuju pendekatan berbasis pengetahuan dan *evidence-based policy making*. Pemerintah Provinsi Banten juga mulai membuka ruang kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, dan pelaku industri dalam pelaksanaan riset tematik daerah yang relevan dengan isu strategis seperti ketahanan pangan, kepariwisataan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan transformasi digital.

Provinsi Banten telah memulai langkah reformasi kebijakan riset dan inovasi melalui penerbitan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Pergub ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan peran pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi di sektor publik dan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Banten juga telah menghasilkan 19 *policy brief* yang menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Sementara, penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sudah dilakukan, namun data dan informasi belum terinventarisasi.

Namun, reformasi kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Banten masih menghadapi tantangan keterbatasan regulasi teknis serta koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Belum terdapat regulasi di daerah yang secara spesifik mengatur terkait riset dan inovasi di daerah dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah dan belum secara spesifik mengatur mengenai peran riset untuk mendorong inovasi maupun pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah secara umum. Selain itu, belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai dalam memanfaatkan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini menunjukkan perlunya agenda reformasi lanjutan berupa penguatan kerangka regulasi terkait riset dan inovasi di Provinsi Banten yang selaras dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Sumber daya manusia (SDM) periset merupakan pilar utama dalam membentuk ekosistem riset dan inovasi yang produktif di daerah. Di Provinsi Banten, tantangan besar terlihat dari masih rendahnya jumlah dan kapasitas periset yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan data terbaru, terdapat tujuh peneliti dan enam analis kebijakan yang aktif di lingkup Pemerintah Provinsi Banten, dengan seluruhnya memiliki kualifikasi magister (S2) atau doktoral (S3). Terdapat tiga periset yang sedang menempuh pendidikan lanjut dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan regenerasi dan pengembangan kapasitas intelektual. Dalam hal ini, kebutuhan akan periset yang mumpuni sangat mendesak, terutama dalam menghadapi kompleksitas isu pembangunan daerah seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, ekonomi digital, dan tata kelola publik yang inovatif.

Sementara itu, seluruh periset telah tercatat pernah/sedang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BRIN, perguruan tinggi, atau lembaga nasional dan internasional lainnya dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya upaya awal untuk peningkatan kompetensi, namun belum cukup masif dan terstruktur. Peningkatan kualitas SDM periset seharusnya dilakukan melalui strategi jangka panjang yang mencakup pemberian beasiswa pendidikan S2/S3, program magang atau fellowship di lembaga riset nasional, pelatihan teknis dan metodologi riset secara berkelanjutan, serta pembentukan komunitas epistemik lokal yang aktif berdiskusi dan berkolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem karier dan insentif yang menjanjikan bagi para ASN yang berperan sebagai periset, termasuk peluang publikasi, pelatihan luar negeri, dan penghargaan berbasis kinerja riset.

Lebih jauh, keberhasilan peningkatan kualitas SDM riset juga bergantung pada kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga riset swasta. Hal ini mengingat Provinsi Banten memiliki 102 perguruan tinggi dengan hampir 7.781 dosen dan peneliti (BPS, 2024), kolaborasi antara ASN periset dengan sivitas akademika perguruan tinggi lokal perlu diperkuat untuk menciptakan ruang sinergi dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Tanpa penguatan kualitas SDM periset, upaya pembangunan sistem inovasi daerah akan rentan bersifat seremonial dan tidak berdampak signifikan terhadap pengambilan kebijakan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan SDM periset harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam rencana pembangunan daerah ke depan.

Basis data riset dan inovasi merupakan aspek krusial dalam membangun sistem riset daerah yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Di Provinsi Banten, meskipun telah terdapat 33 kegiatan riset dalam lima tahun terakhir dan menghasilkan 58 artikel jurnal, 4 prosiding, serta 1 buku direktori, belum tersedia sistem perencanaan dan evaluasi yang dapat memastikan kegiatan riset tersebut berjalan secara terkoordinasi dan bebas dari duplikasi. Absennya mekanisme untuk mencegah tumpang tindih riset mengindikasikan lemahnya manajemen siklus riset, yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan keterputusan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output riset yang dihasilkan.

Selain itu, Provinsi Banten belum memiliki platform repositori digital yang secara khusus berfungsi menyimpan data primer, laporan akhir, dan produk pengetahuan dari setiap kegiatan riset yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketiadaan sistem dokumentasi dan repositori ini menyulitkan proses diseminasi hasil riset kepada pemangku kepentingan lintas sektor serta menghambat proses akumulasi pengetahuan yang seharusnya menjadi modal strategis dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dalam konteks transformasi digital dan tata kelola data nasional, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengembangkan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia dan sistem data riset dan inovasi nasional milik BRIN. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai bank data riset, tetapi juga sebagai alat perencanaan strategis untuk memetakan kebutuhan riset daerah, menghindari tumpang tindih tema penelitian, serta memastikan kesinambungan antar-hasil riset.

Di sisi lain, pembangunan basis data yang handal juga menuntut adanya standar metadata, keterbukaan akses informasi (open access), serta kebijakan pengelolaan data yang menjamin integritas, akurasi, dan keamanan informasi. Integrasi repositori dengan sistem perencanaan pembangunan daerah seperti SIPD dan e-Planning juga akan memperkuat konsistensi antara riset dan agenda pembangunan. Dengan sistem data riset yang kuat, Provinsi Banten akan lebih mampu melakukan refleksi kebijakan, mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dalam mengembangkan inovasi yang kontekstual dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Infrastruktur riset dan inovasi memegang peran vital dalam mendukung kegiatan penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Di Provinsi Banten, pengembangan infrastruktur riset masih berada pada tahap awal dan belum mencerminkan kesiapan sistemik untuk mendorong ekosistem inovasi yang kuat. Saat ini, fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas dan terfragmentasi. Sarana pendukung riset seperti laboratorium uji dan akses terhadap jurnal ilmiah internasional belum tersedia secara optimal di bawah koordinasi pemerintah daerah. Terdapat pengelolaan jurnal ilmiah berupa [ejournal.bantenprov.go.id](http://ejournal.bantenprov.go.id) (JKPD) yang telah terindeks sinta 5, perpustakaan daerah banten, dan perpustakaan online batupusaka. Meskipun penting, infrastruktur ini masih belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan penelitian multidisipliner yang kompleks dan lintas sektor.

Di sisi lain, dukungan terhadap inovasi sudah hadir dalam bentuk klinik inovasi dan inkubator bisnis yang merupakan langkah awal positif untuk memberikan ruang konsultasi dan pendampingan, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM. Namun, fasilitas inkubator bisnis yang dikelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum secara efektif terintegrasi dengan riset dan inovasi. Ketiadaan infrastruktur yang memadai berimplikasi langsung pada lambatnya proses hilirisasi hasil riset dan kurangnya minat generasi muda terhadap aktivitas ilmiah dan kewirausahaan berbasis teknologi.

Untuk itu, pengembangan infrastruktur riset di Banten perlu diarahkan secara strategis dan terintegrasi dengan potensi unggulan daerah. Misalnya, di Kota Cilegon yang merupakan kawasan industri berat, dapat dikembangkan Industrial Innovation Center yang fokus pada teknologi material dan energi terbarukan. Di kawasan Tangerang Raya yang memiliki basis industri kreatif dan pendidikan tinggi, pengembangan Techno Park atau Startup Incubator Hub berbasis kampus dapat menjadi pengungkit daya saing lokal. Skema pembangunan infrastruktur ini dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan sektor swasta melalui model kemitraan publik-swasta (PPP) atau dana filantropi riset.

Lebih jauh, pengembangan infrastruktur riset juga harus melibatkan transformasi digital dalam sistem layanan riset. Pemerintah Provinsi Banten perlu menyediakan fasilitas seperti langganan akses jurnal internasional, perangkat lunak riset (software statistik, bibliometrik, GIS, dsb.), layanan pengeditan ilmiah, dan platform kolaborasi daring antarperiset. Dengan tersedianya infrastruktur fisik dan digital yang mendukung seluruh rantai nilai penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga publikasi dan diseminasi, Provinsi Banten akan memiliki ekosistem riset dan

inovasi yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran yang memadai merupakan prasyarat fundamental dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Di Provinsi Banten, alokasi untuk anggaran riset dan inovasi dari APBD Provinsi Banten tahun 2024 tercatat sebesar ≈Rp3 miliar, atau <0,1% proporsi PDRB Provinsi Banten Tahun 2024, yakni sebesar Rp873,63 triliun (data dan informasi sumber pendanaan riset dan inovasi pihak lain tidak tersedia sehingga diasumsikan nol), atau <1% proporsi APBD Provinsi Banten Tahun 2024, yakni sebesar Rp12,36 triliun. Angka ini, meskipun menunjukkan komitmen awal pemerintah daerah, masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan aktual untuk mendanai riset-riset strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, seperti transformasi ekonomi, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlebih lagi, belum tercatat kontribusi pendanaan dari pihak eksternal seperti perguruan tinggi, industri, maupun lembaga donor, yang menunjukkan bahwa strategi pembiayaan riset belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kolaboratif dan multi-sumber.

Minimnya alokasi anggaran juga mencerminkan belum dijadikannya riset sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran riset minimal 1% dari PDB nasional. Di tingkat daerah, hal ini dapat diturunkan dalam bentuk alokasi minimal 1% dari total PDRB untuk kegiatan riset dan pengembangan inovasi. Pemerintah Provinsi Banten perlu menindaklanjuti amanat ini dengan menyusun kebijakan fiskal afirmatif, seperti menetapkan pagu anggaran litbang secara mandatori dalam dokumen RPJMD dan RKPD, serta memasukkan indikator kinerja riset dalam sistem evaluasi pembangunan.

Selain itu, mekanisme pendanaan riset dan inovasi di Provinsi Banten masih bersifat konvensional dan belum cukup adaptif terhadap kebutuhan jangka panjang dunia penelitian. Pendekatan berbasis tahunan (*single-year budgeting*) dan administrasi yang birokratis menghambat fleksibilitas kegiatan riset, yang pada dasarnya memerlukan proses iteratif dan rentang waktu yang tidak selalu bisa diprediksi. Oleh karena itu, perlu diterapkan mekanisme pembiayaan berbasis luaran (*output-based budgeting*) untuk mendukung agenda riset strategis yang berdampak luas. Pemerintah daerah juga dapat merancang dana kompetitif atau matching fund yang dapat diakses oleh akademisi, pelaku industri, dan organisasi masyarakat sipil melalui seleksi terbuka dengan standar ilmiah dan akuntabilitas yang tinggi.

Di sisi lain, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran juga perlu diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Evaluasi dampak dari setiap kegiatan riset yang didanai oleh APBD harus menjadi bagian dari siklus manajemen anggaran, agar investasi riset tidak berhenti pada publikasi semata, melainkan mampu dikonversi menjadi kebijakan yang lebih efektif, inovasi teknologi yang terpakai, atau peningkatan kapasitas kelembagaan. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pelaporan hasil riset yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, agar setiap dana publik yang digunakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan membuka ruang pendanaan kolaboratif, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memperluas ruang partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi, Provinsi Banten dapat memperkuat posisi riset dan inovasi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Penyediaan anggaran yang cukup dan terarah bukan hanya cerminan komitmen pemerintah terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan daerah di tengah dinamika nasional dan global yang semakin kompleks.

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan aspek krusial dalam ekosistem riset dan inovasi yang berfungsi melindungi hasil kreativitas dan invensi, sekaligus mendorong hilirisasi inovasi ke sektor industri dan pasar. Namun, di Provinsi Banten, isu perlindungan KI belum mendapat atensi. Berdasarkan data yang tersedia, hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang secara khusus mengatur tentang sistem perlindungan kekayaan intelektual di tingkat provinsi. Selain itu, belum tersedia layanan fasilitasi pendaftaran atau pendampingan hukum atas KI oleh pemerintah daerah, serta belum ada data produk unggulan lokal yang telah berhasil memperoleh perlindungan hukum dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan belum terbangunnya kesadaran kelembagaan maupun publik mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai aset strategis daerah.

Ketiadaan perlindungan KI berdampak langsung terhadap rendahnya minat pelaku riset dan inovasi untuk mematenkan atau mengomersialisasikan temuan mereka. Hasil-hasil riset cenderung berhenti pada tahap publikasi atau laporan internal, tanpa melalui proses pendaftaran hak paten, hak cipta, desain industri, atau indikasi geografis. Padahal, Banten memiliki potensi besar dalam hal produk inovasi berbasis lokal, seperti hasil riset sektor pertanian, produk kreatif UMKM, inovasi teknologi tepat guna, dan kekayaan budaya yang khas. Tanpa perlindungan KI, potensi ini rentan diklaim pihak luar atau tidak berkembang karena tidak memiliki kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Banten perlu membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang proaktif dan inklusif. Langkah awal dapat dimulai dengan penyusunan regulasi daerah berupa Pergub atau Perda tentang perlindungan dan pemanfaatan KI, termasuk pemberian insentif bagi inventor, pelaku UMKM, dan periset yang berhasil mendaftarkan KI mereka. Selain itu, pembentukan layanan IP Helpdesk atau Klinik Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai pusat konsultasi, pendampingan teknis, serta fasilitator pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat dibutuhkan. Layanan ini juga dapat menyediakan edukasi publik melalui seminar, lokakarya, dan kampanye literasi KI di lingkungan akademisi, pelajar, pelaku industri kreatif, dan komunitas adat.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten perlu menjalin kemitraan dengan Kemenkumham, perguruan tinggi, dan BRIN dalam memperkuat sistem pendukung perlindungan KI secara teknis maupun kelembagaan. Penguatan kapasitas ASN dan penyusunan panduan teknis terkait proses pendaftaran dan pemanfaatan KI akan menjadi pondasi penting. Tak kalah penting adalah pemberian insentif berupa hibah atau penghargaan bagi inovasi yang berhasil

dikomersialisasikan melalui perlindungan KI. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan hasil intelektual, Banten tidak hanya menjaga hak para inovator, tetapi juga menciptakan rantai nilai ekonomi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya lokal.

Dalam jangka panjang, perlindungan kekayaan intelektual juga akan memperkuat posisi Provinsi Banten dalam kompetisi global. Daerah yang mampu membangun portofolio KI yang kuat akan lebih siap menarik investasi berbasis teknologi, mengembangkan branding daerah, serta membangun ekonomi kreatif dan inovatif yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan kekayaan intelektual bukan sekadar agenda hukum dan administrasi, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan.

### *Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini*

Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Jawa, memiliki potensi besar dalam pengembangan riset dan inovasi daerah. Namun untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi daerah yang berdaya saing, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan daya dukung menjadi dua komponen utama yang harus ditangani secara sistematis. Saat ini, penguatan kelembagaan riset di Banten masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, meskipun terdapat sejumlah modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem yang lebih solid dan kolaboratif.

Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi merupakan pondasi utama dalam membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Di Provinsi Banten, tantangan utama terletak pada lemahnya peran kelembagaan pemerintah dalam mengoordinasikan dan mengarahkan agenda riset secara strategis dan terintegrasi. Saat ini, jumlah SDM periset yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya berjumlah tujuh orang, yang merupakan indikasi terbatasnya kapasitas struktural dalam fungsi litbang dan inovasi di birokrasi. Sementara itu, potensi besar justru tersebar di luar birokrasi, yakni di 102 perguruan tinggi yang ada di wilayah Banten dengan lebih dari 7.700 dosen dan peneliti. Namun, tanpa mekanisme kelembagaan yang efektif, potensi tersebut belum sepenuhnya dikonsolidasikan dalam satu sistem inovasi daerah yang kohesif.

Kelembagaan riset dan inovasi daerah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi formal seperti unit RIDA Bappeda, Bapperida, atau BRIDA, tetapi juga mencakup sistem tata kelola, kapasitas koordinasi lintas sektor, dan kemampuan mengelola sumber daya riset secara efisien. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat kelembagaan riset dengan cara membentuk BRIDA atau merevitalisasi unit RIDA Bappeda sebagai simpul koordinasi riset dan inovasi di daerah. RIDA dapat berperan sebagai katalisator yang menjembatani kebutuhan Perangkat Daerah dengan kapasitas ilmiah perguruan tinggi, mengelola database riset tematik, serta mengawal pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan juga harus mencakup penguatan peran Bappeda dalam mengintegrasikan hasil riset ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Upaya penguatan kelembagaan juga harus melibatkan pembangunan sistem kerja yang mendorong kolaborasi, baik antar-instansi pemerintah maupun dengan mitra eksternal. Kemitraan strategis dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset internasional harus diformalkan dan dijalankan secara sistematis, dengan target output yang jelas. Riset-riset bersama yang sudah dimulai dengan UGM, UI, ITB, dan UNTIRTA merupakan titik masuk yang penting, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan kelembagaan daerah dalam memfasilitasi, mengelola, dan menindaklanjuti kerja sama tersebut. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM kelembagaan, digitalisasi sistem riset, dan penyusunan regulasi internal yang mendukung manajemen riset berbasis kinerja menjadi langkah-langkah penting yang harus segera diwujudkan. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, Provinsi Banten dapat membangun sistem inovasi daerah yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu menghasilkan solusi lokal yang berdampak luas.

Daya dukung riset dan inovasi daerah mencakup keseluruhan faktor pendukung, baik fisik, kelembagaan, maupun sumber daya, yang memungkinkan riset tumbuh sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Di Provinsi Banten, daya dukung ini masih tergolong lemah dan belum terstruktur secara optimal. Meskipun telah terjalin 15 kerja sama riset dan inovasi dalam lima tahun terakhir dengan berbagai institusi nasional seperti BRIN, UPI, UGM, ITB, UNPAD, UNTIRTA, STIP SANTADARMA, ITI, UNM, UNSERA, UB, STIA BANTEN, UNIS, dan IPB, implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh sistem insentif, fasilitas pendampingan, atau kebijakan kolaboratif yang memadai. Belum tersedia skema insentif dari pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat, padahal sinergi lintas aktor merupakan jantung dari ekosistem riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan.

Ketiadaan dukungan konkret seperti pendanaan riset kompetitif, akses fasilitas uji coba teknologi, serta mekanisme adopsi hasil riset oleh perangkat daerah menyebabkan riset cenderung berhenti pada tahap dokumentasi atau pelaporan, tanpa melahirkan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, hasil riset daerah sering kali tidak dikaitkan secara langsung dengan kebutuhan pembangunan, karena lemahnya proses identifikasi permasalahan strategis yang memerlukan dukungan riset. Dalam hal ini, peningkatan daya dukung perlu dimulai dari penguatan fungsi Bappeda sebagai penghubung antara pelaku riset dan pengguna kebijakan, dengan didukung oleh perangkat sistem informasi riset yang memungkinkan pemetaan kebutuhan secara real time.

Langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain penyusunan kebijakan insentif berbasis kinerja riset, pembentukan grant system untuk pembiayaan kolaboratif riset prioritas, serta pembangunan forum riset tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga dapat mendorong pengembangan Living Lab atau Innovation Sandbox di sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, pendidikan, atau ekonomi kreatif, yang dapat menjadi ruang eksperimental bagi uji coba inovasi daerah. Selain itu, penting pula meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah pengguna hasil riset agar mereka mampu memformulasi kebutuhan riset secara jelas dan memanfaatkan hasilnya secara tepat guna.

Dengan daya dukung yang kuat, riset dan inovasi tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas pelengkap, melainkan sebagai instrumen utama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, mendorong efisiensi pelayanan publik, dan menciptakan solusi inovatif bagi tantangan lokal. Oleh karena itu, peningkatan daya dukung riset harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah jangka panjang yang mengintegrasikan pengetahuan sebagai kekuatan penggerak utama transformasi Banten menuju daerah yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

### *Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini*

Kemitraan riset dan inovasi menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun ekosistem pengetahuan yang dinamis dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah. Di Provinsi Banten, upaya untuk menguatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan strategis, baik dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, masyarakat, hingga pelaku industri, mulai menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi dalam hal efektivitas pemanfaatan hasil riset dan keterpaduan diseminasi serta difusi inovasi kepada pengguna akhir.

Penguatan kemitraan dengan target pengguna merupakan strategi penting dalam memastikan bahwa hasil riset dan inovasi tidak berhenti pada tataran akademis, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk menjawab permasalahan pembangunan. Di Provinsi Banten, inisiatif awal dalam membangun kemitraan telah diwujudkan melalui kerja sama antara Bappeda dengan setidaknya 11 perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi ini mencerminkan kesadaran awal bahwa pengambilan keputusan publik harus ditopang oleh kajian ilmiah dan data yang sah. Namun, kemitraan tersebut masih dominan di ruang birokrasi dan belum sepenuhnya menjangkau pemangku kepentingan non-pemerintah seperti pelaku industri, UMKM, BUMD, BUMDes, serta komunitas masyarakat sipil, padahal kelompok-kelompok ini justru berada di garis depan dalam pemanfaatan inovasi.

Minimnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam kemitraan riset menunjukkan adanya celah dalam integrasi antara pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh belum adanya sistem fasilitasi dan komunikasi yang menjembatani periset dan pengguna, baik dari sisi bahasa teknis yang digunakan, waktu pelaksanaan, maupun perbedaan logika kerja antara sektor akademik dan sektor produksi. Selain itu, belum tersedia skema insentif maupun platform kolaboratif yang memungkinkan pertukaran gagasan secara rutin antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Ke depan, penguatan kemitraan harus dilakukan melalui pendekatan multipihak yang melibatkan sektor publik, swasta, akademisi, masyarakat, dan media (*pentahelix*). Pemerintah Provinsi Banten perlu memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi atau innovation network berbasis isu-isu strategis daerah, seperti ketahanan pangan, pengelolaan sampah, transformasi

digital UMKM, dan ekonomi kreatif. Forum ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang riset berbasis permintaan (*demand-driven research*), serta mencocokkan kapasitas peneliti dengan potensi kolaborator. Dengan penguatan kemitraan yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata, riset dan inovasi daerah tidak hanya akan menghasilkan output akademik, tetapi juga bertransformasi menjadi solusi konkret yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Diseminasi hasil riset kepada target pengguna merupakan tahapan krusial dalam siklus riset dan inovasi, karena menentukan sejauh mana luaran penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata dalam kebijakan, layanan publik, maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Di Provinsi Banten, kegiatan riset yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah menghasilkan sejumlah luaran naskah kebijakan berupa 19 *policy brief* dan sudah didiseminasikan kepada perangkat daerah yang menjadi target pengguna. Namun demikian, mekanisme diseminasi hasil riset masih belum terstruktur dan belum berbasis sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya. Belum tersedia platform digital repositori resmi yang menampung hasil-hasil kajian dan riset daerah, sehingga distribusi informasi kepada pengguna, baik dari kalangan perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, masih sangat terbatas.

Ketiadaan strategi diseminasi yang sistemik menyebabkan banyak hasil riset berhenti sebagai dokumen internal atau laporan tertutup, tanpa melalui proses kurasi, penyederhanaan informasi (*knowledge translation*), atau pengemasan ulang dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan dan pengguna lapangan. Selain itu, belum terdapat kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang mewajibkan adanya pelaporan terbuka atau presentasi hasil riset kepada mitra pengguna, termasuk kepada perangkat daerah yang menjadi bagian dari agenda kajian. Kelemahan ini memperbesar risiko rendahnya adopsi hasil riset dalam proses pengambilan keputusan, bahkan ketika temuan riset sebenarnya relevan dan solutif terhadap persoalan daerah.

Untuk memperkuat proses diseminasi, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengembangkan sistem repositori digital berbasis web yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan diseminasi pengetahuan hasil riset daerah. Sistem ini harus dilengkapi dengan fitur pencarian tematik, ringkasan eksekutif (*executive summary*), dan tautan ke data mentah yang mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu, diseminasi juga dapat diperkuat melalui forum rutin seperti seminar kebijakan, diskusi lintas sektor, atau temu inovasi daerah, yang melibatkan periset dan target pengguna dalam ruang interaksi langsung. Dukungan terhadap media visual seperti infografik, video ringkas, dan podcast juga dapat menjadi sarana diseminasi yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh khalayak luas.

Difusi inovasi merupakan proses penyebaran dan adopsi ide, teknologi, atau praktik baru dari kalangan periset ke tangan pengguna nyata di lapangan, seperti pelaku UMKM, sektor publik, masyarakat, dan dunia usaha. Di Provinsi Banten, proses difusi inovasi masih menghadapi hambatan struktural yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat program

pembelajaran inovasi yang difasilitasi secara sistematis oleh pemerintah daerah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya. Tidak ada catatan mengenai jumlah UMKM atau pelaku industri lokal yang telah mengikuti pelatihan atau pendampingan inovasi, sehingga kesenjangan antara penghasil inovasi (periset) dan pengguna inovasi (pelaku usaha dan masyarakat) masih sangat lebar.

Minimnya fasilitasi difusi inovasi membuat banyak hasil riset dan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi tidak sampai ke tangan pengguna akhir. Akibatnya, potensi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor ekonomi lokal menjadi terhambat. Ketiadaan sistem inkubasi, laboratorium uji coba lapangan (*living labs*), serta ruang eksperimental di tingkat desa atau kawasan industri juga mempersempit jalur masuk inovasi ke dalam praktik nyata pembangunan. Dalam konteks UMKM, inovasi seharusnya menjadi pengungkit transformasi digital, efisiensi produksi, maupun diversifikasi produk, namun tanpa fasilitasi adopsi dan pendampingan, manfaat tersebut sulit diwujudkan secara luas.

Untuk mendorong peningkatan difusi inovasi, Pemerintah Provinsi Banten perlu membangun sistem pembelajaran berbasis kolaborasi multipihak. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan program pelatihan inovasi yang melibatkan periset, pelaku usaha, dan penyuluh lapangan secara simultan, dengan pendekatan praktik langsung di lapangan. Pemerintah juga dapat membentuk Innovation Pilot Area di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, pengelolaan sampah, dan ekonomi kreatif, di mana inovasi diuji dan disesuaikan secara kontekstual sebelum direplikasi ke daerah lain. Penguatan peran unit RIDA Bappeda dalam mengelola *innovation pipeline* juga penting agar proses pengembangan hingga difusi inovasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

#### *Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini*

Penguatan ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah tidak cukup hanya dengan ketersediaan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga harus disertai dengan upaya membangun budaya riset yang hidup dan berkelanjutan. Di Provinsi Banten, pengarusutamaan riset dan inovasi ke dalam kesadaran publik masih merupakan tantangan tersendiri, terutama karena minimnya program promosi, penghargaan, dan dukungan sistemik terhadap talenta dan entitas inovatif. Tiga aspek penting, yakni promosi dan kampanye, apresiasi terhadap prestasi, serta dukungan terhadap perusahaan pemula berbasis riset, belum berkembang optimal meskipun perannya sangat strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam riset dan inovasi.

Promosi dan kampanye riset serta inovasi merupakan elemen strategis dalam membangun budaya ilmiah dan semangat berinovasi yang berakar kuat di tengah masyarakat. Di Provinsi Banten, upaya ke arah tersebut masih sangat terbatas. Belum tersedia program sistematis yang dirancang untuk meningkatkan literasi riset dan inovasi di kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, maupun masyarakat umum. Misalnya, kurikulum muatan lokal di tingkat SMA dan SMK belum memuat mata ajar tentang karya tulis ilmiah, metodologi penelitian, ataupun kewirausahaan inovatif, padahal ini merupakan pondasi penting dalam membentuk pola pikir kritis dan solutif sejak usia dini. Di sisi

lain, ketiadaan platform promosi seperti forum ilmiah publik, festival inovasi, atau kampanye multimedia yang mengenalkan pentingnya riset dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa riset masih dipandang sebagai domain eksklusif akademisi, bukan sebagai bagian dari gerakan sosial yang inklusif dan transformatif.

Minimnya kampanye juga berdampak pada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap peran sains dan teknologi dalam memecahkan persoalan lokal, seperti pengelolaan sampah, adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga efisiensi layanan publik. Akibatnya, adopsi terhadap inovasi hasil riset berjalan lambat dan partisipasi masyarakat dalam proses inovatif pun sangat terbatas. Oleh karena itu, promosi riset dan inovasi perlu dirancang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Banten dapat menginisiasi program “Pekan Riset dan Inovasi Banten”, menyelenggarakan lokakarya tematik lintas sektor, atau melibatkan media lokal dan digital untuk menyebarkan cerita sukses periset dan inovator lokal. Keterlibatan sekolah, komunitas kreatif, dan pelaku industri juga penting untuk menjembatani ruang komunikasi antara pengetahuan akademik dan kebutuhan sosial. Dengan memperluas ruang edukasi dan promosi publik yang menarik, riset dan inovasi dapat dibumikan menjadi bagian dari gaya hidup kolektif yang produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Apresiasi terhadap prestasi riset dan inovasi merupakan katalis penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan kompetitif. Di Provinsi Banten, Sudah ada skema penghargaan atau insentif yang secara khusus ditujukan kepada individu maupun institusi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat lokal. Sudah ada pemberian insentif kepada periset yang mempublikasikan karya ilmiah di jurnal bereputasi, namun belum tersistemasi secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi. Sudah ada kompetisi Karya Ilmiah Remaja (KIR) untuk tingkat SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Sudah ada ajang penghargaan atau festival inovasi yang melibatkan masyarakat luas. Hal ini tentu mendorong potensi inovatif, baik dari kalangan pelajar, dosen, ASN, pelaku UMKM, hingga inventor independen, untuk dapat terangkat ke permukaan. Namun demikian, diperlukan penguatan konsep dan strategi pengelolaan yang kolaboratif agar ajang ini dapat benar-benar menjadi ruang apresiasi yang layak. Hal ini berimplikasi pada menguatnya motivasi individu untuk menekuni aktivitas riset dan inovasi secara berkelanjutan, serta bertambahnya figur-figur inspiratif lokal yang dapat menjadi panutan generasi muda.

Dalam hal ini, pemberian apresiasi bukan hanya soal insentif finansial, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya penghargaan terhadap kerja intelektual dan kreativitas sebagai modal sosial pembangunan. Apresiasi yang dirancang secara konsisten dan inklusif dapat memicu kompetisi sehat, meningkatkan reputasi daerah dalam bidang iptek, serta mendorong replikasi dan penguatan jejaring inovasi. Pemerintah Provinsi Banten perlu mulai merancang mekanisme penghargaan tahunan, seperti Banten Innovation Award, yang diberikan kepada periset muda, inovator sektor publik,

pengembang teknologi tepat guna, hingga pelaku UMKM berbasis riset. Ajang ini juga dapat disinergikan dengan program pembinaan lanjutan seperti inkubasi, bantuan perlindungan kekayaan intelektual, atau promosi hasil inovasi ke tingkat nasional.

Lebih jauh, penting pula untuk melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas dalam menyelenggarakan kompetisi karya ilmiah, lomba inovasi daerah, dan festival edukatif berbasis proyek riset. Dengan menciptakan ruang-ruang apresiasi yang beragam dan berjenjang, pemerintah tidak hanya mengangkat prestasi, tetapi juga membangun ekosistem pembelajar yang progresif dan partisipatif. Dalam jangka panjang, kebijakan apresiasi ini akan memperkuat daya saing daerah, memperluas basis pelaku inovasi, dan menumbuhkan identitas daerah sebagai kawasan yang menghargai kecerdasan, kreativitas, dan kontribusi nyata warganya terhadap kemajuan bersama.

Perusahaan pemula atau *startup* berbasis teknologi merupakan penggerak penting dalam mendorong hilirisasi hasil riset menjadi produk dan layanan yang bernilai ekonomi. Namun di Provinsi Banten, pengembangan perusahaan rintisan semacam ini masih sangat minim dan belum menjadi bagian dari strategi inovasi daerah yang terstruktur. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat program atau fasilitas inkubasi bisnis berbasis riset yang secara langsung difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten, baik melalui perangkat daerah, kemitraan dengan perguruan tinggi, maupun kerja sama dengan BRIN atau lembaga riset nasional lainnya. Tidak ada catatan tentang jumlah *startup* lokal yang telah mendapatkan pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi, dukungan akses pembiayaan, maupun perlindungan kekayaan intelektual atas produk hasil riset mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur komersialisasi inovasi, yang seharusnya menjadi jembatan antara laboratorium dan pasar, belum dibangun secara sistemik di tingkat daerah.

Padahal, Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk mengembangkan perusahaan pemula berbasis riset, mengingat keberadaan lebih dari 100 perguruan tinggi dan ribuan dosen-peneliti, serta kekuatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri kimia, manufaktur, dan ekonomi kreatif. Potensi ini seharusnya dapat dimobilisasi menjadi motor ekonomi baru melalui dukungan inkubasi yang komprehensif, mulai dari penguatan model bisnis, validasi teknologi, akses ke pendanaan awal, hingga pendampingan hukum dan paten. Tanpa dukungan tersebut, banyak hasil riset berakhir sebagai prototipe atau laporan teknis yang tidak pernah masuk ke pasar, dan potensi ekonomi berbasis pengetahuan pun tidak tergarap maksimal.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun kebijakan afirmatif untuk mendukung lahirnya dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis riset. Langkah strategis bisa dimulai dengan membentuk Innovation and Business Incubator berbasis kemitraan antara pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta. Inkubator ini dapat berfungsi sebagai ruang kolaborasi untuk menginkubasi ide, mempertemukan periset dan calon investor, serta mengakselerasi produk riset agar siap memasuki pasar. Program seperti pelatihan intensif (*bootcamp*), kompetisi inovasi, dan skema hibah awal (*seed fund*) bisa dijalankan untuk memfasilitasi lahirnya startup berbasis riset.

Penguatan ekosistem startup juga perlu didukung oleh jaringan pasar lokal, keterlibatan BUMD atau koperasi daerah sebagai mitra distribusi, serta

perlindungan kekayaan intelektual untuk menjaga keunggulan kompetitif inovasi lokal. Dengan mendukung pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi, Provinsi Banten tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan inklusif, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai pusat inovasi regional yang mampu menciptakan nilai tambah dari aset pengetahuan lokal.

#### *Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini*

Mewujudkan sistem riset dan inovasi yang efektif di tingkat daerah membutuhkan keterpaduan antar-elemen yang menyeluruh, mulai dari integrasi data dan informasi riset dan inovasi daerah hingga koordinasi lintas pemerintahan. Provinsi Banten telah menunjukkan langkah awal dalam membangun pondasi tersebut, namun masih menghadapi tantangan dalam memastikan sistem yang terkoordinasi dan mampu menjawab dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat secara adaptif.

Keterpaduan data dan informasi riset dan inovasi merupakan landasan krusial bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*). Di Provinsi Banten, beberapa upaya awal telah dilakukan untuk menyusun prioritas riset berdasarkan isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD serta kajian produk unggulan daerah. Informasi tersebut telah dimanfaatkan untuk mengarahkan fokus kajian riset agar selaras dengan kebutuhan kebijakan sektoral dan pengembangan daya saing ekonomi daerah. Namun, sistem keterpaduan data ini masih bersifat manual, sektoral, dan belum dikembangkan dalam bentuk digital terpadu yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan secara *real-time*. Ketiadaan platform repositori data riset menyebabkan lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, serta tingginya risiko duplikasi tema riset antara pemerintah dan mitra eksternal.

Belum tersedianya mekanisme sistematis untuk mengintegrasikan data hasil riset, data kebutuhan kebijakan, serta data temuan lapangan dari perangkat daerah membuat siklus riset belum efektif dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola modern, Provinsi Banten seharusnya mengembangkan sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan perencanaan riset, pelaksanaan, pelaporan, serta diseminasi hasil. Sistem ini idealnya dilengkapi dengan fitur metadata, pemetaan tematik, dan *dashboard* visualisasi yang bisa digunakan oleh perangkat daerah, akademisi, serta masyarakat umum sebagai rujukan bersama. Dengan sistem semacam itu, sinergi lintas sektor akan lebih mudah dibangun, efisiensi anggaran dapat ditingkatkan, dan kolaborasi riset menjadi lebih terarah.

Selain itu, keterpaduan data riset juga harus dihubungkan dengan mekanisme penganggaran dan pengawasan kinerja pembangunan, agar hasil riset tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga menjadi dasar perubahan atau inovasi dalam program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *knowledge to policy*, di mana pengetahuan yang terkonsolidasi secara sistematis menjadi basis dari seluruh tahapan perencanaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data riset bukan hanya soal membangun sistem teknologi informasi, melainkan juga mencakup pembentukan budaya berbagi data,

peningkatan kapasitas SDM pengelola data, dan penataan regulasi yang mendorong keterbukaan serta interoperabilitas antarinstansi. Dengan keterpaduan data yang solid, Provinsi Banten akan mampu menjadikan riset dan inovasi sebagai instrumen utama dalam mencapai pembangunan yang adaptif, akuntabel, dan berdampak luas.

Koordinasi riset dan inovasi lintas pemerintahan juga memainkan peran kunci untuk menciptakan tata kelola riset yang efisien, sinergis, dan berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Di Provinsi Banten, upaya koordinasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah serta Forum Kelitbangan yang dilaksanakan setiap tahun. Forum ini menjadi ruang dialog antara Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan prioritas riset dan agenda pembangunan. Namun, mekanisme koordinasi ini masih bersifat forumatif dan belum sepenuhnya menjembatani kebutuhan integrasi substansial dalam penyusunan agenda riset, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan penelitian secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Kelemahan koordinasi tercermin dari belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan riset dan inovasi. Kegiatan riset masih banyak berjalan secara sektoral dan sporadis, tanpa rujukan tematik yang disusun bersama secara terencana. Selain itu, belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi lintas level pemerintahan yang dapat mengukur sejauh mana kolaborasi riset telah menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur, baik dalam bentuk kebijakan, inovasi layanan, maupun solusi atas permasalahan pembangunan. Padahal, koordinasi vertikal (provinsi-pusat) dan horizontal (antar-perangkat daerah serta antar-kabupaten/kota) sangat penting untuk mencegah duplikasi kegiatan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan mempercepat replikasi inovasi yang terbukti berhasil.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat mekanisme koordinasi dalam penyusunan peta jalan riset dan inovasi bersama yang disepakati oleh seluruh level pemerintahan dan menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Di samping itu, pengembangan *clearing house* riset di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai pusat sinkronisasi proposal, pemetaan kebutuhan, serta fasilitasi pendanaan bersama (*co-funding*) dapat menjadi langkah konkret untuk menguatkan kolaborasi lintas pemerintah. Perlu juga dibangun sistem berbasis digital untuk pertukaran informasi riset antarwilayah dan antarinstansi, sehingga koordinasi tidak lagi bergantung pada pertemuan tatap muka yang bersifat insidental.

#### *Elemen 6: Keselarasan dengan Perkembangan Global Saat Ini*

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis energi, disrupsi teknologi, dan transformasi sosial global, daerah dituntut untuk tidak hanya fokus pada isu lokal, tetapi juga mampu menyelaraskan kebijakan riset dan inovasinya dengan arah kebijakan nasional dan dinamika global. Di Provinsi Banten, penyelarasan ini masih berada pada tahapan awal dan perlu diperkuat secara lebih sistemik, baik dalam aspek peningkatan kepedulian terhadap perkembangan isu riset dan

inovasi maupun peningkatan peran aktif masyarakat dalam merespons isu riset dan inovasi.

Peningkatan kepedulian terhadap isu riset dan inovasi merupakan prasyarat penting untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Di Provinsi Banten, kesadaran ini mulai tumbuh, namun masih terbatas pada tataran administratif dan belum menyentuh aspek kultural serta kelembagaan secara menyeluruh. Saat ini, satu-satunya praktik yang menunjukkan perhatian terhadap integritas ilmiah adalah pelaksanaan *blind peer review* serta pemeriksaan plagiasi terhadap naskah jurnal. Meskipun ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, upaya tersebut masih belum cukup untuk membentuk ekosistem riset yang berkualitas, etis, dan berorientasi pada isu-isu nasional maupun global.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten selalu menyelenggarakan seminar internal terhadap proposal riset, hasil riset, maupun naskah kebijakan untuk seluruh kegiatan dengan mengundang penguji dari eksternal berupa BRIN, perguruan tinggi, maupun lembaga riset lainnya yang tidak terafiliasi dengan Pemerintah Provinsi Banten maupun tim yang terlibat dalam kegiatan. Hal ini tertuang dalam SOP di Provinsi Banten. Namun demikian hingga kini, Provinsi Banten belum memiliki kode etik ilmiah daerah yang secara khusus mengatur prinsip, standar, dan tata laku pelaksanaan riset sesuai dengan standar yang diakui secara global. Ketiadaan pedoman ini membuat proses riset rawan terhadap bias metodologis, konflik kepentingan, dan rendahnya akuntabilitas hasil penelitian.

Selain itu, rendahnya kampanye publik tentang pentingnya riset dan inovasi membuat kesadaran aparatur pemerintah, dunia pendidikan, maupun masyarakat umum terhadap isu-isu strategis, seperti perubahan iklim, energi bersih, ketahanan pangan, atau disrupsi digital, masih sangat terbatas. Riset belum diposisikan sebagai instrumen utama untuk memahami dan merespons tantangan pembangunan, melainkan masih dianggap sebagai tugas teknis yang terpisah dari arus utama kebijakan. Padahal, dalam konteks global, tren riset telah bergerak ke arah yang lebih lintas-disiplin, partisipatif, dan berorientasi solusi, sehingga keterlambatan dalam membangun kesadaran akan isu dapat membuat daerah kehilangan momentum dan tertinggal dalam kompetisi inovasi.

Oleh karena itu, peningkatan kepedulian terhadap isu riset dan inovasi di Banten harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi etik riset daerah yang tidak hanya mengatur norma prosedural, tetapi juga memperkuat integritas, keterbukaan, dan relevansi sosial dari setiap kegiatan riset sesuai dengan standar yang diakui secara global. Selain itu, perlu dibangun ekosistem edukasi publik melalui seminar, pelatihan ASN, kampanye media, dan integrasi tema-tema riset global dalam kurikulum sekolah dan kegiatan kepramukaan. Kesadaran terhadap pentingnya riset bukan hanya soal memahami konsep, tetapi juga soal menanamkan nilai-nilai ilmiah seperti skeptisisme kritis, rasa ingin tahu, dan keberanian mengevaluasi status quo. Dengan meningkatkan kepedulian terhadap isu riset dan inovasi, Provinsi Banten dapat menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama

dalam membangun daerah yang tangguh, progresif, dan berpandangan jauh ke depan.

Peran masyarakat dalam riset dan inovasi tidak hanya sebagai penerima hasil, tetapi juga sebagai penghasil pengetahuan, mitra kolaboratif, dan aktor kunci dalam adopsi serta difusi inovasi di tingkat lokal. Namun, di Provinsi Banten, peran masyarakat dalam ekosistem riset dan inovasi masih sangat terbatas. Hingga kini belum terdapat data resmi mengenai keberadaan lembaga riset non-pemerintah maupun non-perguruan tinggi yang aktif di wilayah ini. Selain itu, belum tersedia platform dialog, forum, atau lokakarya yang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku riset non-formal seperti komunitas teknologi, kelompok masyarakat adat, pegiat UMKM, koperasi inovatif, atau organisasi masyarakat sipil. Ketidakterlibatan masyarakat ini menjadi indikasi lemahnya pendekatan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan riset, padahal banyak solusi lokal yang potensial berasal dari pengalaman masyarakat dalam mengelola sumber daya, teknologi sederhana, maupun kearifan lokal yang berbasis inovasi sosial.

Minimnya ruang partisipatif juga menghambat munculnya pendekatan *citizen science*, yakni pelibatan warga secara aktif dalam proses pengumpulan data, pengamatan lapangan, dan penyusunan solusi berbasis bukti. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat memperkaya sudut pandang ilmiah dan memperkuat kontekstualitas riset sehingga lebih relevan dan berdampak langsung pada perbaikan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam isu perubahan iklim atau pengelolaan sampah, peran warga sangat penting dalam menyumbang data lingkungan, menguji teknologi tepat guna, atau memberi masukan terhadap kebijakan berbasis kebutuhan riil. Tanpa keterlibatan ini, hasil riset rawan bersifat elitis, terputus dari realitas lokal, dan tidak terimplementasi secara efektif.

Untuk mendorong peningkatan peran masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten perlu membangun infrastruktur kolaboratif yang membuka akses masyarakat terhadap kegiatan riset dan inovasi. Ini dapat berupa pembentukan forum riset warga, pendanaan kecil untuk riset komunitas, pelatihan metodologi riset partisipatif, hingga dukungan terhadap media warga yang mendokumentasikan inovasi lokal. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM untuk menyelenggarakan hackathon, laboratorium hidup (*living lab*), atau kompetisi inovasi berbasis komunitas yang menjangkau ide-ide dari bawah. Lebih dari sekadar keterlibatan teknis, pendekatan ini akan memperkuat kesadaran kolektif bahwa pengetahuan dan inovasi adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama.

### 2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Banten saat ini menunjukkan dinamika yang terus berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung pengembangan PUD secara optimal. Secara umum, potensi riset dan inovasi telah tumbuh di berbagai sektor, baik di perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem yang sinergis dan berorientasi pada kebutuhan daerah.

Enam elemen utama ekosistem riset dan inovasi, yaitu kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, kemitraan riset dan inovasi, budaya riset dan inovasi, keterpaduan riset dan inovasi, dan penyelarasan dengan perkembangan global, masih menunjukkan tingkat perkembangan yang beragam dan memerlukan penguatan berkelanjutan agar mampu mendukung penciptaan nilai tambah PUD untuk mendorong peningkatan daya saing Provinsi Banten. Hasil identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten saat ini dalam pengembangan PUD dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 23 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten Saat Ini dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>		
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan daerah belum mengakomodir pengembangan riset dan inovasi, serta belum terintegrasi dalam kerangka ekonomi kreatif. Insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku riset dan inovasi belum diarahkan pada pengembangan PUD di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Diperlukan kebijakan khusus yang menjadikan PUD Ekonomi Kreatif sebagai prioritas lintas sektor berbasis inovasi.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data riset dan inovasi masih tersebar di berbagai dinas dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang memuat informasi lintas sektor. Data produksi, pasar, dan pelaku ekonomi kreatif belum dikembangkan menjadi basis pengetahuan daerah. Diperlukan <i>Creative Innovation Database</i> yang menghubungkan riset, produk unggulan, dan pelaku usaha ekonomi kreatif di seluruh Banten.
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Infrastruktur riset masih terbatas, baik laboratorium, pusat inovasi, maupun fasilitas pelatihan. Belum ada <i>Creative Innovation Hub</i> yang menjadi wadah riset

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>		
		lintas sektor. Pusat riset tematik untuk perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata belum terhubung. Penguatan infrastruktur perlu diarahkan pada <i>creative labs</i> dan <i>maker space</i> untuk mendukung inovasi PUD Ekonomi Kreatif.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset daerah masih kecil dan tidak konsisten. Skema pendanaan masih terbagi per sektor, tanpa mekanisme pendanaan kolaboratif lintas sektor untuk ekonomi kreatif. Belum ada matching fund antara pemerintah, industri, dan lembaga riset yang berfokus pada hilirisasi produk unggulan daerah.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih rendah di seluruh sektor, baik untuk produk di hulu hingga hilir maupun inovasi teknologi. Proses pendaftaran merek dan indikasi geografis masih belum optimal. Diperlukan pusat fasilitasi layanan HKI daerah berbasis ekonomi kreatif untuk memfasilitasi merek, desain, dan inovasi lokal secara terpadu.
<b>2</b>	<b>Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi</b>	
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi lintas lembaga masih bersifat informal dan belum menghasilkan inovasi nyata lintas sektor. Bappeda, dinas teknis, dan perguruan tinggi belum memiliki mekanisme kolaborasi permanen untuk riset berbasis kebutuhan ekonomi kreatif. Diperlukan forum <i>Creative Innovation Council</i> yang menyinergikan riset dan pengembangan industri kreatif.
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas riset seperti laboratorium mutu, pusat pelatihan, dan kebun percobaan belum diarahkan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif. Akses pelaku UMKM terhadap fasilitas inovasi seperti inkubator bisnis masih terbatas. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) masih belum terintegrasi dengan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>		
		riset dan inovasi. Pengembangan sarana <i>shared facility</i> serta penguatan PLUT menjadi kebutuhan mendesak.
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>	
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan antar peneliti, pelaku usaha, dan komunitas kreatif masih bersifat sporadis dan tidak berorientasi pada kolaborasi jangka panjang. Perlu dibangun model kemitraan inovatif yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif sebagai <i>co-creator</i> dalam proses riset dan komersialisasi produk.
B	Peningkatan difusi inovasi	Difusi inovasi masih bergantung pada penyuluhan konvensional dan pameran tematik, tanpa dukungan platform digital yang berkelanjutan. Diperlukan platform digital sebagai kanal daring untuk menyebarkan informasi mengenai keberhasilan inovasi industri ekonomi kreatif, hasil riset, dan peluang kemitraan lintas sektor. Kanal tersebut harus dapat mudah diakses oleh masyarakat luas.
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Hasil riset dari berbagai sektor belum dikemas dalam format yang mudah dipahami oleh pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan promosi inovasi daerah seperti pameran, festival, dan forum riset belum terintegrasi dalam satu agenda tahunan ekonomi kreatif, sehingga perlu direncanakan.
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>	
A	Promosi dan kampanye inovasi	Budaya inovasi belum melekat di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan festival seperti Festival Kopi Banten, Festival Bandeng, dan Banten Lama Heritage Week lebih menonjolkan sisi hiburan daripada inovasi. Diperlukan kampanye inovasi terpadu dengan pesan edukatif yang menonjolkan kolaborasi riset, inovasi teknologi, dan branding produk unggulan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>		
		dan budaya lokal untuk dapat dijual ke pasar global.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan daerah masih menitikberatkan pada skala usaha dan omzet, bukan kontribusi dalam inovasi produk, model bisnis, atau keberlanjutan. Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maupun Lomba Cipta Inovasi belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Perlu sistem apresiasi prestasi inovasi seperti <i>Banten Innovation Award for Creative Economy</i> .
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan rintisan (startup) di Banten masih didominasi bidang perdagangan dan pemasaran, belum banyak yang berbasis teknologi riset. Inkubator bisnis untuk industri ekonomi kreatif masih minim. Diperlukan inkubator bisnis yang menghubungkan riset, teknologi digital, dan model bisnis kreatif.
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kearifan lokal seperti teknik pengolahan kopi, fermentasi bandeng, olahan daging kambing khas Banten, dan narasi budaya Banten Lama belum terdokumentasi secara sistematis. Diperlukan program <i>Creative Knowledge Bank</i> untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam inovasi modern.
5	<b>Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>	
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Agenda riset daerah masih terfragmentasi dan reaktif terhadap program nasional. Belum ada prakarsa pengembangan riset dan inovasi ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset pangan, budaya, dan pariwisata. Diperlukan pengembangan PUD Ekonomi Kreatif berbasis dukungan ekosistem riset dan inovasi yang terarah.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>		
B	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kluster inovasi PUD Ekonomi Kreatif masih belum berkembang dan masih terfragmentasi. Diperlukan <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menghubungkan riset, produksi, teknologi, dan branding serta promosi PUD Ekonomi Kreatif (perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata).
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal. Banyak inisiatif nasional (Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemendag) yang belum diadaptasi oleh perangkat daerah sesuai kebutuhan lokal. Diperlukan <i>policy alignment</i> agar ekonomi kreatif menjadi agenda bersama lintas level pemerintahan.
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global	
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Kesadaran terhadap tren global seperti ekonomi hijau, digitalisasi, dan keberlanjutan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif masih terbatas. Perlu pengarusutamaan <i>green creative economy</i> dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah.
B	Penguatan kerjasama internasional	Keterlibatan lembaga riset dan pelaku ekonomi kreatif dalam jejaring internasional masih rendah. Perlu pengembangan kerja sama riset dan perdagangan dengan lembaga global seperti UNESCO, UNDP, dan ILO untuk memperluas jejaring dan transfer teknologi.

### 2.2.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Saat Ini dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Banten saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam perannya sebagai instrumen penyelesaian permasalahan utama daerah. Peran riset dan inovasi belum sepenuhnya optimal dalam menjawab enam permasalahan utama yang meliputi

produktivitas ekonomi wilayah, kemiskinan dan pengangguran, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan konektivitas, tata kelola pemerintahan, serta kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Upaya penguatan keenam isu tersebut diarahkan dalam satu koridor besar yang berorientasi pada Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah. Tema prioritas tersebut menempatkan riset dan inovasi tidak hanya sebagai kegiatan akademik, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membangun transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdaya saing dengan orientasi pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan dan interkonektivitas antar wilayah, serta percepatan penyelesaian masalah lingkungan untuk mendukung daya saing Provinsi Banten. Hasil identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten saat ini dalam penyelesaian permasalahan utama daerah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 24 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten Saat Ini dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>		
1	<b>Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi</b>	
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi daerah belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menempatkan riset dan inovasi sebagai instrumen utama penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data riset dan inovasi masih tersebar di berbagai perangkat daerah dan belum diintegrasikan dalam satu sistem pengetahuan daerah. Keterbatasan interoperabilitas data menyebabkan hasil riset tidak termanfaatkan optimal untuk perencanaan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ).
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Infrastruktur riset seperti laboratorium, <i>innovation hub</i> , dan pusat data riset masih minim dan tersebar. Belum ada pusat inovasi terpadu yang menghubungkan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>		
		riset sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan daya saing daerah.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran daerah untuk riset dan inovasi masih rendah, belum mencapai proporsi ideal terhadap APBD, serta belum menerapkan skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan dan pemanfaatan HKI masih lemah, baik di sektor ekonomi kreatif, inovasi sosial, maupun teknologi ramah lingkungan. Banyak hasil riset yang belum didaftarkan, dan kesadaran pelaku inovasi terhadap nilai ekonomi HKI masih rendah.
2	<b>Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi</b>	
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat masih bersifat insidental. Belum terbentuk forum atau jejaring inovasi daerah yang mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana riset yang ada masih terbatas dan belum relevan dengan kebutuhan pembangunan lintas sektor. Fasilitas riset untuk peningkatan produktivitas ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana belum terkoordinasi secara sistemik untuk mendorong transformasi.
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>	
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan inovasi masih lemah karena minimnya mekanisme kolaborasi antar peneliti, dunia usaha, dan lembaga

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>		
		masyarakat. Belum ada platform kolaborasi yang menyatukan riset ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan.
B	Peningkatan difusi inovasi	Diseminasi hasil riset masih terbatas pada forum akademik dan belum diadopsi oleh dunia usaha, masyarakat, atau lembaga pemerintahan. Potensi riset dan inovasi belum dimanfaatkan secara luas untuk peningkatan produktivitas ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Praktik baik dari hasil riset daerah belum terdokumentasi dan disebarluaskan secara sistematis. Kegiatan seperti <i>innovation fair</i> dan forum riset daerah perlu diagendakan secara rutin untuk memastikan hilirisasi hasil riset serta keberlanjutan inovasi lintas sektor guna mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah.
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>	
A	Promosi dan kampanye inovasi	Budaya inovasi di kalangan masyarakat, ASN, dan industri serta pelaku usaha masih rendah. Riset masih dianggap sebagai domain akademik, bukan sebagai instrumen utama yang memiliki potensi dalam mentransformasi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Perlu kampanye terpadu untuk menanamkan nilai inovatif dan kolaboratif.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan dan insentif bagi pelaku riset dan inovator daerah masih terbatas dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>		
		belum berkelanjutan. Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maupun Lomba Cipta Inovasi belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Perlu sistem apresiasi yang mampu menumbuhkan motivasi serta mengakui kontribusi inovasi terhadap pembangunan berkelanjutan.
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup berbasis riset masih sangat terbatas. Ekosistem pendukung seperti inkubator bisnis dan akses pembiayaan bagi startup inovatif masih belum terbentuk secara merata.
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kearifan lokal dan teknologi tradisional yang berpotensi menjadi sumber inovasi sosial dan ekonomi belum terdokumentasi dengan baik. Perlu inisiatif seperti <i>local knowledge mapping</i> untuk memetakan pengetahuan lokal dan inovasi tradisional serta mengintegrasikannya dengan pengetahuan dan teknologi modern.
<b>5 Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>		
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Agenda riset daerah dan belum sepenuhnya disusun berdasarkan analisis permasalahan utama daerah, terutama dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Diperlukan prakarsa pengembangan riset ke arah hilirisasi hasil riset serta menempatkan inovasi sebagai solusi lintas sektor dalam mendorong transformasi.
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi sektoral sudah ada namun belum terintegrasi dalam <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menghubungkan riset berbagai sektor yang dapat mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Penguatan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>		
		klaster kreatif berbasis inovasi perlu menjadi prioritas.
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah masih lemah, menyebabkan duplikasi dan tumpang tindih program. Diperlukan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah dalam kerangka ekonomi hijau dan inovasi inklusif.
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global	
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Kesadaran terhadap isu global seperti <i>green economy</i> , <i>circular economy</i> , dan transformasi digital masih terbatas di kalangan pembuat kebijakan dan pelaku riset. Belum ada kebijakan daerah yang secara eksplisit merespons dinamika global tersebut dan menaruh fokusnya terhadap transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.
B	Penguatan kerjasama internasional	Keterlibatan lembaga riset dan pelaku inovasi daerah dalam jejaring riset global masih rendah dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Perlu dibangun kemitraan internasional untuk pertukaran teknologi, pengetahuan, dan pembiayaan inovasi berkelanjutan.

## BAB 3

### TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 3.1. Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) telah menjadi paradigma dominan dalam tata kelola pembangunan modern. Di tengah kompleksitas persoalan pembangunan dan dinamika global yang cepat berubah, peran riset dan inovasi menjadi semakin sentral dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun demikian, di Provinsi Banten, kemampuan ekosistem sistem riset dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan kebijakan berbasis bukti masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kelembagaan, hingga sumber daya manusia.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Banten adalah belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan riset dan inovasi daerah. Meskipun sudah ada unit RIDA setingkat eselon tiga di bawah Bappeda Provinsi Banten sebagai lembaga teknis, fungsinya belum sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Banyak perangkat daerah belum menjadikan riset sebagai dasar dalam menyusun kebijakan mereka, sehingga proses penyusunan kebijakan cenderung masih bersifat administratif, tidak berbasis analisis mendalam.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang riset juga menjadi hambatan signifikan. Di Provinsi Banten, jumlah peneliti daerah yang memiliki kapasitas metodologis dan pemahaman terhadap konteks kebijakan masih terbatas. Banyak tenaga fungsional peneliti berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kebijakan sektoral, dan belum banyak yang memiliki pengalaman dalam memproduksi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Selain itu, tidak semua perangkat daerah memiliki SDM yang mampu menginterpretasikan hasil riset menjadi acuan kebijakan. Kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas dalam bidang *policy research* dan *knowledge translation* menyebabkan hasil riset yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tantangan lain yang cukup mendasar adalah minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi di tingkat daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran riset di Banten belum mencapai 1% dari total PDRB, padahal idealnya proporsi anggaran untuk riset minimal berada pada kisaran 2–3% sebagaimana rekomendasi UNESCO untuk mendorong pembangunan berbasis pengetahuan (*knowledge-based development*). Rendahnya anggaran menyebabkan banyak proposal riset yang tidak dapat direalisasikan, termasuk penelitian strategis yang sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan mendesak di bidang kemiskinan, pengangguran, infrastruktur dasar, dan pendidikan. Selain itu, riset-riset inovatif yang bersifat lintas sektor dan berskala jangka panjang seringkali tidak mendapat prioritas karena keterbatasan dukungan pembiayaan.

Pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat bergantung pada keberadaan sistem data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Di Provinsi Banten, salah satu tantangan besar adalah belum optimalnya integrasi sistem informasi pembangunan antar-perangkat daerah. Banyak data sektoral yang belum dikompilasi secara digital, atau hanya tersedia dalam bentuk laporan yang tidak mudah diakses lintas perangkat daerah. Ini menyulitkan periset dalam memperoleh data yang dapat diolah secara sistematis untuk mendukung proses analisis kebijakan. Selain itu, inkonsistensi antar-sumber data, kurangnya metadata, dan minimnya pelatihan dalam penggunaan data analitik menjadi penghambat lain. Tidak sedikit perangkat daerah yang masih menggunakan data sekunder yang tidak tervalidasi dalam menyusun program kerja mereka. Dalam kondisi seperti ini, riset yang seharusnya menjadi jembatan antara data dan kebijakan malah terhambat oleh absennya infrastruktur data yang mendukung.

Meski telah dihasilkan sejumlah riset oleh akademisi, lembaga litbang, maupun pemerintah daerah, banyak dari hasil riset tersebut belum digunakan secara optimal dalam proses perencanaan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, belum adanya mekanisme formal yang mengharuskan penggunaan hasil riset dalam penyusunan RPJMD, RKPD, maupun Renstra perangkat daerah. Kedua, rendahnya kapasitas interpretasi dan apresiasi terhadap riset oleh sebagian pengambil kebijakan. Dalam banyak kasus, dokumen hasil riset hanya menjadi pelengkap administrasi atau formalitas dalam forum perencanaan. Rekomendasi yang dihasilkan tidak dibahas secara mendalam dalam rapat-rapat teknis antar-perangkat daerah, dan tidak menjadi dasar evaluasi capaian pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya riset dalam birokrasi daerah masih rendah, dan belum menjadi bagian integral dari proses manajemen pembangunan.

Di sisi lain, *pentahelix* merupakan model ekosistem riset dan inovasi yang ideal. Namun, di Provinsi Banten, pola kemitraan ini belum berjalan secara optimal. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam mendukung kebijakan daerah masih bersifat sporadis dan belum difasilitasi melalui platform kolaborasi yang berkelanjutan. Hal yang sama juga terjadi pada dunia usaha yang memiliki potensi sumber daya yang besar dan kebutuhan riset yang beragam, namun belum dilibatkan secara aktif dalam penyusunan prioritas riset daerah. Ketidaksinambungan antara agenda riset akademik dengan kebutuhan praktis pemerintah dan dunia usaha menyebabkan inovasi yang dihasilkan kurang aplikatif. Padahal, jika kolaborasi riset diperkuat, potensi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berdaya guna akan meningkat secara signifikan.

Tantangan besar lainnya adalah minimnya budaya inovasi di lingkungan birokrasi daerah. Inovasi masih dipandang sebagai beban tambahan atau proyek eksperimental, bukan sebagai pendekatan sistemik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kebijakan. Padahal, dengan mendorong semangat inovasi dan keberanian mencoba pendekatan baru berbasis riset, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Budaya inovasi dapat menjadi daya dukung utama bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Tantangan riset dan inovasi di Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Sebagaimana tercermin dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, transformasi pembangunan di Banten memerlukan dukungan riset dan inovasi yang kuat, terstruktur, dan relevan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat integrasi antara riset dan proses pembangunan, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem data, anggaran, maupun ekosistem inovasi itu sendiri.

Terdapat tantangan besar dalam hal keterpaduan antara agenda riset dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Belum terbangun konektivitas antara program riset dan inovasi dengan program pembangunan di daerah yang menyebabkan masih banyaknya *missmatch* antara apa yang dihasilkan riset di Provinsi Banten dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini terjadi karena belum adanya platform komunikasi dan sinkronisasi antara unit RIDA Bappeda, perguruan tinggi, dengan perangkat daerah teknis, industri, dan masyarakat sebagai pengguna hasil riset.

Sistem manajemen data pembangunan di Provinsi Banten belum mendukung proses riset yang kuat. Data sektoral masih tersebar di berbagai perangkat daerah, tidak terdigitalisasi secara baik, dan sering kali tidak tersedia dalam bentuk yang terbuka atau mudah diakses untuk analisis lanjutan. Tantangan ini menyebabkan para periset kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan terkini, padahal riset yang berkualitas sangat bergantung pada dukungan data. Selain itu, ketidakterpaduan antara sistem informasi daerah dengan sistem nasional (misalnya SIPD dan Satu Data Indonesia) juga menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi informasi, yang pada gilirannya menurunkan keandalan riset dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Kualitas dan kuantitas SDM peneliti di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi tantangan. Masih sedikit ASN yang memiliki latar belakang metodologi riset atau pengalaman memanfaatkan hasil riset untuk mendukung program-program pembangunan. Tenaga fungsional peneliti yang ada belum sepenuhnya difungsikan sebagai mitra strategis untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor pembangunan berbasis riset. Rendahnya budaya membaca laporan riset dan kemampuan menginterpretasi hasil riset juga mengakibatkan banyak rekomendasi riset yang diabaikan atau tidak dimanfaatkan secara optimal dalam percepatan pembangunan daerah.

Tantangan dalam penyediaan anggaran riset juga menjadi faktor yang krusial. Proporsi anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi di Provinsi Banten masih sangat terbatas, bahkan belum mencapai standar 1% dari total PDRB. Alokasi anggaran riset umumnya tersentralisasi pada kegiatan kajian internal atau kegiatan rutin, dan belum diarahkan secara strategis untuk mendukung program prioritas seperti pengurangan kemiskinan, penanggulangan stunting, pengembangan kawasan ekonomi, atau digitalisasi pelayanan publik. Akibatnya, banyak potensi riset inovatif dan aplikatif yang tidak dapat dikembangkan secara maksimal.

Rendahnya budaya inovasi di lingkungan birokrasi juga menjadi hambatan dalam mendorong riset sebagai basis dalam mempercepat

pencapaian pembangunan. Inovasi masih sering dipahami sebagai kegiatan eksperimental yang tidak terikat pada aktivitas riset. Padahal, riset dan inovasi justru harus menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa semangat untuk terus belajar dan melakukan pengujian melalui pendekatan ilmiah, maka program pembangunan akan terus bergantung pada pendekatan coba-coba (*trial and error*) dan berisiko menghasilkan inovasi pembangunan yang tidak efektif.

Minimnya kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset independen, dan dunia usaha juga berdampak pada lemahnya ekosistem inovasi di Provinsi Banten. *Pentahelix* belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi dan insentif yang mendorong kolaborasi riset lintas sektor. Sebagai contoh, riset untuk mendukung hilirisasi produk lokal, pengembangan kawasan industri, atau penataan kawasan pesisir masih dilakukan secara sporadis dan tanpa dukungan riset berbasis kolaborasi. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan pun tidak memiliki kesinambungan dan sulit diadopsi dalam skala besar.

Belum adanya indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kontribusi riset terhadap program pembangunan juga menjadi tantangan tersendiri. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 belum secara eksplisit menetapkan indikator seperti persentase program prioritas yang berbasis hasil riset, jumlah inovasi daerah yang diadopsi, atau proporsi anggaran pembangunan untuk program riset dan inovasi daerah. Tanpa indikator yang terukur, maka penguatan riset akan sulit dievaluasi, dan pengambilan keputusan akan tetap berpijak pada intuisi dan pertimbangan politis semata.

Tantangan lainnya terletak pada aspek penyusunan agenda riset daerah yang belum partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan. Banyak agenda riset sebelumnya yang disusun oleh kalangan akademik atau internal birokrasi tanpa melibatkan pelaku pembangunan di tingkat akar rumput. Akibatnya, hasil riset sering tidak menjawab persoalan riil masyarakat atau tidak mampu menjembatani antara dinamika lapangan dengan arah kebijakan daerah. Padahal, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyusunan agenda riset dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan relevansi hasil riset dengan program pembangunan yang sedang dijalankan.

Dinamika dan kompleksitas isu global juga menuntut sistem riset daerah untuk lebih adaptif. Isu-isu seperti perubahan iklim, transformasi digital, krisis pangan dan energi, hingga geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah. Namun, banyak agenda riset di Banten belum mengintegrasikan dimensi global ini ke dalam kajian mereka. Misalnya, belum banyak riset yang mengkaji dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan lokal, atau potensi ekonomi digital dalam memberdayakan UMKM daerah. Padahal, penyelarasan dengan isu global sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dan antisipatif.

Kemudian, tantangan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah di Provinsi Banten merupakan aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Sebagai provinsi dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geografis yang strategis, Banten memiliki potensi besar

dalam pengembangan produk unggulan berbasis sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, dalam praktiknya, riset dan inovasi yang seharusnya menjadi motor penggerak untuk memperkuat keunggulan tersebut belum berjalan secara optimal. Berbagai tantangan struktural, kelembagaan, sumber daya, dan budaya inovasi masih menjadi hambatan yang signifikan.

Tantangan utama terletak pada belum adanya pemetaan riset yang komprehensif terhadap potensi produk unggulan daerah. Saat ini, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah memang mencantumkan pengembangan produk unggulan sebagai prioritas. Namun, agenda riset dan inovasi yang mendukungnya masih bersifat sporadis dan tidak terintegrasi. Tidak tersedia peta riset yang menggambarkan tahapan pengembangan produk unggulan dari hulu ke hilir, termasuk riset varietas unggul, teknologi pengolahan, strategi pemasaran, hingga model bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Tantangan lainnya adalah minimnya sinergi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan riset yang aplikatif terhadap kebutuhan UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Banyak kegiatan riset masih bersifat akademik dan tidak menjawab persoalan praktis di lapangan. Sebagai contoh, pelaku usaha produk makanan olahan atau kerajinan khas Banten sering kesulitan mengakses riset mengenai peningkatan mutu produk, teknologi pengemasan, atau sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia riset dan kebutuhan dunia usaha yang seharusnya dapat diisi melalui kerja *pentahelix*.

Belum optimalnya dukungan infrastruktur riset dan teknologi menjadi penghambat dalam proses pengembangan produk unggulan. Provinsi Banten masih kekurangan laboratorium uji mutu produk, pusat inkubasi bisnis teknologi, dan pusat riset terapan yang mampu mengembangkan prototype atau skala produksi awal. Tanpa infrastruktur tersebut, hasil riset sulit dikomersialisasikan dan inovasi produk lokal tidak bisa bersaing di pasar regional atau nasional. Bahkan, daerah-daerah dengan potensi besar seperti Lebak dan Pandeglang masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas riset yang layak.

Kapasitas sumber daya manusia, khususnya peneliti dan tenaga pengembang produk, juga menjadi tantangan serius. Belum banyak SDM lokal yang memiliki kompetensi dalam melakukan riset pengembangan produk berbasis teknologi tepat guna. Tenaga pendamping UMKM dan pelaku ekonomi kreatif pun belum dilengkapi dengan keahlian riset pasar, manajemen inovasi, atau pengembangan merek (*branding*). Dalam banyak kasus, pelaku usaha lokal mengembangkan produk secara turun-temurun tanpa adanya intervensi teknologi dan riset yang berkelanjutan.

Sistem insentif dan pendanaan riset untuk pengembangan produk unggulan juga belum terbentuk secara kuat. Alokasi anggaran daerah untuk kegiatan riset umumnya masih tersentralisasi untuk kajian-kajian internal pemerintah daerah dan belum diarahkan secara strategis untuk mendukung pelaku usaha lokal. Di sisi lain, belum tersedia skema pembiayaan inovasi seperti dana matching grant, dana inkubasi bisnis, atau dana komersialisasi

produk hasil riset. Ini menyebabkan banyak hasil riset berhenti di meja laboratorium dan tidak mampu masuk ke rantai pasok industri.

Aspek perlindungan dan hilirisasi hasil riset juga menjadi masalah tersendiri. Pelaku riset dan inovasi di Banten masih jarang yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) dari produk inovatif yang dihasilkan. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya HKI serta minimnya pendampingan hukum dan administratif menyebabkan potensi ekonomi dari hasil riset tidak bisa dimaksimalkan. Padahal, perlindungan HKI dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi dan menjamin keberlanjutan inovasi produk unggulan.

Keterbatasan dalam akses informasi dan diseminasi hasil riset kepada pelaku ekonomi lokal juga menjadi hambatan yang nyata. Tidak banyak pelaku UMKM atau industri kecil yang mengetahui hasil riset yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan usahanya. Hasil riset sering kali hanya didokumentasikan dalam laporan lembaga litbang tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang memadai ke masyarakat. Selain itu, minimnya pelatihan dan forum diseminasi riset membuat ekosistem inovasi lokal tidak berkembang secara inklusif.

Rendahnya budaya inovasi di kalangan birokrasi dan masyarakat juga menjadi tantangan dalam pengembangan produk unggulan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadikan riset dan inovasi sebagai pendekatan utama dalam membangun daya saing produk lokal. Banyak kebijakan yang masih mengandalkan pola bantuan langsung dan pendekatan administratif, tanpa disertai upaya sistematis untuk mendorong pelaku usaha berinovasi melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan desain produk. Di sisi masyarakat, budaya inovasi juga masih terbatas karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi teknologi.

Tantangan dari sisi pasar dan dinamika konsumen juga perlu diperhatikan. Produk unggulan daerah menghadapi persaingan yang ketat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tanpa riset pasar yang kuat, banyak produk lokal yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan selera, tren, atau standar kualitas yang dituntut oleh konsumen. Misalnya, riset mengenai preferensi konsumen terhadap kemasan ramah lingkungan, produk organik, atau desain produk berkelanjutan masih jarang dilakukan. Hal ini mengakibatkan produk unggulan Banten sulit bersaing, meskipun memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang tinggi.

Kebijakan regulasi yang belum ramah terhadap pengembangan inovasi produk lokal juga menjadi kendala. Proses perizinan, sertifikasi produk, dan prosedur birokrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan produknya secara legal dan kompetitif. Padahal, peran riset sangat penting dalam merekomendasikan kebijakan penyederhanaan regulasi, penyesuaian standar mutu, dan reformasi layanan perizinan usaha. Namun, hingga kini kontribusi riset terhadap reformasi kebijakan berbasis bukti masih sangat terbatas di tingkat daerah.

Tantangan globalisasi dan digitalisasi turut memperbesar urgensi riset dalam pengembangan produk unggulan. Di era industri 4.0 dan ekonomi digital, produk unggulan daerah harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital, mulai dari e-commerce, platform pemasaran digital, hingga manajemen rantai pasok berbasis data. Namun, adopsi teknologi digital dalam

UMKM dan industri kreatif di Banten masih sangat rendah. Riset tentang digitalisasi bisnis, pemanfaatan media sosial, dan pemasaran daring masih belum banyak dilakukan secara sistematis oleh institusi riset daerah.

Dinamika perubahan iklim dan isu keberlanjutan juga menuntut adanya riset yang mendalam terhadap pengembangan produk unggulan berbasis lingkungan. Produk-produk seperti pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan kerajinan dari bahan daur ulang memiliki potensi pasar global yang besar. Namun, riset terhadap dampak lingkungan dari produk unggulan lokal, efisiensi energi dalam produksi, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara lestari masih sangat terbatas. Tanpa riset semacam ini, produk unggulan Banten akan sulit memenuhi standar keberlanjutan yang kini menjadi tuntutan pasar global.

### 3.2. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Provinsi Banten memiliki berbagai peluang strategis dalam mengembangkan riset dan inovasi sebagai landasan pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks dan multidimensional, kebutuhan terhadap kebijakan yang akurat, adaptif, dan berdampak nyata sangatlah penting. Kebijakan berbasis bukti tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi, Banten memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem riset yang kuat dan terintegrasi demi mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih berkualitas.

Peluang pertama adalah adanya potensi kolaborasi yang besar antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi serta lembaga riset. Di Banten terdapat sejumlah perguruan tinggi yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur penelitian yang memadai, seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, dan perguruan tinggi lainnya. Institusi ini dapat menjadi mitra strategis dalam penyediaan kajian, analisis kebijakan, survei sosial, dan evaluasi program yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah hanya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan mengembangkan mekanisme formal untuk mendorong sinergi riset, termasuk penyusunan agenda riset daerah yang partisipatif.

Peluang riset juga diperkuat dengan adanya kebutuhan akan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data. Dalam siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, diperlukan instrumen analisis yang valid. Keberadaan big data, teknologi digital, dan sistem informasi pembangunan daerah menjadi potensi besar untuk mendukung riset kebijakan. Provinsi Banten dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperkuat sistem data terbuka (*open data*) dan dashboard analitik kebijakan yang dapat diakses oleh perangkat daerah, peneliti, dan publik. Platform ini akan mendorong budaya berbagi data dan membuka ruang analisis lintas sektor yang lebih akurat.

Peluang besar juga terlihat dalam konteks penguatan sistem inovasi daerah. Pemerintah pusat melalui Kemendagri, BRIN, dan KemenPAN-RB terus mendorong daerah untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang mampu menjadi mesin pertumbuhan baru daerah. Dalam hal ini, riset bukan hanya dijadikan sebagai instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai dasar inovasi kebijakan, program layanan publik, hingga solusi atas tantangan sosial. Pemerintah Provinsi Banten dapat menjadikan momentum ini untuk memperluas pendekatan riset tidak hanya di unit RIDA Bappeda, namun juga melekat pada fungsi-fungsi strategis di tiap perangkat daerah, seperti bidang perencanaan, pendidikan, kesehatan, UMKM, lingkungan, dan infrastruktur.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya insentif dari pemerintah pusat untuk daerah yang mampu menunjukkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui indeks inovasi daerah, penghargaan inovasi pelayanan publik, hingga insentif kinerja fiskal, Banten dapat memanfaatkan hasil-hasil riset sebagai basis inovasi dan pembenahan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Misalnya, riset mengenai persebaran kemiskinan ekstrem dapat menjadi dasar alokasi program bantuan sosial yang lebih akurat. Atau riset mengenai persebaran anak tidak sekolah dan angka putus sekolah dapat menjadi dasar intervensi pendidikan berbasis wilayah prioritas.

Peluang riset juga muncul dari pergeseran paradigma perencanaan pembangunan nasional yang mulai menekankan pentingnya peran daerah dalam menghasilkan pengetahuan lokal. Dalam RPJMN Tahun 2024–2029, arah kebijakan pembangunan menekankan pentingnya penguatan riset daerah sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti, riset yang dilakukan di Banten tidak hanya relevan untuk kepentingan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, hasil riset yang berkualitas dapat memperkuat posisi Banten sebagai provinsi yang aktif dalam membentuk arus kebijakan nasional.

Potensi besar juga terlihat dalam penguatan mekanisme diseminasi dan pemanfaatan hasil riset. Saat ini, berbagai inovasi berbasis teknologi komunikasi dan media sosial dapat digunakan untuk memperluas jangkauan penyebarluasan hasil riset. Forum-forum kebijakan seperti forum komunikasi riset dan inovasi serta *dashboard* rekomendasi kebijakan dapat dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Diseminasi yang kuat akan mendorong perubahan perilaku birokrasi untuk lebih terbuka terhadap kajian ilmiah dan mengurangi dominasi pendekatan intuisi dalam merumuskan kebijakan.

Provinsi Banten juga memiliki peluang untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis riset. Selama ini, evaluasi program sering kali hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi keberhasilan atau kegagalan intervensi. Dengan riset evaluatif yang baik, Pemerintah Provinsi Banten dapat menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan berdasarkan bukti empiris yang sah. Hal ini akan memperkuat fungsi kontrol internal pemerintah daerah dan memberikan dasar untuk koreksi kebijakan yang konstruktif.

Peluang juga datang dari kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah. Riset kebijakan dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengembangan sektor unggulan, promosi investasi, penguatan kualitas SDM, serta integrasi kawasan industri. Dalam konteks ini, data dan kajian berbasis wilayah, seperti *comparative advantage* dan *competitive advantage* antar-kabupaten/kota di Banten, dapat menjadi landasan dalam menetapkan fokus kebijakan pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting untuk mendorong daya saing Provinsi Banten.

Tidak kalah penting, potensi besar juga terlihat dalam keberadaan berbagai lembaga donor, CSR perusahaan besar, dan lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Banten. Dengan membangun sinergi riset antara Pemprov, NGO, donor internasional, dan sektor swasta, Provinsi Banten dapat memperoleh pendanaan tambahan dan memperkaya perspektif dalam pengembangan kebijakan. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam riset kebijakan juga akan memperluas akuntabilitas publik dan menciptakan dialog kebijakan yang sehat.

Provinsi Banten memiliki berbagai peluang strategis dalam mengembangkan riset dan inovasi guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan, riset dan inovasi menjadi instrumen penting yang dapat menjembatani antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Terlebih, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, terdapat enam prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan kualitas SDM dan daya saing, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, serta stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat. Masing-masing prioritas tersebut memerlukan landasan pengetahuan yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam mendukung prioritas peningkatan kualitas SDM dan daya saing, riset dapat memainkan peran dalam memetakan kebutuhan keterampilan masa depan, tren pendidikan digital, serta strategi pengembangan talenta muda berbasis lokalitas. Riset pendidikan yang terintegrasi dengan data ketenagakerjaan lokal dapat menjadi dasar bagi reformasi kurikulum di sekolah dan lembaga vokasi, serta pengembangan program beasiswa yang berbasis kebutuhan industri. Selain itu, riset tentang karakteristik sosial budaya masyarakat Banten dapat mendukung intervensi peningkatan literasi, kesehatan, dan ketahanan keluarga secara lebih kontekstual.

Untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, riset dibutuhkan untuk merumuskan rencana induk infrastruktur berbasis spasial, efisiensi biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan data geospasial, studi kelayakan, dan kajian dampak lingkungan, riset dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Riset inovatif juga dapat membantu dalam perancangan model pembiayaan infrastruktur alternatif, seperti kemitraan pemerintah dan swasta (PPP), atau integrasi infrastruktur hijau dan ramah bencana.

Pada prioritas transformasi ekonomi daerah, riset dan inovasi menjadi tulang punggung pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian modern,

industri halal, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Riset dapat membantu mengidentifikasi rantai nilai (*value chain*) dari produk unggulan daerah, memperkuat strategi branding, dan menyusun roadmap hilirisasi industri lokal. Selain itu, inovasi digital dalam pemasaran, e-commerce, logistik, serta sistem pembayaran akan mendorong pelaku UMKM naik kelas. Dengan adanya riset pasar dan tren konsumsi berbasis digital, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam menyusun kebijakan insentif dan pelatihan bagi pelaku ekonomi lokal.

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani, riset dapat diarahkan untuk membantu perangkat daerah melakukan reformasi birokrasi berbasis data. Evaluasi layanan publik, audit kinerja, serta kajian efektivitas program dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan SOP, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas ASN. Melalui pemanfaatan riset sosial dan teknologi informasi, transformasi pelayanan publik menuju pelayanan digital (SPBE) dan responsif terhadap warga dapat diakselerasi.

Pada isu pembangunan lingkungan hidup, riset memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan berbasis ekoregion, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi hijau. Studi terhadap emisi karbon, potensi energi terbarukan, serta indeks kerentanan wilayah terhadap bencana dapat membantu daerah menyusun strategi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Selain itu, riset juga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan model insentif untuk pelaku usaha yang mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

Dalam rangka memperkuat stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat, riset dibutuhkan untuk memahami dinamika sosial politik, persepsi publik terhadap layanan pemerintah, serta potensi konflik sosial. Riset-riset semacam ini dapat menjadi input bagi penyusunan strategi komunikasi publik, program penguatan identitas kebudayaan lokal, serta intervensi sosial yang inklusif bagi kelompok rentan. Selain itu, riset berbasis gender dan inklusi sosial akan memperkuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, difabel, dan kelompok minoritas lainnya.

Selain mendukung prioritas pembangunan daerah, peluang riset dan inovasi Banten juga dapat diperkuat melalui pengembangan kemitraan multipihak. Kolaborasi antara Bappeda Provinsi Banten dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas inovasi dapat mempercepat transfer pengetahuan dan adopsi teknologi. Dengan memanfaatkan skema riset kolaboratif, *matching fund*, serta hibah riset berbasis tema prioritas, Provinsi Banten dapat memperluas kapasitas riset terapan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Provinsi Banten juga memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan riset dan inovasi guna mendukung pengembangan produk unggulan daerah sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam era persaingan global dan ketidakpastian ekonomi, daya saing daerah tidak lagi semata-mata bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi lebih pada kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah melalui pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Oleh karena itu, pembangunan berbasis produk unggulan daerah yang didukung

oleh riset dan inovasi menjadi kunci dalam memperkuat posisi Banten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Pulau Jawa.

Peluang strategis terbuka melalui keberadaan potensi produk unggulan daerah yang cukup beragam dan khas, mulai dari sektor pertanian dan perikanan seperti padi organik, lada hitam, udang vaname, hingga sektor industri kreatif seperti batik Banten, anyaman bambu, dan kuliner tradisional khas daerah. Setiap produk ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendekatan riset yang menyeluruh, baik dari sisi teknologi produksi, pengemasan, pemasaran, maupun strategi branding. Dengan memperkuat riset pada rantai nilai produk unggulan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengembangan produk tidak berhenti pada produksi primer, melainkan bertransformasi ke arah hilirisasi dan komersialisasi yang bernilai tinggi.

Peluang lain muncul dari meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya penguatan riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Banten memberikan sinyal kuat bahwa pengembangan produk unggulan berbasis riset dan inovasi menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Ini membuka ruang bagi pelibatan aktif perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas inovasi dalam pengembangan roadmap produk unggulan secara tematik dan wilayah. Dengan dukungan regulasi ini, riset dan inovasi tidak lagi menjadi kegiatan akademik semata, tetapi menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Peluang kolaborasi antar-stakeholder menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat inovasi produk unggulan. Di Provinsi Banten, telah tumbuh berbagai inisiatif kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa (*pentahelix*) yang memungkinkan terciptanya ekosistem inovasi daerah. Perguruan tinggi seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki pusat riset dan inkubator bisnis yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai mitra dalam pendampingan UMKM. Sementara itu, perusahaan besar yang beroperasi di kawasan industri Banten dapat didorong untuk menjalankan program CSR yang mendukung inovasi dan hilirisasi produk lokal. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mempercepat adopsi hasil riset di sektor riil.

Perkembangan teknologi digital dan industri 4.0 menjadi peluang signifikan dalam pengembangan produk unggulan berbasis riset. Dengan adopsi teknologi seperti Internet of Things (IoT), big data, kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain*, pelaku UMKM di Banten dapat didorong untuk mengembangkan produk berbasis data, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas akses pasar secara digital. Pemerintah dapat mendorong riset terapan yang menjembatani pelaku usaha kecil dengan teknologi digital, seperti sistem pelacakan rantai pasok, platform pemasaran online, atau sistem inventaris berbasis cloud. Dengan digitalisasi produk unggulan, daya saing Banten di tingkat nasional dan global akan meningkat secara signifikan.

Peluang penguatan kapasitas SDM lokal dalam pengembangan produk unggulan juga sangat besar. Melalui program pelatihan, sertifikasi, dan magang industri berbasis kebutuhan lokal, pemerintah dapat menyiapkan generasi muda dan pelaku usaha untuk menjadi aktor utama dalam inovasi daerah. Program beasiswa riset terapan, pelatihan desain produk, serta pengembangan brand lokal dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk

memperkuat ekosistem inovasi. Selain itu, program kolaboratif antara Bappeda, perangkat daerah terkait, dan lembaga pelatihan vokasi dapat mendorong transformasi pelaku usaha tradisional menjadi pelaku usaha berbasis pengetahuan.

Potensi besar juga terletak pada keterbukaan pasar domestik dan global terhadap produk-produk lokal yang memiliki keunikan, keberlanjutan, dan nilai budaya. Tren pasar saat ini menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk organik, produk ramah lingkungan, serta produk berbasis kearifan lokal. Riset dapat diarahkan untuk mengembangkan produk unggulan yang memenuhi standar mutu, kesehatan, dan keberlanjutan, seperti pengembangan sertifikasi organik, eco-labeling, dan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, riset pasar dan preferensi konsumen menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pengembangan produk agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen masa kini.

Peluang lainnya adalah penguatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai strategi untuk memperkuat posisi produk unggulan di pasar. Pemerintah dapat memfasilitasi riset dalam bentuk paten, merek dagang, indikasi geografis, serta hak cipta atas desain produk lokal. Dengan perlindungan KI, produk unggulan Banten dapat memperoleh pengakuan formal yang mendukung penetrasi pasar sekaligus mencegah klaim sepihak oleh pihak lain. Pusat layanan HKI di tingkat provinsi dapat menjadi katalis dalam mendampingi pelaku usaha dan peneliti dalam proses pendaftaran dan komersialisasi produk inovatif.

Penguatan infrastruktur pendukung riset dan inovasi juga menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Pemerintah dapat mengembangkan pusat riset produk unggulan, laboratorium uji mutu, dan inkubator bisnis di tingkat kabupaten/kota yang terhubung dengan pusat inovasi daerah. Infrastruktur ini akan menjadi simpul penting dalam mempercepat alih teknologi, uji coba produk, dan komersialisasi hasil riset. Selain itu, pembangunan techno park atau kawasan inovasi berbasis klaster sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan akan memperkuat ekosistem inovasi di daerah.

Adanya berbagai skema pembiayaan riset dan inovasi dari pemerintah pusat, lembaga donor, serta dunia usaha menjadi peluang pendukung. Pemprov Banten dapat mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang riset serta memfasilitasi pelaku usaha lokal mengakses pembiayaan riset dari program LPDP, program matching fund, hingga hibah dari lembaga internasional. Dengan desain kebijakan fiskal yang berpihak pada inovasi daerah, pengembangan produk unggulan dapat didorong lebih cepat dan inklusif.

Riset dan inovasi juga memiliki peluang besar dalam mendukung promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil riset dalam menyusun strategi komunikasi produk, kampanye digital, serta partisipasi dalam pameran dagang nasional dan internasional. Dengan promosi yang tepat sasaran dan berbasis analisis pasar, produk unggulan Banten dapat menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah.

Peluang riset dan inovasi juga tercermin dalam kebutuhan untuk menyelaraskan pengembangan produk unggulan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Riset yang mengarah pada pengurangan emisi karbon,

efisiensi penggunaan energi dan air, serta pengelolaan limbah produksi akan memperkuat posisi produk Banten sebagai produk hijau dan bertanggung jawab. Dalam konteks global, ini menjadi keunggulan kompetitif tersendiri bagi produk daerah.

Terakhir, peluang partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk unggulan juga terbuka luas melalui pendekatan riset partisipatif dan living lab. Dalam model ini, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek riset, tetapi menjadi subjek aktif dalam eksplorasi potensi produk, pengembangan model bisnis, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini akan menghasilkan inovasi yang berbasis konteks lokal dan lebih berkelanjutan secara sosial dan budaya.

### 3.3. Kondisi Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan

#### 3.3.1. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Dalam rangka memperkuat peran riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Banten perlu memetakan kondisi kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi yang diharapkan, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi yang diharapkan, kemitraan riset dan inovasi yang diharapkan, budaya riset dan inovasi yang diharapkan, keterpaduan riset dan inovasi yang diharapkan, dan keselarasan dengan perkembangan global yang diharapkan. Narasi ini menguraikan harapan riset dan inovasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada bukti (*evidence-based policy*).

#### *Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi yang Diharapkan*

Dari elemen reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tata kelola riset dan inovasi. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan riset berbasis kebutuhan pembangunan daerah, serta sebagai instrumen untuk mendorong sinergi antarsektor. Dalam mendukung pengembangan produk unggulan, reformasi kebijakan ini juga mencakup penyusunan kajian penentuan produk unggulan daerah yang berbasis riset dan karakteristik lokalitas.

Peningkatan kualitas sumber daya periset daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan riset yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Banten dapat menyelenggarakan program berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas periset daerah, yang meliputi fasilitasi pendidikan lanjutan seperti magister dan doktoral, serta pelatihan teknis dan metodologis dalam riset kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam riset memiliki kompetensi tinggi, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam, dan inovasi yang aplikatif. Selain itu, penguatan kompetensi periset dapat dilakukan dengan skema mobilitas periset dengan memagangkan periset di perangkat daerah dan industri untuk menemukenali permasalahan yang ada dan dapat mempelajari kebutuhan riset yang diperlukan.

Pada elemen penataan basis data riset dan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat membangun *dashboard* rekomendasi

kebijakan yang komprehensif. Dashboard ini akan menjadi alat bantu utama dalam pengambilan keputusan berbasis data dan bukti. Selain itu, diharapkan tersedia platform repositori digital yang mampu menginventarisasi data mentah dan luaran hasil riset secara sistematis. Platform ini penting untuk mempermudah akses lintas perangkat daerah, peneliti, dan masyarakat terhadap hasil riset, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian, untuk pengembangan infrastruktur riset dan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Banten dapat membangun laboratorium kebijakan yang fokus pada perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis riset. Di samping itu, pemerintah juga perlu berkomitmen mengembangkan infrastruktur fisik seperti laboratorium riset, layanan riset tematik, inkubator bisnis, dan pusat layanan pendampingan UMKM maupun industri. Infrastruktur ini bertujuan memperkuat sistem inovasi daerah dan mempercepat hilirisasi hasil riset ke sektor riil.

Dari sisi penyediaan anggaran riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat berkomitmen dalam menetapkan alokasi anggaran riset dan inovasi daerah sebesar minimal 1% dari total APBD. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan komitmen fiskal terhadap riset dan inovasi, tetapi juga memberi ruang bagi pembiayaan riset-riset strategis yang berdampak langsung pada pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029.

Dalam hal peningkatan perlindungan kekayaan intelektual (KI), Pemerintah Provinsi Banten perlu menargetkan hadirnya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur Banten (Pergub) yang memfasilitasi perlindungan KI di tingkat daerah. Selain aspek regulasi, perlu disediakan pula layanan pendampingan dan fasilitasi bagi para inovator, pelaku UMKM, peneliti, dan seniman untuk mendaftarkan paten, merek dagang, hak cipta, maupun indikasi geografis. Sebagai bentuk penghargaan, diberikan insentif dan apresiasi kepada inovator dan pekerja kreatif yang menghasilkan karya berdampak bagi pembangunan daerah.

## *Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi yang Diharapkan*

Kapasitas kelembagaan yang diharapkan adalah adanya kejelasan struktur, fungsi, dan peran lembaga riset dan inovasi di tingkat daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan riset ditandai dengan tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kelembagaan riset, termasuk jumlah lembaga yang aktif melakukan riset dan inovasi, jumlah SDM peneliti yang tersedia, serta pemetaan kompetensi mereka. Dalam hal ini, lembaga riset harus mampu mengintegrasikan hasil penelitian dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan institusi yang memiliki otoritas teknis dan dukungan politik yang kuat, melalui Bappeda Provinsi Banten yang didukung sistem kerja lintas perangkat daerah.

Kapasitas kelembagaan diarahkan pada koordinasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Lembaga riset daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pemimpin kolaborasi multipihak yang mendorong riset aplikatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

pembangunan daerah secara konkret. Sementara itu, lembaga riset dan inovasi perlu terhubung erat dengan pelaku usaha, komunitas inovasi, UMKM, dan institusi pendidikan tinggi. Kelembagaan riset harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan pasar dan potensi lokal, serta mendampingi proses hilirisasi produk hingga masuk ke pasar nasional maupun global.

Kemudian, daya dukung riset dan inovasi di Provinsi Banten tidak hanya bergantung pada keberadaan SDM dan kelembagaan, tetapi juga pada ekosistem kolaborasi dan pembiayaan yang tersedia. Dalam kondisi ideal, pemerintah daerah memiliki sistem informasi yang memuat data dan informasi mengenai kerjasama riset, baik yang telah berjalan maupun potensi kolaborasi di masa depan. Daya dukung riset mencakup adanya mekanisme formal untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra internasional. Selain itu, data riset harus terdokumentasi dan mudah diakses untuk dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan yang responsif dan adaptif. Daya dukung riset dan inovasi juga perlu dilengkapi dengan skema insentif atau bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap mitra riset yang berkontribusi pada pemecahan masalah daerah. Bentuk insentif ini bisa berupa dana *matching fund*, pengakuan kinerja melalui penghargaan daerah, atau kemudahan dalam akses fasilitas riset daerah.

### *Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi yang Diharapkan*

Kemitraan riset dan inovasi yang diharapkan dalam konteks kebijakan berbasis bukti mencakup hubungan yang erat antara lembaga riset (unit RIDA Bappeda Provinsi Banten, perguruan tinggi, lembaga riset lainnya) dengan Organisasi Perangkat Daerah (perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Diharapkan terdapat mekanisme formal dan rutin yang memungkinkan hasil-hasil riset digunakan secara langsung dalam penyusunan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program pembangunan.

Sementara dalam mendukung pencapaian program pembangunan, kemitraan yang diharapkan diperluas mencakup sektor swasta dan komunitas. Hal ini meliputi kerja sama aktif dengan industri, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pegiat usaha lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dunia usaha serta dapat mempercepat alih teknologi, peningkatan daya saing, dan hilirisasi hasil riset menjadi produk komersial.

Salah satu tantangan utama dari riset di daerah adalah kurangnya saluran efektif untuk menyampaikan hasil riset kepada pengambil keputusan atau pengguna. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan mencakup adanya sistematisasi proses diseminasi naskah kebijakan (*policy brief*) kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini memastikan bahwa hasil riset yang relevan dapat diterima secara tepat waktu dan digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.

Di sektor ekonomi dan bisnis, hasil riset yang bernilai inovasi diharapkan dapat dilindungi melalui pemberian lisensi paten kepada pelaku usaha lokal

seperti UMKM, BUMD, dan BUMDes. Selain itu, proses pendampingan alih teknologi menjadi bagian penting dari strategi penyebarluasan hasil riset, dengan memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh sektor produktif di daerah.

Difusi inovasi menjadi tahap lanjut dari proses riset yang bertujuan untuk mengubah hasil penelitian menjadi solusi nyata yang diadopsi secara luas oleh masyarakat dan institusi. Dalam kebijakan berbasis bukti, difusi inovasi dilakukan melalui program pendampingan strategis yang menyalurkan hasil riset ke dalam bentuk kebijakan operasional atau instrumen perencanaan daerah.

Untuk mendukung transformasi ini secara lebih luas, Pemerintah Provinsi Banten juga harus dapat menghadirkan klinik inovasi yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran, pendampingan, dan pengembangan kapasitas inovator lokal. Klinik inovasi ini akan menjadi ruang bersama bagi akademisi, birokrat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengakses informasi, mengembangkan ide, dan menguji solusi yang dapat memberikan dampak pembangunan nyata.

#### *Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi yang Diharapkan*

Penguatan budaya riset dan inovasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam membangun ekosistem pengetahuan yang dinamis dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Pemerintah daerah tidak hanya menargetkan pencapaian indikator riset dari sisi kelembagaan dan infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan semangat, kesadaran, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi.

Budaya riset tidak akan tumbuh tanpa adanya promosi dan kampanye yang terstruktur, khususnya di lingkungan pendidikan dan masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Banten mengharapkan agar muatan lokal di kurikulum SMA/SMK mencakup mata ajar yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, metode riset dasar, atau metodologi penelitian. Hal ini bertujuan menanamkan minat dan pemahaman riset sejak dini, sehingga generasi muda Banten memiliki literasi ilmiah dan logika berpikir kritis.

Untuk mendukung program pembangunan dan kewirausahaan, diharapkan pula adanya integrasi mata pelajaran tentang inovasi dan kewirausahaan yang berbasis kekhasan daerah Provinsi Banten dalam kurikulum lokal sekolah. Dengan demikian, kampanye riset tidak berhenti di ruang akademik, tetapi diarahkan pada pembentukan sikap kreatif dan solutif dalam menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan pasar.

Selain kampanye riset dan inovasi juga dilakukan melalui forum multipihak yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dengan mempertemukan pemerintah dengan berbagai perangkat daerah terkait, sektor usaha (industri, UMKM, BUMD, BUMDes), serta komunitas inovasi. Forum ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan riset dan teknologi, sekaligus membuka ruang kolaborasi dan jejaring pengembangan produk unggulan daerah.

Budaya riset akan berkembang jika disertai dengan penghargaan yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan

insentif dan apresiasi kepada SDM periset di lingkungan Provinsi Banten, baik peneliti, perekayasa, analis kebijakan, teknisi litkayasa, maupun inovator, yang berhasil mempublikasikan hasil risetnya di jurnal nasional atau internasional bereputasi. Dukungan ini menunjukkan keberpihakan terhadap kualitas, sekaligus menjadi motivasi untuk menghasilkan riset yang relevan dan berdampak.

Pada level pendidikan menengah, kompetisi Karya Ilmiah Remaja (KIR) tingkat SMA/SMK menjadi ruang untuk memupuk minat riset generasi muda dan mengidentifikasi potensi talenta muda Banten di bidang sains dan teknologi. Kompetisi ini juga menjadi sarana untuk membiasakan pelajar berpikir sistematis, analitis, dan solutif terhadap masalah di sekitarnya.

Di tingkat masyarakat umum, diharapkan terdapat festival atau lomba inovasi terbuka yang melibatkan warga secara luas, tanpa memandang latar belakang akademik. Ajang ini menjadi media untuk menghimpun gagasan inovatif dari masyarakat, serta mempertemukan inovator dengan mitra pendukung seperti investor, inkubator bisnis, dan pemerintah daerah.

Untuk memperkuat hilirisasi hasil riset, pemerintah daerah mendorong pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi (*startup*) yang lahir dari ide dan hasil riset lokal. Salah satu langkah awal adalah melakukan kajian kebijakan tentang pengembangan startup berbasis teknologi, sebagai dasar dalam merancang skema pendanaan, insentif, serta dukungan hukum dan kelembagaan bagi perusahaan pemula di Banten.

Di tingkat implementasi, perusahaan pemula diharapkan dapat memanfaatkan layanan inkubator bisnis yang tersedia di lingkungan pemerintah atau mitra swasta. Inkubator ini memberikan akses ke fasilitas, pembimbingan, akses pasar, dan pendanaan awal. Selain itu, perusahaan pemula juga dapat mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi, yang dirancang untuk memperkuat aspek perencanaan bisnis, digitalisasi layanan, serta pengelolaan keuangan secara modern.

Dengan memadukan kampanye pendidikan, penghargaan terhadap prestasi, serta dukungan terhadap kewirausahaan inovatif, Provinsi Banten menargetkan terbentuknya ekosistem budaya riset dan inovasi yang progresif dan partisipatif. Dalam budaya ini, riset tidak hanya menjadi aktivitas akademis, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi. Dukungan lintas sektor dan lintas usia diharapkan mempercepat transisi Provinsi Banten menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.

#### *Elemen 5: Keterpaduan Riset dan Inovasi yang Diharapkan*

Keterpaduan riset dan inovasi daerah merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil riset, berjalan secara sinkron, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks pembangunan Provinsi Banten, kondisi keterpaduan riset dan inovasi yang diharapkan mencakup keterpaduan data dan informasi riset dan inovasi daerah serta koordinasi lintas pemerintahan.

Dalam kondisi yang diharapkan, Provinsi Banten memiliki sistem data dan informasi riset yang terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, data tersebut harus mencakup kebutuhan strategis kebijakan di tingkat provinsi yang memerlukan dukungan riset dan inovasi. Hal ini mencakup isu-isu lintas sektor, permasalahan pembangunan daerah, serta peluang intervensi berbasis pengetahuan.

Kemudian, dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, data riset harus secara spesifik mengidentifikasi permasalahan sektoral, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi yang dapat diselesaikan dengan pendekatan riset dan teknologi. Peta masalah dan rekomendasi berbasis data akan membantu proses penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Keterpaduan data sangat penting untuk mengidentifikasi komoditas unggulan lokal, nilai tambah yang potensial, serta titik-titik kritis dalam rantai pasok dan hilirisasi. Riset pasar, pemetaan teknologi, dan data potensi wilayah harus tersedia dalam satu sistem terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset.

Koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan riset daerah selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal. Untuk mendukung keterpaduan riset dan inovasi ini, diperlukan adanya forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemendiktisaintek, dan BRIN, dalam bentuk platform, lokakarya, atau diskusi tematik. Forum ini berfungsi untuk menyelaraskan arah, rencana, dan target riset dan inovasi yang mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Banten juga harus diperkuat. Platform komunikasi horizontal ini sangat penting agar riset tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi. Provinsi diharapkan menjadi simpul integrator yang mendorong kolaborasi lintas daerah melalui temu riset, forum inovasi daerah, atau konsorsium riset bersama kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, diperlukan program pembinaan teknis riset dan inovasi secara sistematis dari unit RIDA Bappeda Provinsi Banten kepada unit RIDA Bappeda/BRIDA/ Bapperida yang ada di pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Pembinaan ini bertujuan mengarahkan riset dan inovasi daerah sesuai dengan potensi spesifik wilayah masing-masing, sekaligus membangun standar mutu, branding bersama, dan strategi hilirisasi yang bersinergi.

#### *Elemen 6: Keselarasan dengan Perkembangan Global yang Diharapkan*

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang pesat, keselarasan riset dan inovasi di tingkat daerah dengan isu-isu nasional dan global menjadi hal yang mutlak untuk diperkuat. Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, menyadari pentingnya merancang sistem riset dan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal, tetapi juga adaptif

terhadap dinamika kebijakan nasional dan tren global. Untuk itu, kondisi yang diharapkan dari aspek ini mencakup dua elemen penting yakni peningkatan kepedulian terhadap isu riset dan inovasi, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung isu tersebut. Keduanya diorientasikan pada tiga tujuan utama, yakni mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, pencapaian program prioritas pembangunan daerah, dan pengembangan produk unggulan lokal.

Kesadaran terhadap pentingnya riset dan inovasi dalam pengambilan keputusan publik masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan untuk Provinsi Banten adalah terbentuknya kode etik ilmiah yang mengatur proses litbang dan riset secara komprehensif di lingkungan pemerintahan daerah. Kode etik ini menjadi panduan normatif sekaligus instrumen akuntabilitas yang memastikan bahwa riset yang dilakukan bersifat objektif, bertanggung jawab, dan etis yang sejalan dengan standar ilmiah nasional dan internasional.

Budaya riset dan inovasi yang kuat tidak akan terbentuk tanpa partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan di Provinsi Banten mencakup tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai keberadaan kelembagaan riset non-pemerintah dan non-perguruan tinggi. Informasi ini mencakup jumlah lembaga, kapasitas SDM, serta bidang kompetensi yang ditekuni oleh masing-masing entitas. Dengan demikian, peta kekuatan riset di luar birokrasi dan kampus dapat dimanfaatkan sebagai potensi kolaborasi pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam riset dan inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Banten perlu memfasilitasi ruang dialog dan temu inovasi yang mempertemukan para pelaku riset nonformal dengan dunia usaha. Oleh karena itu, diharapkan adanya platform atau forum terbuka, seperti lokakarya, temu diskusi, atau innovation fair, yang secara berkala diselenggarakan untuk mendiskusikan dan mempromosikan hasil riset berbasis komunitas dan dunia usaha. Forum-forum ini akan memperluas jejaring antaraktor riset dan inovasi, serta menjadi wadah alih pengetahuan yang bersifat dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

### 3.3.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan di Provinsi Banten ke depan adalah terbangunnya sistem riset yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten. Ekosistem ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang akademik bagi kegiatan penelitian, tetapi berfungsi sebagai motor penggerak untuk memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir berbasis riset dan inovasi. Hasil identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten yang diharapkan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 25 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten yang Diharapkan untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi		
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi yang berpihak pada pengembangan PUD Ekonomi Kreatif melalui regulasi, insentif, dan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah daerah memiliki <i>policy framework</i> yang menempatkan ekosistem riset dan inovasi sebagai pilar utama pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya basis data yang kuat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya <i>Creative Innovation Database</i> terpadu yang mengintegrasikan data riset, inovator, industri, pelaku usaha, dan produk unggulan. Sistem ini menjadi sumber rujukan kebijakan, kolaborasi, dan promosi inovasi daerah berbasis <i>open innovation system</i> .
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya <i>Creative Innovation Hub</i> di setiap klaster ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset, perencanaan, produksi, dan promosi. Setiap <i>hub</i> dilengkapi dengan pusat riset dan pelatihan digital yang inklusif bagi UMKM dan komunitas kreatif.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadahi untuk mendukung	Adanya mekanisme pendanaan inovatif berbasis kolaborasi (co-

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
		pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>funding scheme</i> ) antara pemerintah, industri, dan lembaga riset, termasuk <i>matching fund</i> dan dana abadi inovasi. Proporsi APBD untuk riset dapat ditingkatkan secara bertahap dengan fokus pada hilirisasi dan komersialisasi hasil riset ekonomi kreatif.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya layanan fasilitasi HKI di tingkat daerah yang memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI. Kesadaran pelaku usaha terhadap nilai ekonomi HKI meningkat, dan PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten terdaftar sebagai indikasi geografis dan merek dagang nasional dengan target yang dapat menjangkau ke pasar global.
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya <i>Creative Innovation Council</i> yang menjadi wadah koordinasi permanen antara Bappeda, dinas terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Forum ini berfungsi mengawal kebijakan inovasi, dan mengkoordinasikan hasil riset untuk pengembangan industri kreatif.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya jaringan <i>shared facility</i> dan <i>techno-creative center</i> yang menyediakan akses riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup. PLUT diperkuat menjadi pusat layanan inovasi terpadu yang mampu menghubungkan riset, UMKM, dengan pasar.
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>		
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya kemitraan riset jangka panjang berbasis pentahelix dengan melibatkan akademisi, pemerintah, industri dan pelaku usaha, komunitas, dan media. Pelaku ekonomi kreatif berperan aktif sebagai <i>co-creator</i> dalam riset, inovasi produk, dan komersialisasi serta promosi produk.
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, publikasi hasil riset, dan promosi produk inovatif lintas sektor. Platform ini terhubung dengan <i>marketplace</i> dan sistem pembelajaran berbasis daring.
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung	Adanyaa <i>Banten Innovation Expo and Festival</i> tahunan yang menjadi ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi produk unggulan. Setiap hasil riset terdokumentasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
		pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dan disebarluaskan melalui repositori riset dan inovasi daerah.
4	Budaya Riset dan Inovasi		
A	Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya budaya inovasi yang kuat melalui kampanye “Banten Inovatif dan Kreatif” di berbagai sektor. Setiap kegiatan ekonomi kreatif menonjolkan kolaborasi riset, inovasi teknologi, dan promosi serta branding produk unggulan dengan narasi budaya lokal hingga dapat dijual ke pasar global.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya sistem penghargaan berkelanjutan seperti <i>Banten Innovation Award for Creative Economy</i> , yang menilai inovasi produk, keberlanjutan bisnis, dan dampak sosial. Penghargaan ini menjadi agenda resmi daerah.
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya ekosistem startup berbasis riset dan teknologi kreatif melalui pembentukan inkubator bisnis daerah. Inkubator ini menghubungkan peneliti, investor lokal, dan mentor industri untuk mempercepat lahirnya <i>creative-tech startup</i> .
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan	Tersedianya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan	Adanya <i>Creative Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
	dan/atau teknologi masyarakat	pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	budaya. Bank pengetahuan ini digunakan sebagai sumber inspirasi riset dan inovasi modern berbasis lokalitas.
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi		
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersedianya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya prakarsa pengembangan riset dan inovasi ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset pangan, budaya, dan pariwisata. Prakarsa ini menjadi wujud upaya pengembangan PUD Ekonomi Kreatif berbasis dukungan ekosistem riset dan inovasi yang terarah.
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan klaster inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya <i>Creative Innovation Cluster</i> di tingkat daerah yang menyinergikan riset, produksi, teknologi, dan branding serta promosi PUD Ekonomi Kreatif. Klaster ini menjadi pusat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga riset, dan komunitas kreatif.
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersesuaiikannya kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya <i>policy alignment</i> yang efektif antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Setiap kebijakan pusat diadaptasi sesuai potensi lokal yang dimiliki Provinsi Banten, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif dan industri berbasis budaya.
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global		

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya kesadaran dan penerapan prinsip <i>green creative economy</i> dalam riset dan pengembangan PUD. Setiap inovasi daerah diarahkan untuk mengikuti standar yang ditentukan oleh global agar dapat bersaing dengan pasar internasional serta mendukung SDGs.
B	Penguatan kerjasama internasional	Terselenggaranya kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Adanya kerja sama internasional dengan lembaga riset, universitas, dan organisasi global (UNESCO, UNDP, ILO, ASEAN). Kolaborasi ini mendukung riset bersama, transfer teknologi, pembiayaan inovasi, dan pengakuan global bagi produk unggulan Banten.

### 3.3.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Diharapkan untuk Mendukung Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan di Provinsi Banten ke depan diarahkan untuk menjadi sistem pengetahuan yang terintegrasi dalam mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah. Riset dan inovasi diarahkan untuk menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka untuk mendorong percepatan penyelesaian permasalahan utama daerah, ekosistem riset dan inovasi diharapkan berfungsi sebagai penggerak utama yang memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan, daya saing regional, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten yang diharapkan untuk mendorong Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 26 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten yang Diharapkan untuk Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi		
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan menjadi acuan strategis dalam penyelesaian permasalahan utama daerah. Kebijakan ini menempatkan riset dan inovasi sebagai pendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme implementasi yang jelas.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya basis data yang kuat untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya database yang mampu menghimpun seluruh hasil riset, inovator, serta potensi wilayah berbasis <i>open innovation system</i> . Basis data ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ), dan mendukung sinkronisasi antara riset dengan kebijakan dan pembangunan berbasis data terbuka.
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung transformasi	Adanya hub di tingkat provinsi yang menghubungkan riset lintas sektor dengan fokus

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	pada inovasi untuk transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fasilitas riset dilengkapi dengan laboratorium, <i>innovation hub</i> , dan pusat data riset untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan daya saing daerah.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya alokasi anggaran riset yang memadai dengan <i>co-funding scheme</i> antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset. Anggaran difokuskan untuk mendanai riset terapan untuk peningkatan produktivitas wilayah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan dan mitigasi lingkungan.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk	Adanya layanan fasilitasi HKI tingkat daerah yang memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI. Meningkatnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan terhadap pentingnya HKI, baik di

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		peningkatan daya saing daerah	sektor inovasi sosial maupun teknologi untuk pengentasan permasalahan utama daerah.
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya jejaring riset daerah yang berkelanjutan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media ( <i>pentahelix</i> ). Forum ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan solusi inovatif untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya sarana riset dan inovasi yang memadai dan relevan, seperti pusat data ekonomi daerah, laboratorium kebijakan, serta pusat pelatihan inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal. Setiap fasilitas dirancang untuk mendukung riset terapan dalam rangka mengatasi isu ekonomi, sosial, dan lingkungan daerah.
3	Kemitraan Riset dan Inovasi		
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk	Adanya kemitraan riset lintas kelembagaan berbasis <i>collaborative</i>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<i>governance</i> , di mana lembaga riset, industri, dan pemerintah berperan aktif dalam proses inovasi. Setiap program riset diarahkan untuk menghasilkan kebijakan atau inovasi produk yang berdampak langsung pada masyarakat dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya sistem diseminasi berbasis platform digital yang menghubungkan peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui platform ini, inovasi sosial, teknologi tepat guna, dan model pembangunan berkelanjutan dapat diakses secara terbuka dan dimanfaatkan lintas sektor.
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk	Adanya sistem dokumentasi dan publikasi hasil riset melalui satu database yang terintegrasi. Setiap hasil riset diwajibkan untuk disebarluaskan melalui repositori riset dan inovasi daerah, dikembangkan, diadaptasi, dan diadopsi oleh lintas sektor, serta dipopulerkan melalui

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		peningkatan daya saing daerah	ajang seperti <i>innovation fair</i> dan forum riset dan inovasi daerah.
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>		
A	Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya budaya riset dan inovasi di semua lini pembangunan, ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam kegiatan riset dan inovasi. Kampanye publik “Banten Inovatif dan Kreatif” menjadi gerakan kolektif untuk menumbuhkan kesadaran inovatif di berbagai sektor.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya mekanisme penghargaan dan insentif untuk menghargai pelaku riset dan inovator daerah di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberian insentif diarahkan untuk menumbuhkan motivasi serta mengakui kontribusi inovasi terhadap pembangunan berkelanjutan.
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk	Adanya ekosistem pendukung seperti inkubator bisnis yang menjadi wadah untuk menghubungkan riset perguruan tinggi, pembiayaan, dan pelaku industri. Inovasi diarahkan untuk mentransformasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		peningkatan daya saing daerah	perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya bank pengetahuan sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan mempromosikan sumber inovasi sosial dan ekonomi yang memiliki potensi dalam mendorong daya saing daerah. Pengetahuan lokal dijadikan sumber inspirasi riset dan inovasi sosial berkelanjutan.
<b>5 Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>			
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersedianya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya prakarsa pengembangan riset dan inovasi ekonomi yang menempatkan riset sebagai alat utama dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Agenda ini menjadi pedoman integrasi riset lintas sektor dan fokus pada hasil terapan.
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi	Terselenggaranya pengembangan klaster inovasi untuk mendukung	Adanya <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menggabungkan riset sosial, ekonomi, dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas:</b>			
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
	berbasis produk unggulan daerah	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	lingkungan. Klaster ini memperkuat hubungan antara universitas, dunia usaha, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi dan inovasi kebijakan.
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersesuaiikannya kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan inovasi nasional diterjemahkan dalam konteks lokal Banten melalui <i>policy alignment</i> .
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global		
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya kebijakan daerah yang mendukung transformasi menuju <i>green economy</i> , <i>digital transformation</i> , dan <i>resilient society</i> . Banten berkomitmen mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam kebijakan riset dan inovasi untuk merespons dinamika global dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Kondisi yang Diharapkan
<b>Tema Prioritas: Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
B	Penguatan kerjasama internasional	Terselenggaranya kerjasama internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	Adanya jejaring riset internasional dengan lembaga global seperti UNDP, ADB, JICA, dan universitas mitra internasional. Kolaborasi ini mendukung pertukaran teknologi, pembiayaan inovasi hijau, dan penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah.

## BAB 4

### ANALISIS KESENJANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 4.1. Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Dengan membandingkan antara kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dengan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan, diperoleh analisis kesenjangan riset dan inovasi dan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, maka perlu dipetakan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, kemitraan riset dan inovasi, budaya riset dan inovasi, keterpaduan riset dan inovasi, dan keselarasan dengan perkembangan global yang mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.

##### *Elemen 1: Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi*

Untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan, diperlukan kerangka kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Namun demikian, berdasarkan pemetaan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan yang diharapkan, Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah kesenjangan yang signifikan, baik pada aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, data dan sistem informasi, maupun pada infrastruktur pendukung dan pendanaan riset dan inovasi.

Saat ini, kebijakan inovasi di Provinsi Banten diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Meskipun regulasi ini menjadi langkah awal penting, substansi pengaturannya belum mencakup secara menyeluruh aspek tata kelola riset dan inovasi, seperti mekanisme koordinasi kelembagaan, standarisasi metodologi riset daerah, hingga prosedur pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan publik. Idealnya, Banten perlu memiliki peraturan daerah (perda) khusus yang mengatur tata kelola riset dan inovasi secara komprehensif.

Selain itu, telah dilakukan kajian berupa *policy brief* tentang produk unggulan daerah pada tahun 2024, namun dokumen ini masih bersifat naskah kebijakan awal dan belum terlembagakan dalam bentuk regulasi. Kesenjangan yang tampak adalah belum adanya kebijakan yang tegas dan berbasis riset dalam penentuan produk unggulan daerah, meskipun bahan dasar risetnya sudah tersedia. Diperlukan pendampingan teknis dan advokasi agar hasil kajian tersebut dapat diadopsi menjadi kebijakan resmi.

Kapasitas SDM menjadi pondasi penting dalam pengembangan ekosistem riset. Namun saat ini belum tersedia program terstruktur di Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas SDM periset daerah. Idealnya, daerah memiliki program afirmatif dalam bentuk pendidikan lanjut (S2/S3), pelatihan riset, serta magang penelitian bagi ASN maupun masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Ketiadaan program ini menunjukkan adanya kesenjangan

yang serius, yang dapat mempengaruhi kualitas hasil riset serta rendahnya kompetensi dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan.

Kesenjangan selanjutnya terletak pada aspek tata kelola data. Hingga saat ini, belum tersedia *dashboard* rekomendasi kebijakan berbasis riset yang bisa digunakan oleh perangkat daerah. Padahal, sistem ini krusial untuk merangkum hasil-hasil riset dan menyediakan *insight* rekomendasi secara cepat bagi perumusan kebijakan sektoral. Selain itu, platform repositori untuk data mentah dan luaran riset daerah juga belum tersedia. Ketiadaan sistem digital ini membuat banyak luaran riset tidak terdokumentasikan secara baik, dan berpotensi hilang nilai manfaatnya. Padahal, di era digital, repositori berbasis platform digital interaktif menjadi alat utama dalam penyebarluasan pengetahuan dan advokasi berbasis bukti.

Dari sisi infrastruktur, Provinsi Banten telah memiliki layanan pengelolaan jurnal yang dikelola oleh unit RIDA Bappeda Provinsi Banten, yakni Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (sinta 5) serta perpustakaan daerah dan perpustakaan online Batupusaka. Namun layanan ini masih sangat terbatas dari segi jangkauan dan kapasitas. Idealnya, infrastruktur riset mencakup laboratorium kebijakan, laboratorium riset tematik, inkubator bisnis teknologi, serta pusat layanan pendampingan UMKM dan industri lokal. Belum adanya program pengembangan infrastruktur ini menunjukkan perlunya strategi investasi dan pemetaan kebutuhan laboratorium riset di seluruh wilayah Banten. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kegiatan riset akan sulit mencapai efektivitas, terutama dalam mengembangkan inovasi teknologi terapan.

Aspek pendanaan menjadi tantangan yang signifikan. Berdasarkan data, alokasi anggaran riset dan inovasi pada tahun 2024 sebesar  $\approx$ Rp3 miliar atau kurang dari 0,1% dari total APBD Provinsi Banten yang mencapai Rp12,36 triliun. Padahal, idealnya alokasi minimal berada di angka  $\geq$ 1% dari APBD agar riset dan inovasi bisa berlangsung secara optimal. Ketimpangan ini menunjukkan kesenjangan fiskal yang besar dan menjadi indikator lemahnya prioritas riset di tingkat anggaran daerah.

Selain dari APBD, informasi tentang sumber pendanaan riset dari sektor non-pemerintah (perguruan tinggi, industri, LSM, lembaga donor) juga belum terdokumentasi secara baik. Hal ini menyebabkan potensi kolaborasi dan pemanfaatan dana riset dari luar pemerintah menjadi tidak maksimal. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan inventarisasi dan sinkronisasi informasi pendanaan riset lintas sektor untuk mendukung kolaborasi antar berbagai lembaga riset dan inovasi.

Aspek kekayaan intelektual (KI) sebagai hasil dari aktivitas riset dan inovasi juga belum mendapatkan perhatian yang optimal. Saat ini belum tersedia Perda atau Pergub yang mengatur fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual daerah. Selain itu, belum ada layanan atau mekanisme insentif yang diberikan kepada inovator dan pekerja kreatif lokal, baik dalam bentuk bantuan pendaftaran hak cipta/paten, inkubasi paten, maupun penghargaan atas inovasi yang berdampak sosial atau ekonomi.

Padahal, di era ekonomi berbasis pengetahuan, perlindungan terhadap hasil cipta dan penemuan menjadi sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli

daerah dari royalti dan lisensi KI. Oleh karena itu, Banten perlu segera menyusun kebijakan afirmatif di bidang perlindungan kekayaan intelektual serta menyediakan layanan konsultasi, inkubasi, dan fasilitasi pendaftaran KI yang mudah diakses oleh masyarakat.

### *Elemen 2: Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi*

Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya dukung merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem riset dan inovasi daerah yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Di Provinsi Banten, meskipun telah terdapat berbagai inisiatif di tingkat perencanaan, realisasi kondisi kelembagaan dan daya dukung yang ideal masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam dua dimensi utama, yakni penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi daerah serta peningkatan daya dukung untuk kolaborasi dan insentif riset.

Kondisi aktual menunjukkan bahwa belum tersedia data dan informasi menyeluruh mengenai kelembagaan riset dan inovasi daerah. Informasi dasar seperti jumlah lembaga riset yang aktif, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia periset, serta bidang fokus masing-masing lembaga masih belum terdokumentasikan secara sistematis. Padahal, data tersebut penting sebagai dasar untuk perencanaan strategis, pemetaan kapasitas, dan penyusunan kebijakan berbasis potensi kelembagaan lokal.

Selain itu, koordinasi riset dan inovasi di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh unit RIDA (Riset dan Inovasi Daerah) di bawah Bappeda Provinsi Banten masih terfokus pada kerja sama dengan perguruan tinggi tertentu dan belum terhubung secara efektif dengan sektor industri, pelaku UMKM, maupun lembaga masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola kemitraan dan sinergi masih terbatas, serta belum mencerminkan pendekatan *pentahelix* yang menyatukan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas.

Idealnya, Bappeda Provinsi Banten melalui unit RIDA memiliki otoritas yang kuat secara struktur dan kelembagaan untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi lintas sektor. Artinya, RIDA seharusnya memiliki mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, serta kewenangan untuk menjalin kemitraan formal dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga riset independen, perangkat daerah, industri, dan UMKM. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, otoritas tersebut belum sepenuhnya terbentuk, baik secara legal formal maupun dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Hal ini menjadi kesenjangan utama yang harus segera dijawab melalui penguatan regulasi dan restrukturisasi kelembagaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riset dan inovasi lintas sektor.

Dalam aspek daya dukung, terdapat perkembangan positif berupa kerja sama riset antara Pemerintah Provinsi Banten dengan BRIN, perguruan tinggi, dan beberapa lembaga riset lainnya. Dalam lima tahun terakhir, terdapat 15 kerjasama riset dan 4 kerjasama riset dengan MoU/MoA/PKS. Ini menandakan adanya kesadaran dan kemauan pemerintah untuk membangun ekosistem riset

kolaboratif. Namun, kerja sama ini banyak yang belum terkelola dalam kerangka kelembagaan yang berkelanjutan.

Kondisi yang diharapkan adalah adanya insentif dan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banten bagi institusi atau individu yang terlibat aktif dalam kerja sama riset dan inovasi. Insentif kerjasama riset dan inovasi ini dapat berupa skema pendanaan bersama, fasilitasi publikasi, insentif pajak, hingga penghargaan tahunan untuk riset dan inovasi dengan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Sayangnya, saat ini belum tersedia skema insentif yang terstruktur maupun mekanisme pendukung lainnya untuk mendorong partisipasi multipihak dalam kegiatan riset dan inovasi daerah.

### *Elemen 3: Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi*

Kemitraan dalam riset dan inovasi menjadi aspek penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan dan kebutuhan nyata masyarakat. Provinsi Banten menunjukkan sejumlah inisiatif awal dalam membangun kemitraan strategis, tetapi masih terdapat kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kesenjangan ini mencakup tiga elemen utama, yakni penguatan kemitraan dengan target pengguna, diseminasi hasil riset, serta peningkatan difusi inovasi di daerah.

Secara aktual, Bappeda Provinsi Banten telah menjalin kerja sama riset dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (perangkat daerah) sesuai lingkup riset yang ditugaskan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relasi fungsional antara hasil riset dan kebutuhan kebijakan perangkat daerah. Namun, bentuk kemitraan ini masih terbatas pada lingkup internal pemerintah provinsi. Belum ada pola kerja sama yang menyeluruh dengan mitra eksternal seperti pelaku industri, UMKM, BUMD, BUMDes, dan komunitas usaha lainnya.

Kondisi yang diharapkan adalah terbentuknya kemitraan pemerintah dan masyarakat dengan berbagai mitra eksternal, khususnya sektor swasta dan komunitas inovatif lokal. Hal ini mencerminkan prinsip *pentahelix* yang mengintegrasikan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Sayangnya, kondisi saat ini belum mencerminkan bentuk kolaborasi lintas sektor secara optimal. Oleh karena itu, kesenjangan yang terjadi ialah belum adanya kerangka kerja kolaboratif formal dengan mitra non-pemerintah, yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam akselerasi inovasi daerah.

Pada elemen diseminasi hasil riset ke target pengguna, Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan diseminasi seluruh naskah kebijakan hasil riset kepada perangkat daerah yang menjadi target pengguna. Artinya, ada mekanisme awal yang mendukung penggunaan hasil riset dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan daerah. Namun, diseminasi tersebut masih terbatas pada lingkup administratif dan belum menjangkau pemangku kepentingan non-pemerintah yang juga relevan dengan substansi riset.

Di sisi lain, belum terdapat program pendampingan lisensi paten dan alih teknologi bagi mitra UMKM, BUMD, BUMDes, maupun pelaku usaha lainnya. Padahal, perlindungan kekayaan intelektual dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru merupakan kunci keberhasilan inovasi dalam dunia usaha. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa meskipun hasil riset mulai disalurkan, belum ada ekosistem pendampingan yang mendukung

pemanfaatan hasil riset secara luas di tingkat pengguna nyata, terutama pada sektor ekonomi produktif.

Difusi inovasi menjadi indikator penting dari keberhasilan riset terapan. Saat ini, pendampingan untuk menyalurkan hasil riset ke dalam kebijakan sudah dilakukan, namun masih bersifat insidental dan sangat bergantung pada inisiatif individu atau perangkat daerah terkait. Belum ada skema pendampingan yang bersifat sistematis, terlembagakan, dan memiliki payung hukum atau kebijakan yang jelas.

Kondisi yang diharapkan adalah adanya mekanisme formal dan terstruktur dalam mendampingi hasil riset agar dapat terimplementasi dalam kebijakan maupun diterapkan di tingkat masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun klinik inovasi telah tersedia sebagai wadah pembelajaran, fungsinya belum optimal. Klinik ini masih perlu diperkuat secara kelembagaan, ditingkatkan kapasitasnya, serta diperluas jangkauannya agar dapat menjadi pusat pengembangan inovasi daerah yang efektif.

#### *Elemen 4: Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi*

Budaya riset dan inovasi merupakan pondasi penting dalam membentuk ekosistem pembangunan berbasis pengetahuan. Provinsi Banten sebagai wilayah yang tengah berkembang memiliki potensi besar untuk mengembangkan budaya tersebut. Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam tiga elemen utama, yakni promosi dan kampanye riset-inovasi, apresiasi terhadap prestasi riset, dan pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Keterlibatan generasi muda dalam riset dan inovasi seharusnya dimulai sejak dini, melalui pendidikan formal di jenjang SMA/SMK. Sayangnya, Provinsi Banten belum memasukkan mata pelajaran terkait penelitian dasar, metode riset, serta kewirausahaan/inovasi berbasis kekhasan daerah ke dalam kurikulum muatan lokal. Saat ini, pembelajaran mengenai penelitian dan riset hanya terbatas pada program ekstrakurikuler, dan kewirausahaan/inovasi berbasis kekhasan daerah belum sepenuhnya menjadi bagian penting dalam mata ajar ekonomi, sehingga tidak terstruktur secara sistematis dan tidak menjangkau seluruh siswa.

Lebih lanjut, belum tersedia forum atau platform komunikasi yang menghubungkan Bappeda dengan industri, UMKM, BUMD, BUMDes, serta pelaku usaha lainnya dalam konteks pengumpulan kebutuhan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Ketiadaan wadah diskusi ini menciptakan jurang antara pihak perencana kebijakan dengan pelaku lapangan yang seharusnya menjadi pengguna atau inspirator utama dari hasil riset dan inovasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa promosi riset dan inovasi belum menjadi gerakan kolektif yang terintegrasi antara dunia pendidikan, birokrasi, dan sektor usaha, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi masih rendah dan bersifat parsial.

Salah satu indikator tumbuhnya budaya riset adalah adanya sistem penghargaan dan pengakuan terhadap insan periset. Di Provinsi Banten, sudah terdapat skema insentif atau apresiasi untuk SDM periset yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional maupun internasional,

namun baru sebatas insentif bagi periset yang mempublikasikan khusus di jurnal JKPD dan belum tersistemasi secara masif untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi. Akibatnya, motivasi untuk menghasilkan publikasi bermutu dan berkontribusi pada kemajuan daerah menjadi belum terbangun secara optimal.

Di tingkat pelajar, kompetisi Karya Ilmiah Remaja (KIR) sebagai ajang pembinaan kreativitas dan nalar ilmiah sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Hal ini tentu menjadi peluang besar dalam membangun pondasi riset sejak usia sekolah di Provinsi Banten. Selain itu, sudah terdapat beberapa ajang festival/lomba inovasi di lingkungan Provinsi Banten, seperti Gelar Teknologi Tepat Guna setiap tahun oleh Dinas Pemdes Provinsi Banten, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dan Lomba Cipta Inovasi oleh Bappeda Provinsi Banten. Namun demikian, masih diperlukan penguatan konsep dan strategi pengelolaan festival/lomba agar dapat benar-benar menjadi ruang apresiasi yang layak. Ajang semacam ini dapat menjadi pemicu lahirnya inovator dari kalangan masyarakat dan non-akademisi. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa budaya apresiatif terhadap pencapaian riset dan inovasi belum berkembang di Provinsi Banten, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi pelibatan masyarakat.

Inkubasi bisnis dan pelatihan manajemen berbasis teknologi juga menjadi instrumen penting dalam menjembatani riset dengan komersialisasi produk. Sayangnya, data mengenai perusahaan pemula di Banten yang terlibat dalam program inkubasi atau pelatihan berbasis riset tidak tersedia secara terbuka dan sistematis. Meskipun kemungkinan ada pelaku startup yang terlibat dalam program-program tersebut, ketiadaan data menjadi tantangan dalam mengukur efektivitas dukungan pemerintah daerah terhadap ekosistem kewirausahaan inovatif.

Padahal, perusahaan pemula berbasis riset merupakan elemen vital dalam membangun ekonomi baru berbasis inovasi (*innovation-driven economy*). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi hasil riset menjadi solusi ekonomi nyata masih belum menjadi perhatian serius, baik dalam konteks perencanaan kebijakan maupun program pengembangan baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan, maupun alokasi penganggaran.

#### *Elemen 5: Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi*

Keterpaduan dalam riset dan inovasi merupakan prasyarat utama untuk mendorong kebijakan berbasis bukti, menjamin efektivitas pembangunan, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis. Di Provinsi Banten, keterpaduan ini mencakup aspek data dan informasi serta koordinasi lintas pemerintahan yang mencakup kesinambungan dukungan teknis antar-tingkatan pemerintah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan masih terdapat berbagai kesenjangan antara apa yang telah dilakukan dengan kondisi yang diharapkan.

Provinsi Banten telah menyusun data dan informasi yang merujuk pada isu strategis dalam RPJMD, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan BRIN No.

5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah. Ini merupakan capaian awal yang penting dalam membingkai riset daerah dalam konteks pembangunan yang terarah. Namun demikian, kondisi yang diharapkan lebih dari sekadar pelacakan isu strategis. Provinsi Banten perlu memiliki data dan informasi mengenai prioritas kebutuhan kebijakan yang mendesak untuk didukung oleh riset dan inovasi, guna mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Kesenjangan utama yang terjadi adalah belum adanya database yang berisi evaluasi efektivitas kebijakan (perda/pergub), termasuk urgensi pembaharuan regulasi jika dinilai sudah tidak relevan, usang, atau tidak selaras dengan dinamika pembangunan. Database ini seharusnya menjadi bagian integral dalam sistem informasi riset daerah sebagai dasar prioritisasi isu-isu yang memerlukan perhatian riset secara mendalam.

Selain itu, perlu diperluas cakupan data hingga mencakup prioritas permasalahan pembangunan yang mendesak, termasuk persoalan-persoalan yang membutuhkan solusi cepat dan tindak lanjut lintas sektor. Tanpa basis data yang komprehensif, arah riset dan inovasi rentan tidak sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Banten juga telah menyelenggarakan kajian PUD yang menghasilkan *policy brief*. Namun, kajian tersebut belum diikuti dengan pendampingan yang memadai untuk mengawal rekomendasi riset menjadi kebijakan konkret. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya mekanisme yang berkelanjutan dalam mendampingi produk riset hingga ke tahap formulasi dan implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan PUD sebagai penopang ekonomi lokal.

Koordinasi riset dan inovasi lintas pemerintahan juga merupakan elemen penting untuk memastikan sinergi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Saat ini, Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah setiap tahun, yang menjadi ajang konsolidasi awal antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Namun, forum ini belum sepenuhnya menjembatani koordinasi secara vertikal maupun horizontal dalam struktur pemerintahan.

Kondisi yang diharapkan adalah terbentuknya platform atau forum koordinatif lintas pemerintah, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Forum ini bisa berbentuk lokakarya tematik, pertemuan teknis lintas sektor, atau mekanisme penugasan yang bersifat kolaboratif. Sayangnya, hingga kini belum terdapat wadah formal yang menyelaraskan rencana riset daerah dengan arah kebijakan pusat maupun kebutuhan kabupaten/kota. Akibatnya, potensi duplikasi program, tumpang tindih kegiatan, atau bahkan kesenjangan dalam pemanfaatan hasil riset menjadi hal yang sulit dihindari.

Salah satu langkah positif yang sudah dilakukan adalah Forum Kelitbangan Provinsi Banten, yang dilaksanakan setiap tahun. Forum ini juga menjadi medium untuk menyampaikan hasil kajian riset. Namun, dalam konteks pembinaan teknis, meskipun Bappeda Provinsi telah melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota, kapasitas pembinaan ini dinilai masih perlu diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia, modul

pelatihan, maupun perangkat regulasi dan anggaran yang mendukung keberlanjutan kegiatan tersebut.

#### *Elemen 6: Analisis Kesenjangan Keselarasan dengan Perkembangan Global*

Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital yang kian pesat, riset dan inovasi di tingkat daerah dituntut untuk tidak hanya bersifat lokal dan sektoral, tetapi juga selaras dengan dinamika isu nasional dan global. Keselarasan ini menjadi penting agar hasil riset yang dihasilkan mampu menjawab tantangan kontemporer dan mendukung posisi daya saing daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, Provinsi Banten masih menghadapi berbagai kesenjangan struktural dan fungsional dalam mewujudkan keselarasan tersebut, sebagaimana tercermin dalam dua elemen utama, yakni peningkatan kepedulian isu riset dan inovasi serta peningkatan peran masyarakat terhadap isu riset dan inovasi.

Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kepedulian terhadap isu global telah dilakukan melalui pelaksanaan seminar internal untuk proposal riset, hasil riset, dan naskah kebijakan, dengan melibatkan penguji dari kalangan ahli eksternal sesuai bidangnya. Praktik ini merupakan langkah awal yang positif dalam menumbuhkan budaya evaluatif dan meningkatkan kualitas produk riset di tingkat internal pemerintah. Namun, kesenjangan muncul karena belum adanya mekanisme pemeriksaan substansi dan kualitas ilmiah yang sistematis dan terstandarisasi untuk setiap laporan hasil litbang dan naskah kebijakan. Tanpa pemeriksaan substansi yang komprehensif, kualitas hasil riset rentan terhadap inkonsistensi, bias, atau kekurangakuratan data, yang pada akhirnya dapat melemahkan relevansi riset terhadap isu-isu strategis nasional dan global.

Selain itu, saat ini hanya tersedia SOP (*Standard Operating Procedure*) litbang yang sudah lama dan belum diperbarui, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dinamika riset dan inovasi kontemporer. SOP tersebut tidak diiringi dengan keberadaan kode etik ilmiah yang seharusnya menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh proses riset dan inovasi. Ketiadaan kode etik ini menciptakan ruang abu-abu dalam proses riset, mulai dari perumusan masalah hingga penyampaian hasil, termasuk dalam aspek integritas data, konflik kepentingan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya mekanisme evaluasi kualitas substansi secara menyeluruh, serta adanya dokumen kode etik ilmiah yang disusun secara partisipatif dan kontekstual dengan kondisi daerah. Dengan demikian, riset dan inovasi di Provinsi Banten dapat berkembang sebagai kegiatan yang bertanggung jawab, bermutu, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Keterlibatan masyarakat dalam proses riset dan inovasi merupakan elemen penting dari ekosistem riset dan inovasi yang demokratis dan inklusif. Namun, di Provinsi Banten, peran lembaga riset non-pemerintah dan non-perguruan tinggi masih belum terpetakan dengan baik. Meskipun kemungkinan besar terdapat berbagai inisiatif dan aktivitas riset yang dilakukan oleh komunitas, LSM, perusahaan, maupun individu independen, data dan informasi terkait keberadaan, kualifikasi, serta bidang kepakaran SDM periset

di luar struktur formal pemerintah dan perguruan tinggi belum tersedia secara sistematis.

Kondisi yang diharapkan adalah adanya database pemetaan lembaga riset non-pemerintah dan non-perguruan tinggi, termasuk jumlah lembaga, sebaran wilayah, kualifikasi sumber daya manusia, serta bidang keahlian yang mereka tekuni. Basis data ini sangat penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor dan menjangkau potensi inovasi yang berkembang di luar struktur birokratis dan akademik konvensional. Dengan informasi yang terstruktur dan terverifikasi, pemerintah daerah dapat merancang strategi sinergi yang lebih inklusif dan memastikan bahwa kontribusi lembaga-lembaga tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem inovasi daerah secara optimal.

Selain ketiadaan database, forum komunikasi atau ruang diskusi untuk menyambungkan para pelaku riset non-pemerintah dan non-perguruan tinggi dengan pembuat kebijakan juga belum tersedia. Padahal, keberadaan platform seperti lokakarya, temu diskusi, atau forum konsultatif terbuka akan memberikan ruang saling tukar gagasan, mengelaborasi kebutuhan riset lokal, serta menciptakan jembatan antara ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat sipil. Dengan kata lain, tanpa data dan platform kolaboratif, keterlibatan masyarakat dalam riset hanya akan berjalan sporadis dan tidak terlembagakan, sehingga melemahkan potensi demokratisasi inovasi di tingkat daerah.

#### 4.2. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Analisis kesenjangan riset dan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi jarak antara kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dengan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan guna mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif. Analisis ini menjadi langkah penting untuk memahami di mana titik kelemahan struktural, institusional, maupun fungsional yang perlu segera diperkuat agar riset dan inovasi dapat berperan lebih efektif dalam mendorong daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat berbagai kesenjangan yang signifikan dalam enam elemen utama ekosistem riset dan inovasi, mulai dari aspek kebijakan dan infrastruktur riset dan inova, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inova, kemitraan riset dan inova, budaya riset dan inova, keterpaduan riset dan inova, hingga keselarasan dengan perkembangan global.

Tabel 26 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten untuk Mengembangkan Produk Unggulan Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
1	<b>Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi</b>			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan daerah belum mengakomodir pengembangan riset dan inovasi, serta belum terintegrasi dalam kerangka ekonomi kreatif. Insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku riset dan inovasi belum diarahkan pada pengembangan PUD di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Diperlukan kebijakan khusus yang menjadikan PUD Ekonomi Kreatif sebagai prioritas lintas sektor berbasis inovasi.	Adanya kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi yang berpihak pada pengembangan PUD Ekonomi Kreatif melalui regulasi, insentif, dan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah daerah memiliki <i>policy framework</i> yang menempatkan ekosistem riset dan inovasi sebagai pilar utama pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.	Belum ada regulasi payung yang menjadikan riset dan inovasi sebagai basis pengembangan PUD Ekonomi Kreatif dan mekanisme insentif belum terbangun.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data riset dan inovasi masih tersebar di berbagai dinas dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang memuat	Adanya <i>Creative Innovation Database</i> terpadu yang mengintegrasikan data riset, inovator, industri, pelaku usaha, dan produk unggulan.	Belum tersedia sistem data terintegrasi yang memetakan inovator, produk unggulan, dan jejaring riset untuk pengambilan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		informasi lintas sektor. Data produksi, pasar, dan pelaku ekonomi kreatif belum dikembangkan menjadi basis pengetahuan daerah. Diperlukan <i>Creative Innovation Database</i> yang dapat menghubungkan kebutuhan riset, pengembangan rantai nilai produk unggulan, dan pelaku usaha ekonomi kreatif di seluruh Banten.	Sistem ini menjadi sumber rujukan kebijakan, kolaborasi, dan promosi inovasi daerah berbasis <i>open innovation system</i> .	keputusan berbasis bukti.
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Infrastruktur riset masih terbatas, baik laboratorium, pusat inovasi, maupun fasilitas pelatihan. Belum ada <i>Creative Innovation Hub</i> yang menjadi wadah riset lintas sektor. Pusat riset tematik untuk perkebunan, perikanan, peternakan, dan	Adanya <i>Creative Innovation Hub</i> di setiap klaster ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset, perencanaan, produksi, dan promosi. Setiap <i>hub</i> dilengkapi dengan <i>creative labs, maker space</i> , dan pusat pelatihan digital yang inklusif bagi	Minimnya infrastruktur riset dan inovasi yang mampu menjembatani hulu-hilir inovasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		pariwisata belum terhubung. Penguatan infrastruktur perlu diarahkan pada <i>creative labs</i> dan <i>maker space</i> untuk mendukung inovasi PUD Ekonomi Kreatif.	UMKM dan komunitas kreatif.	
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran riset daerah masih kecil dan tidak konsisten. Skema pendanaan masih terbagi per sektor, tanpa mekanisme pendanaan kolaboratif lintas sektor untuk ekonomi kreatif. Belum ada <i>research and innovation matching fund</i> antara pemerintah, industri, dan lembaga riset yang berfokus pada hilirisasi produk unggulan daerah.	Adanya mekanisme pendanaan inovatif berbasis kolaborasi ( <i>co-funding scheme</i> ) antara pemerintah, industri, dan lembaga riset, termasuk <i>matching fund</i> dan dana abadi inovasi. Proporsi APBD untuk riset meningkat dengan fokus pada hilirisasi dan komersialisasi hasil riset ekonomi kreatif.	Belum ada skema pembiayaan kolaboratif dan insentif fiskal bagi riset terapan dan hilirisasi PUD Ekonomi Kreatif.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih rendah di seluruh sektor, baik untuk	Adanya layanan fasilitasi HKI di tingkat daerah yang memberikan layanan konsultasi,	Rendahnya kesadaran pelaku inovasi dalam melakukan pendaftaran dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
	kekayaan intelektual	produk di hulu hingga hilir maupun inovasi teknologi. Proses pendaftaran merek dan indikasi geografis masih belum optimal. Diperlukan pusat fasilitasi layanan HKI daerah berbasis ekonomi kreatif untuk memfasilitasi merek, desain, dan inovasi lokal secara terpadu.	pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI. Kesadaran pelaku usaha terhadap nilai ekonomi HKI meningkat, dan PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten terdaftar sebagai indikasi geografis dan merek dagang nasional dengan target yang dapat menjangkau ke pasar global.	pemanfaatan HKI serta belum adanya layanan fasilitasi HKI di tingkat daerah yang memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI.
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi lintas lembaga masih bersifat informal dan belum menghasilkan inovasi nyata lintas sektor. Bappeda, dinas teknis, dan perguruan tinggi belum memiliki mekanisme kolaborasi permanen untuk riset berbasis kebutuhan ekonomi kreatif. Diperlukan forum <i>Creative Innovation Council</i> yang menyinergikan	Adanya <i>Creative Innovation Council</i> yang menjadi wadah koordinasi permanen antara Bappeda, dinas terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Forum ini berfungsi mengawal kebijakan inovasi, dan mengkoordinasikan hasil riset untuk pengembangan industri kreatif.	Belum ada mekanisme kolaborasi permanen yang dapat mempertemukan lintas aktor untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		riset dan pengembangan industri kreatif.		
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas riset seperti laboratorium mutu, pusat pelatihan, dan kebun percobaan belum diarahkan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif. Akses pelaku UMKM terhadap fasilitas inovasi seperti inkubator bisnis masih terbatas. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) masih belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.	Adanya jaringan <i>shared facility</i> dan <i>techno-creative center</i> yang menyediakan akses riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup. PLUT diperkuat menjadi pusat layanan inovasi terpadu yang mampu menghubungkan riset, teknologi, inovasi produk, dan UMKM, dengan pasar.	Terbatasnya fasilitas pelatihan, riset, dan inkubasi untuk UMKM dan startup berbasis inovasi. PLUT belum menjadi wadah <i>techno-creative center</i> yang mampu menghubungkan riset, inovasi produk, teknologi, dan UMKM, dengan pasar.
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan antar peneliti, pelaku usaha, dan komunitas kreatif masih bersifat sporadis dan tidak berorientasi pada kolaborasi jangka panjang. Perlu dibangun model kemitraan inovatif yang	Adanya kemitraan jangka panjang berbasis <i>pentahelix</i> dengan melibatkan akademisi, pemerintah, industri dan pelaku usaha, komunitas, dan media. Pelaku ekonomi kreatif berperan aktif	Kemitraan belum memiliki kontrak yang berkelanjutan serta model bisnis dan inovasi yang disepakati bersama.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		melibatkan pelaku ekonomi kreatif sebagai <i>co-creator</i> dalam proses riset dan komersialisasi produk.	sebagai <i>co-creator</i> dalam riset, inovasi produk, dan komersialisasi serta promosi produk.	
B	Peningkatan difusi inovasi	Difusi inovasi masih bergantung pada penyuluhan konvensional dan pameran tematik, tanpa dukungan platform digital yang berkelanjutan. Diperlukan platform digital sebagai kanal daring untuk menyebarkan informasi mengenai keberhasilan inovasi industri ekonomi kreatif, hasil riset, dan peluang kemitraan lintas sektor. Kanal tersebut harus dapat mudah diakses oleh masyarakat luas.	Adanya platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, publikasi hasil riset, peluang kemitraan, dan promosi produk inovatif lintas sektor. Platform ini terhubung dengan <i>marketplace</i> dan sistem pembelajaran daring.	Belum ada kanal daring untuk publikasi hasil riset, berbagi pengetahuan, dan promosi produk kreatif lintas sektor.
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan	Hasil riset dari berbagai sektor belum dikemas dalam format yang mudah dipahami oleh	Adanya <i>Banten Innovation Expo and Festival</i> tahunan yang menjadi ajang pameran riset,	Minimnya wadah tetap untuk temu inovator, dan penyebaran hasil riset, dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
	inovasi kepada pelaku inovasi	pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan promosi inovasi daerah seperti pameran, festival, dan forum riset belum terintegrasi dalam satu agenda tahunan ekonomi kreatif, sehingga perlu direncanakan.	temu inovator, dan promosi produk unggulan. Setiap hasil riset terdokumentasi dan disebarluaskan melalui repositori riset dan inovasi daerah.	promosi produk unggulan serta belum adanya repositori riset dan inovasi daerah.
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>			
A	Promosi dan kampanye inovasi	Budaya inovasi belum melekat di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan festival seperti Festival Kopi Banten, Festival Bandeng, dan Banten Lama Heritage Week lebih menonjolkan sisi <i>entertain</i> daripada inovasi. Diperlukan kampanye inovasi terpadu dengan pesan edukatif yang menonjolkan kolaborasi riset, inovasi teknologi, dan branding produk unggulan dan budaya lokal untuk dapat	Adanya budaya inovasi yang kuat melalui kampanye “Banten Inovatif dan Kreatif” di berbagai sektor. Setiap kegiatan ekonomi kreatif menonjolkan kolaborasi riset, inovasi teknologi, dan promosi serta branding produk unggulan dengan narasi budaya lokal hingga dapat dijual ke pasar global.	Inovasi belum menjadi identitas sosial yang kuat dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif. Kegiatan masih berorientasi <i>entertain</i> , bukan transformasi pengetahuan.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		dijual ke pasar global.		
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan daerah masih menitikberatkan pada skala usaha dan omzet, bukan kontribusi dalam inovasi produk, model bisnis, atau keberlanjutan. Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maupun Lomba Cipta Inovasi belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Perlu sistem apresiasi prestasi inovasi seperti <i>Banten Innovation Award for Creative Economy</i> .	Adanya sistem penghargaan berkelanjutan seperti <i>Banten Innovation Award for Creative Economy</i> , yang menilai inovasi produk, keberlanjutan bisnis, dan dampak sosial. Penghargaan ini menjadi agenda tahunan resmi daerah.	Belum ada instrumen insentif berbasis hasil inovasi serta sistem penghargaan berkelanjutan yang menilai inovasi produk, keberlanjutan bisnis, dan dampak sosial.
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan rintisan (startup) di Banten masih didominasi bidang perdagangan dan pemasaran, belum banyak	Adanya ekosistem startup berbasis riset dan teknologi kreatif melalui penguatan PLUT sebagai inkubator bisnis daerah. Inkubator ini	Belum ada ekosistem startup berbasis riset dan teknologi kreatif yang optimal dalam mendukung

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		yang berbasis teknologi riset. Inkubator bisnis untuk industri ekonomi kreatif masih minim. Diperlukan inkubator bisnis yang menghubungkan riset terapan, teknologi digital, dan model bisnis kreatif.	menghubungkan peneliti, investor lokal, dan mentor industri untuk mempercepat lahirnya <i>creative-tech startup</i> .	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kearifan lokal seperti teknik pengolahan kopi, fermentasi bandeng, olahan daging kambing khas Banten, dan narasi budaya Banten Lama belum terdokumentasi secara sistematis. Diperlukan program <i>Creative Knowledge Bank</i> untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan teknologi lokal ke dalam inovasi modern.	Adanya <i>Creative Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya. Bank pengetahuan ini digunakan sebagai sumber inspirasi riset dan inovasi modern berbasis lokalitas.	Belum ada sistem inventarisasi pengetahuan tradisional dan teknologi lokal dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.
5	<b>Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>			
A	Prakarsa pengembangan riset dan	Agenda riset daerah masih terfragmentasi	Adanya prakarsa pengembangan riset dan inovasi	Belum ada prakarsa pengembangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
	inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	dan reaktif terhadap program nasional. Belum ada prakarsa pengembangan riset dan inovasi ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset pangan, budaya, dan pariwisata. Diperlukan pengembangan PUD Ekonomi Kreatif berbasis dukungan ekosistem riset dan inovasi yang terarah.	ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset pangan, budaya, dan pariwisata. Prakarsa ini menjadi wujud upaya pengembangan PUD Ekonomi Kreatif berbasis dukungan ekosistem riset dan inovasi yang terarah.	riset dan inovasi ekonomi kreatif yang mengintegrasikan riset pangan, budaya, dan pariwisata.
B	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kluster inovasi PUD Ekonomi Kreatif masih belum berkembang dan masih terfragmentasi. Diperlukan <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menghubungkan riset, produksi, teknologi, dan branding serta promosi PUD Ekonomi Kreatif (perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata).	Adanya <i>Creative Innovation Cluster</i> di tingkat daerah yang menyinergikan riset, produksi, teknologi, dan branding serta promosi PUD Ekonomi Kreatif. Kluster ini menjadi pusat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga riset, lembaga donor, dan komunitas kreatif.	Belum ada kluster inovasi yang dapat menghubungkan riset, produksi, teknologi, dan branding serta promosi PUD Ekonomi Kreatif.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal. Banyak inisiatif nasional (Kementan, KKP, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemendag) yang belum diadaptasi oleh perangkat daerah sesuai kebutuhan lokal. Diperlukan <i>policy alignment</i> agar ekonomi kreatif menjadi agenda bersama lintas level pemerintahan.	Adanya <i>policy alignment</i> yang efektif antara kebijakan nasional dan daerah. Setiap kebijakan pusat diadaptasi sesuai potensi lokal Banten, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif dan industri berbasis budaya.	Belum ada mekanisme penyalarsan agenda kebijakan nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal.
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Kesadaran terhadap tren global seperti ekonomi hijau, digitalisasi, dan keberlanjutan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif masih terbatas. Perlu pengarusutamaan <i>green creative economy</i> dan <i>sustainable tourism</i> dalam pengembangan ekosistem riset	Adanya kesadaran dan penerapan prinsip <i>green creative economy</i> dalam riset dan pengembangan PUD. Setiap inovasi daerah diarahkan untuk mengikuti standar yang ditentukan oleh global seperti SDGs dan Paris Agreement agar produk unggulan dapat masuk dan bersaing di pasar internasional.	Belum ada strategi konkret untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan global ke dalam program riset dan ekonomi kreatif daerah.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>				
		dan inovasi daerah.		
B	Penguatan kerjasama internasional	Keterlibatan lembaga riset dan pelaku ekonomi kreatif dalam jejaring internasional masih rendah. Perlu pengembangan kerja sama riset dan perdagangan dengan lembaga global seperti UNESCO, UNDP, dan ILO untuk memperluas jejaring dan transfer teknologi.	Adanya kerja sama internasional dengan lembaga riset, universitas, dan organisasi global (UNESCO, UNDP, ILO, ASEAN). Kolaborasi ini mendukung transfer teknologi, pembiayaan inovasi, dan pengakuan global bagi produk unggulan Banten.	Terbatasnya kemampuan dan infrastruktur kelembagaan untuk menjalin kerja sama global dan memanfaatkan peluang kolaborasi internasional.

#### 4.3. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Analisis kesenjangan riset dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah di Provinsi Banten dilakukan untuk mengidentifikasi ruang-ruang strategis yang perlu diperkuat agar ekosistem riset dan inovasi dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Kesenjangan ini menggambarkan *gap* yang terjadi antara kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dengan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan utama di Provinsi Banten, untuk kemudian dapat dirumuskan strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi yang dibutuhkan serta peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi,

Riset dan inovasi yang diharapkan menjadi instrumen utama dalam menjawab enam permasalahan pokok pembangunan daerah, yakni peningkatan produktivitas ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, yang dalam hal ini masih menghadapi berbagai hambatan

struktural dan fungsional di lapangan. Adapun rincian analisis kesenjangan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 27 Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten untuk Menyelesaikan Permasalahan Utama Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
1	<b>Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi</b>			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi daerah belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menempatkan riset dan inovasi sebagai instrumen utama penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.	Adanya kebijakan daerah berbasis riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan menjadi acuan strategis dalam penyelesaian permasalahan utama daerah. Kebijakan ini menempatkan riset dan inovasi sebagai pendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme implementasi yang jelas.	Belum adanya regulasi komprehensif yang menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan daerah. Kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan administratif tanpa arah strategis yang mengaitkan riset dengan pemecahan masalah daerah dan daya saing daerah.
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data riset dan inovasi masih tersebar di berbagai perangkat daerah dan belum diintegrasikan dalam satu sistem pengetahuan	Adanya database yang mampu menghimpun seluruh hasil riset, inovator, serta potensi wilayah berbasis <i>open innovation system</i> . Basis data ini	Belum adanya database yang menghimpun seluruh hasil riset, inovator, serta potensi wilayah berbasis <i>open innovation</i>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		daerah. Keterbatasan interoperabilitas data menyebabkan hasil riset tidak termanfaatkan optimal untuk perencanaan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ).	menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ), dan mendukung sinkronisasi antara riset dengan kebijakan dan pembangunan berbasis data terbuka.	<i>system</i> . Fragmentasi data menghambat perencanaan pembangunan berbasis bukti serta sinergi riset dan inovasi antar-sektor.
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Infrastruktur riset seperti laboratorium, <i>innovation hub</i> , dan pusat data riset masih minim dan tersebar. Belum ada pusat inovasi terpadu yang menghubungkan riset sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan daya saing daerah.	Adanya hub di tingkat provinsi yang menghubungkan riset lintas sektor dengan fokus pada inovasi untuk transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fasilitas riset dilengkapi dengan laboratorium, <i>innovation hub</i> , dan pusat data riset untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan daya saing daerah.	Infrastruktur riset yang tersebar tanpa konektivitas antarlembaga menyebabkan efisiensi rendah dan duplikasi fungsi. Belum adanya <i>innovation hub</i> terpadu menghambat hilirisasi riset dan kolaborasi multidisiplin.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran daerah untuk riset dan inovasi masih rendah, belum mencapai proporsi ideal terhadap APBD,	Adanya alokasi anggaran riset yang memadai dengan <i>co-funding scheme</i> antara pemerintah, dunia usaha, dan	Alokasi anggaran riset masih jauh di bawah standar nasional, dan belum menerapkan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		serta belum menerapkan skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset.	lembaga riset. Anggaran difokuskan untuk mendanai riset terapan untuk peningkatan produktivitas wilayah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan dan mitigasi lingkungan.	skema co-funding dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini menghambat inovasi terapan serta membatasi ruang eksperimen kebijakan berbasis riset.
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan dan pemanfaatan HKI masih lemah, baik di sektor ekonomi kreatif, inovasi sosial, maupun teknologi ramah lingkungan. Banyak hasil riset yang belum didaftarkan, dan kesadaran pelaku inovasi terhadap nilai ekonomi HKI masih rendah.	Adanya layanan fasilitasi HKI tingkat daerah yang memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran HKI, paten, desain industri, dan indikasi geografis baik di sektor	Kesadaran terhadap nilai ekonomi HKI masih rendah dan belum ada sistem pendampingan formal. Ketiadaan layanan fasilitasi HKI di daerah membuat banyak potensi hasil riset tidak terkomersialisasi dan termanfaatkan serta kehilangan nilai

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
			ekonomi kreatif, inovasi sosial, maupun teknologi ramah lingkungan.	tambah ekonomi untuk mendorong daya saing daerah.
2	Kapabilitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat masih bersifat insidental. Belum terbentuk forum atau jejaring inovasi daerah yang mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.	Adanya jejaring riset daerah yang berkelanjutan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media ( <i>pentahelix</i> ). Forum ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan solusi inovatif untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.	Keterlibatan unsur pentahelix masih lemah dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat belum menjadi sistem berkelanjutan. Belum ada forum yang memastikan keberlanjutan kelembagaan yang konkret untuk membangun kolaborasi jangka panjang.
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana riset yang ada masih terbatas dan belum relevan dengan kebutuhan pembangunan lintas sektor. Fasilitas riset untuk	Adanya sarana riset dan inovasi yang memadai dan relevan, seperti pusat data ekonomi daerah, laboratorium sosial, serta pusat pelatihan inovasi yang terintegrasi	sarana riset dan inovasi menyebabkan riset di daerah sulit menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Belum ada fasilitas untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		peningkatan produktivitas ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana belum terkoordinasi secara sistemik untuk mendorong transformasi.	dengan kebutuhan lokal. Setiap fasilitas dirancang untuk mendukung riset terapan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung daya saing daerah.	mendukung riset terapan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung daya saing daerah.
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan riset dan inovasi masih lemah karena minimnya mekanisme kolaborasi antar peneliti, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Belum ada platform kolaborasi yang menyatukan riset ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka	Adanya kemitraan riset dan inovasi lintas kelembagaan berbasis <i>collaborative governance</i> , di mana lembaga riset, industri, dan pemerintah berperan aktif dalam proses inovasi. Setiap program riset diarahkan untuk menghasilkan kebijakan atau inovasi produk yang berdampak	Kemitraan riset dan inovasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih parsial. Belum adanya mekanisme <i>collaborative governance</i> yang menjamin keberlanjutan hilirisasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, sosial,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		pembangunan berkelanjutan.	langsung pada masyarakat dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.	dan lingkungan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah.
B	Peningkatan difusi inovasi	Diseminasi hasil riset masih terbatas pada forum akademik dan belum diadopsi oleh dunia usaha, masyarakat, atau lembaga pemerintahan. Potensi riset dan inovasi belum dimanfaatkan secara luas untuk peningkatan produktivitas ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.	Adanya sistem diseminasi berbasis platform digital yang menghubungkan peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui platform ini, inovasi sosial, teknologi tepat guna, dan model pembangunan berkelanjutan dapat diakses secara terbuka dan dimanfaatkan lintas sektor.	Mekanisme penyebaran hasil riset belum berbasis digital dan terbuka. Minimnya kanal diseminasi membuat hasil riset tidak menjangkau pelaku usaha atau masyarakat luas sebagai pengguna akhir inovasi.
C	Peningkatan praktik baik	Praktik baik dari hasil riset daerah	Adanya sistem dokumentasi hasil	Dokumentasi hasil riset

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
	dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	belum terdokumentasi dan disebarluaskan secara sistematis. Kegiatan seperti <i>innovation fair</i> dan forum riset dan inovasi daerah perlu diagendakan secara rutin untuk memastikan hilirisasi hasil riset serta keberlanjutan inovasi lintas sektor guna mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah.	riset melalui satu database yang terintegrasi. Setiap hasil riset diwajibkan untuk disebarluaskan melalui repositori riset dan inovasi daerah serta diadopsi lintas sektor melalui ajang seperti <i>innovation fair</i> dan forum riset dan inovasi daerah.	belum terbangun dan belum ada repositori riset dan inovasi daerah. Tidak ada sistem monitoring pemanfaatan hasil riset sehingga sulit mengukur dampak kebijakan berbasis inovasi.
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>			
A	Promosi dan kampanye inovasi	Budaya inovasi di kalangan masyarakat, ASN, dan industri serta pelaku usaha masih rendah. Riset masih dianggap sebagai domain akademik, bukan sebagai instrumen utama yang memiliki potensi dalam mentransformasi	Adanya budaya riset dan inovasi di semua lini pembangunan, ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam kegiatan riset dan inovasi. Kampanye publik “Banten Inovatif dan Kreatif” menjadi	Riset dan inovasi belum menjadi budaya kolektif. Ketiadaan kampanye sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan media menyebabkan rendahnya

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Perlu kampanye terpadu untuk menanamkan nilai inovatif dan kolaboratif.	gerakan kolektif untuk menumbuhkan kesadaran inovatif di berbagai sektor.	kesadaran publik terhadap peran inovasi dalam pembangunan.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan dan insentif bagi pelaku riset dan inovator daerah masih terbatas dan belum berkelanjutan. Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maupun Lomba Cipta Inovasi belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Perlu sistem apresiasi yang mampu menumbuhkan motivasi serta mengakui kontribusi inovasi terhadap	Adanya mekanisme penghargaan dan insentif untuk menghargai pelaku riset dan inovator daerah di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberian insentif diarahkan untuk menumbuhkan motivasi serta mengakui kontribusi inovasi terhadap pembangunan berkelanjutan.	Skema penghargaan dan insentif masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Belum ada sistem penghargaan berkelanjutan untuk inovasi berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		pembangunan berkelanjutan.		
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup berbasis riset masih sangat terbatas. Ekosistem pendukung seperti inkubator bisnis dan akses pembiayaan bagi startup inovatif masih belum terbentuk secara merata.	Adanya ekosistem pendukung seperti inkubator bisnis yang menjadi wadah untuk menghubungkan riset perguruan tinggi, pembiayaan, dan pelaku industri. Inovasi diarahkan untuk mentransformasi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.	Minimnya dukungan finansial dan inkubasi menyebabkan sedikit perusahaan pemula berbasis riset. Inkubator bisnis yang ada belum terkoneksi dengan kebutuhan riset maupun pembiayaan bagi startup inovatif.
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kearifan lokal dan teknologi tradisional yang berpotensi menjadi sumber inovasi sosial dan ekonomi belum terdokumentasi dengan baik. Perlu inisiatif seperti <i>local knowledge mapping</i> untuk memetakan pengetahuan lokal dan inovasi tradisional serta mengintegrasikannya dengan	Adanya bank pengetahuan sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan mempromosikan sumber inovasi sosial dan ekonomi yang memiliki potensi dalam mendorong daya saing daerah. Pengetahuan lokal dijadikan sumber inspirasi riset dan inovasi sosial berkelanjutan.	Pengetahuan lokal belum terintegrasi dalam sistem riset formal. Ketidadaan bank pengetahuan menyebabkan hilangnya peluang untuk mengangkat inovasi berbasis kearifan lokal sebagai identitas daerah.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		pengetahuan dan teknologi modern.		
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi			
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Agenda riset daerah dan belum sepenuhnya disusun berdasarkan analisis permasalahan utama daerah, terutama dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Diperlukan prakarsa pengembangan riset ke arah hilirisasi hasil riset serta menempatkan inovasi sebagai solusi lintas sektor dalam mendorong transformasi daerah ke depan.	Adanya prakarsa pengembangan riset dan inovasi ekonomi yang menempatkan riset sebagai alat utama dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Agenda ini menjadi pedoman integrasi riset lintas sektor dan fokus pada hasil terapan.	Belum adanya prakarsa riset dan inovasi yang responsif terhadap permasalahan utama daerah, utamanya dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mendorong peningkatan daya saing daerah.
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk	Klaster inovasi sektoral sudah ada namun belum terintegrasi dalam <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menghubungkan	Adanya <i>Creative Innovation Cluster</i> yang menggabungkan riset sosial, ekonomi, dan lingkungan. Klaster ini	Klaster inovasi masih bersifat sektoral, belum membentuk <i>Creative Innovation Cluster</i> yang mengintegrasik

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
	unggulan daerah	riset berbagai sektor yang dapat mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Penguatan klaster kreatif berbasis inovasi perlu menjadi prioritas.	memperkuat hubungan antara universitas, dunia usaha, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi dan inovasi kebijakan.	an isu permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Potensi sinergi lintas sektor belum dimanfaatkan.
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan kebijakan daerah masih lemah, menyebabkan duplikasi dan tumpang tindih program. Diperlukan harmonisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam kerangka ekonomi hijau dan inovasi inklusif.	Adanya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan riset dan inovasi nasional diterjemahkan dalam konteks lokal Banten melalui <i>policy alignment</i> .	Belum ada mekanisme <i>policy alignment</i> yang menjamin harmonisasi kebijakan riset dan inovasi lintas level pemerintahan.
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem	Kesadaran terhadap isu global seperti <i>green economy</i> , <i>circular economy</i> , dan transformasi digital masih terbatas di	Adanya kebijakan daerah yang mendukung transformasi menuju <i>green economy</i> , <i>digital transformation</i> , dan <i>resilient</i>	Rendahnya literasi kebijakan global (SDGs, ekonomi hijau, transformasi digital) di kalangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b>				
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
	riset dan inovasi di daerah	kalangan pembuat kebijakan dan pelaku riset. Belum ada kebijakan daerah yang secara eksplisit merespons dinamika global tersebut dan menaruh fokusnya terhadap transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.	<i>society</i> . Banten berkomitmen mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam kebijakan riset dan inovasi untuk merespons dinamika global dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendorong peningkatan daya saing daerah.	pembuat kebijakan menyebabkan riset daerah kurang relevan dengan tren pembangunan internasional.
B	Penguatan kerjasama internasional	Keterlibatan lembaga riset dan pelaku inovasi daerah dalam jejaring riset global masih rendah dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Perlu dibangun kemitraan internasional untuk pertukaran teknologi, pengetahuan, dan pembiayaan	Adanya jejaring riset internasional dengan lembaga global seperti UNDP, ADB, JICA, dan universitas mitra internasional. Kolaborasi ini mendukung pertukaran teknologi, pembiayaan inovasi hijau, dan penguatan kapasitas riset dan inovasi daerah.	Partisipasi lembaga riset Banten dalam jejaring global masih minim. Tidak ada kebijakan afirmatif atau unit khusus yang menangani kolaborasi riset internasional, transfer teknologi, dan pembiayaan inovasi berkelanjutan.

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>				
		inovasi berkelanjutan.		

## BAB 5

### STRATEGI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 5.1. Strategi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi daerah, Provinsi Banten memerlukan strategi penguatan kebijakan dan infrastruktur yang terstruktur dan berbasis kebutuhan. Tantangan yang dihadapi saat ini mencakup kesenjangan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sistem data dan informasi, infrastruktur pendukung, hingga pembiayaan riset dan perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, strategi penguatan perlu dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor guna menjawab tantangan tersebut sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat dasar hukum riset dan inovasi daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata kelola riset dan inovasi di Provinsi Banten. Perda ini harus mengatur secara menyeluruh aspek tata kelola riset dan inovasi, pengelolaan sumber daya, mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah dan mitra eksternal, prosedur perumusan dan pemanfaatan hasil riset, metodologi riset daerah yang terstandarisasi, sistem evaluasi substansi hasil riset, sistem monitoring dan evaluasi luaran riset dan inovasi, serta integrasi riset dalam siklus kebijakan publik.

Selain itu, substansi kebijakan inovasi juga perlu diperluas dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2021, agar mencakup ketentuan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengedepankan riset sebagai bagian penting dari inovasi. Kebijakan juga perlu diarahkan untuk mendukung penguatan riset berbasis prioritas pembangunan daerah dan produk unggulan lokal. Perda ini juga harus mampu mengakomodasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pendekatan riset partisipatif dan kolaboratif (*pentahelix*).

Strategi berikutnya adalah merancang program pengembangan kapasitas sumber daya periset daerah yang bersifat afirmatif dan berkelanjutan. Program ini dapat mencakup beasiswa pendidikan lanjut (S2/S3) untuk ASN periset, pelatihan teknis dan metodologi riset, magang penelitian di BRIN maupun pusat riset nasional dan internasional lainnya, serta mobilitas periset ke perangkat daerah maupun industri dan UMKM untuk mendekati diri ke target pengguna. Ketersediaan SDM yang unggul dan kompeten akan menjadi pondasi penting dalam menghasilkan riset berkualitas dan inovasi yang berdampak langsung terhadap pembangunan.

Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, Provinsi Banten perlu mengembangkan *dashboard* rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah. Dashboard ini berfungsi sebagai kanal integratif untuk menginventarisasi, menganalisis, dan menyajikan data riset-riSET kebijakan yang dilakukan serta untuk mempermudah para pengambil kebijakan mendapatkan informasi mengenai berbagai rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dari riset-riSET kebijakan di berbagai sektor di Provinsi Banten.

Di samping itu, dibutuhkan repositori digital riset daerah yang menyimpan seluruh dokumen riset, data mentah, dan luaran inovasi daerah. Platform ini akan memperkuat dokumentasi dan memudahkan aksesibilitas hasil riset bagi publik, akademisi, dunia usaha, maupun pengambil kebijakan. Keterpaduan sistem informasi ini harus dibarengi dengan regulasi pengelolaan data riset, perlindungan data pribadi, dan interoperabilitas sistem antarlembaga. Hal ini sesuai dengan amanat wajib serah dan wajib simpan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana seluruh data mentah dan laporan hasil riset yang dibiayai oleh negara wajib untuk diserahkan kembali kepada negara dan disimpan serta dikelola baik untuk kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan maupun untuk pembangunan.

Kondisi infrastruktur riset di Provinsi Banten saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mampu sepenuhnya mendukung ekosistem riset dan inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Keterbatasan ini terlihat dari minimnya fasilitas riset yang bersifat tematik, terbatasnya dukungan laboratorium kebijakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil riset untuk mendukung sektor produktif dan industri lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan infrastruktur riset melalui investasi yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna membangun sistem riset yang solid dari hulu ke hilir.

Salah satu langkah strategis yang perlu diambil adalah pengembangan laboratorium kebijakan yang berfungsi sebagai ruang eksperimen dan analisis kebijakan berbasis data. Laboratorium ini penting untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan daerah secara lebih akurat, terukur, dan kontekstual. Dengan laboratorium kebijakan yang kuat, perangkat daerah dapat mengakses berbagai skenario kebijakan, memvalidasi dampak program, serta menyusun alternatif solusi yang berbasis pada hasil kajian ilmiah, bukan semata asumsi teknokratis.

Selanjutnya, Provinsi Banten juga perlu membangun laboratorium riset tematik yang fokus pada bidang-bidang prioritas pembangunan, serta lingkungan hidup. Laboratorium ini berperan penting dalam menghasilkan inovasi teknologi terapan yang dapat mendukung kemandirian daerah sekaligus mengatasi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketergantungan pada sumber daya energi fosil. Dengan pendekatan tematik, pengembangan riset akan lebih fokus, efisien, dan berdampak nyata terhadap sektor strategis daerah.

Di sisi hilir, perlu dibentuk inkubator bisnis teknologi dan pusat inovasi daerah yang menjadi jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan pasar dan pelaku usaha. Inkubator ini tidak hanya menyediakan ruang kerja dan mentoring, tetapi juga menjadi fasilitator dalam hal validasi produk, akses pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, serta koneksi ke jejaring industri dan investor. Fokus utama inkubator adalah mendorong tumbuhnya UMKM inovatif dan startup berbasis hasil riset lokal, sehingga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Strategi berikutnya adalah penguatan klinik inovasi dan layanan pendampingan teknologi yang menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh wilayah provinsi. Klinik inovasi ini berfungsi sebagai pusat konsultasi teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta transformasi digital bagi sektor usaha lokal. Dengan layanan yang mudah diakses dan berbasis kebutuhan lokal, klinik inovasi akan mempercepat proses adopsi teknologi, mengurangi kesenjangan inovasi antara pusat dan daerah, serta memperkuat daya saing industri lokal di era digital.

Kesenjangan pembiayaan merupakan salah satu hambatan paling mendasar dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Banten. Minimnya dukungan anggaran menyebabkan berbagai inisiatif riset tidak dapat terlaksana secara optimal, mulai dari kegiatan penelitian dasar, pengembangan teknologi, hingga pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan dan pembangunan ekonomi daerah. Saat ini, proporsi anggaran riset dalam APBD Provinsi Banten masih berada jauh di bawah angka ideal yang direkomendasikan secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendanaan yang terstruktur, inovatif, dan kolaboratif untuk memperkuat keberlanjutan riset di daerah.

Strategi pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan alokasi anggaran riset dalam APBD secara bertahap menuju angka ideal sebesar  $\geq 1\%$  dari total APBD. Langkah ini mencerminkan komitmen politik dan kelembagaan untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai pondasi pembangunan berbasis pengetahuan. Alokasi anggaran ini dapat difokuskan pada program-program strategis seperti riset tematik prioritas daerah, penguatan kapasitas kelembagaan riset, insentif bagi periset dan inovator lokal, serta pengembangan infrastruktur dan sistem informasi riset. Bertahapnya peningkatan ini juga memungkinkan adanya ruang konsolidasi kelembagaan dan penguatan perencanaan program riset yang terintegrasi.

Selanjutnya, penciptaan skema insentif dan *matching fund* menjadi langkah penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Matching fund memungkinkan dana pemerintah digunakan sebagai pemicu (*trigger*) untuk memobilisasi sumber pembiayaan dari pihak lain, sehingga meningkatkan efisiensi fiskal dan memperluas cakupan pembiayaan. Skema ini dapat dirancang dalam bentuk hibah kompetitif tematik, riset aplikatif bersama industri, maupun program sinergi riset untuk pengembangan produk unggulan daerah. Dengan mendorong kolaborasi tripartit, hasil riset akan lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pasar.

Langkah strategis berikutnya adalah inventarisasi dan harmonisasi sumber pendanaan riset eksternal, termasuk dari industri, lembaga donor internasional, program corporate social responsibility (CSR), dan yayasan filantropi. Hingga kini, potensi pendanaan eksternal masih belum terpetakan secara sistematis, sehingga seringkali tidak termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem informasi pendanaan riset daerah yang dapat diakses oleh lembaga riset, pemerintah, dan mitra eksternal, guna mempertemukan penawaran dan permintaan dalam pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Di samping itu, Provinsi Banten juga perlu mendorong pembentukan Dana Riset Daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja inovasi dan penguatan Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan mengoptimalkan kinerja inovasi melalui program-program unggulan, daerah dapat memperoleh tambahan DID dari pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan kembali untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi lokal. Dana ini dapat dikelola oleh BRIDA atau satuan kerja khusus, dengan tata kelola transparan dan akuntabel, serta diarahkan pada prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riset sektoral.

Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya dukung riset dan inovasi merupakan pondasi esensial dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, ekosistem riset dan inovasi di daerah tidak hanya membutuhkan ide-ide cemerlang, tetapi juga institusi yang kuat dan kolaborasi multipihak yang produktif. Namun demikian, evaluasi terhadap kondisi aktual menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah kesenjangan kelembagaan dan rendahnya kapasitas pendukung riset dan inovasi yang signifikan.

Pada aspek penguatan kelembagaan, strategi pertama adalah melakukan pendataan menyeluruh dan sistematis terhadap perguruan tinggi dan lembaga riset yang aktif di Provinsi Banten. Pendataan ini mencakup jumlah lembaga, bidang fokus, kompetensi sumber daya manusia periset, kompetensi riset, serta capaian riset. Informasi tersebut akan menjadi basis dalam menyusun kebijakan kelembagaan yang berbasis bukti serta pemetaan kapasitas kelembagaan riset yang berkelanjutan. Strategi ini juga mencakup pengembangan *database* kelembagaan riset daerah yang dapat dimutakhirkan secara periodik dan dijadikan rujukan lintas sektor.

Kedua, penguatan struktur kelembagaan riset daerah dilakukan melalui peningkatan otoritas dan kapasitas kelembagaan unit RIDA (Riset dan Inovasi Daerah) Bappeda Provinsi Banten sebagai koordinator utama riset dan inovasi di Provinsi Banten. RIDA perlu memperoleh mandat kelembagaan yang kuat, dengan dukungan regulasi seperti peraturan daerah atau peraturan gubernur baru yang memberikan ruang bagi RIDA untuk menjalin kemitraan lintas sektor, mengelola data riset, mengkoordinasikan agenda riset daerah, serta memfasilitasi penggunaan hasil riset dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan RIDA menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem koordinasi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Pada sisi peningkatan daya dukung riset, perlu dikembangkan kerangka pengelolaan kerja sama riset yang berkelanjutan antara Bappeda Provinsi Banten, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya. Meskipun saat ini telah tercatat 15 kerja sama riset dan inovasi serta 4 kerjasama riset dan inovasi melalui MoU/MoA/PKS, sebagian besar belum dilandasi oleh sistem *monitoring* dan evaluasi yang memadai serta belum terlembagakan dalam kerangka pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi berikutnya adalah menyusun pedoman kerjasama yang memuat panduan teknis, tahapan implementasi, serta model pembagian peran antar aktor.

Selanjutnya, strategi yang dapat dikembangkan mencakup penyusunan dan penguatan mekanisme insentif riset daerah. Pemerintah Provinsi Banten perlu menyediakan skema insentif terstruktur, baik untuk lembaga maupun individu, yang aktif dalam kerja sama riset. Bentuk insentif ini dapat berupa pembiayaan bersama (*matching fund*), fasilitasi publikasi ilmiah, maupun dalam bentuk apresiasi lainnya seperti penghargaan tahunan bagi kerja sama riset terbaik yang berkontribusi signifikan terhadap isu pembangunan daerah.

Kemitraan dalam bidang riset dan inovasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Di Provinsi Banten, penguatan kemitraan menjadi strategi penting guna menjembatani hasil-hasil riset dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha. Namun, saat ini kemitraan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten, khususnya melalui Bappeda Provinsi Banten dan unit RIDA, masih menghadapi sejumlah kesenjangan dalam cakupan, kualitas kolaborasi, serta kelembagaan pendukungnya.

Langkah awal yang telah ditempuh oleh Bappeda Provinsi Banten, seperti menjalin kerja sama riset dengan 11 perangkat daerah, patut diapresiasi sebagai bentuk integrasi riset dengan proses kebijakan publik. Namun, pendekatan ini masih bersifat internal dan belum melibatkan pemangku kepentingan di luar birokrasi pemerintah, seperti pelaku usaha, BUMD, UMKM, komunitas masyarakat, dan sektor swasta lainnya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, strategi utama yang harus ditempuh adalah membangun kemitraan lintas sektor berbasis pendekatan *pentahelix*, yang menggabungkan elemen pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media.

Strategi tersebut mencakup pembentukan forum kemitraan riset dan inovasi daerah yang bersifat inklusif, yang mempertemukan berbagai pihak dalam agenda riset bersama. Pemerintah perlu menetapkan pedoman kolaborasi formal yang memuat mekanisme peran, skema pembiayaan bersama (*matching fund*), serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Forum ini harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya berbasis proyek jangka pendek, dan dapat dijalankan melalui pendekatan kluster inovasi di bidang-bidang prioritas pembangunan daerah.

Saat ini, meskipun diseminasi hasil riset telah dilakukan ke perangkat daerah sebagai target pengguna, pendekatan ini masih bersifat administratif dan belum menjangkau sektor-sektor produktif di luar pemerintahan. Belum ada program pendampingan lisensi paten pada mitra UMKM, BUMD, BUMDes, dan pegiat usaha lainnya di lingkungan Provinsi Banten. Strategi penguatan harus mencakup program diseminasi aktif dan tematik dalam bentuk seminar industri, forum bisnis, *roadshow* inovasi, serta penyusunan direktori riset dan inovasi daerah yang relevan untuk dimanfaatkan sektor swasta dan masyarakat.

Difusi inovasi, yakni proses penyaluran, adopsi, dan replikasi hasil riset ke dalam kebijakan publik maupun sektor ekonomi, juga belum menjadi sistem yang terlembaga di Provinsi Banten. Upaya difusi inovasi yang dilakukan saat ini masih bersifat parsial dan tidak memiliki payung kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan adalah pembentukan mekanisme pendampingan inovasi yang sistematis dan bersifat lintas sektor.

Pemerintah perlu memperkuat klinik inovasi daerah yang telah ada, baik dari segi kapasitas kelembagaan, jumlah SDM pendamping, sarana teknologi, maupun jangkauan wilayah. Klinik inovasi harus berfungsi tidak hanya sebagai pusat pelatihan atau konsultasi, tetapi juga sebagai pusat inkubasi inovasi sosial dan teknologi, dengan dukungan dari perguruan tinggi dan mitra industri. Program difusi inovasi juga harus dikaitkan dengan perencanaan pembangunan desa, pengembangan UMKM, dan program CSR perusahaan, agar inovasi yang dihasilkan dapat langsung memberikan dampak pada lapisan masyarakat yang lebih luas.

Lebih penting lagi, perlu dibangun mekanisme transfer pengetahuan dari lembaga riset kepada pelaku usaha, yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program pelatihan, inkubasi teknologi, dan workshop adopsi teknologi. Diseminasi hasil riset dan difusi inovasi juga harus menjangkau kelompok masyarakat di pedesaan, pelaku ekonomi informal, serta organisasi masyarakat sipil agar hasil riset mampu menjangkau sektor ekonomi inklusif.

Penguatan budaya riset dan inovasi merupakan pondasi utama dalam membangun ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Banten. Budaya ini tidak hanya dibentuk melalui kebijakan atau infrastruktur fisik, tetapi juga melalui transformasi nilai, partisipasi masyarakat, dan internalisasi riset sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan begitu, diharapkan bahwa masyarakat Banten dapat menjadi individu yang memiliki perangai ilmiah.

Budaya riset dan inovasi hanya dapat tumbuh jika didukung oleh kampanye dan promosi yang terencana dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten dapat menempatkan lingkungan pendidikan sebagai titik awal perubahan budaya riset. Integrasi materi tentang karya tulis ilmiah, riset dasar, dan metodologi penelitian dalam kurikulum lokal SMA/SMK diharapkan mampu menanamkan semangat ilmiah dan pemikiran kritis kepada generasi muda sejak dini.

Tidak hanya berhenti pada aspek akademik, kampanye dan promosi riset dan inovasi juga diarahkan untuk mendorong semangat kewirausahaan yang berakar pada potensi lokal, seperti inovasi berbasis tradisi budaya, hasil pertanian, produk kreatif, dan teknologi tepat guna. Pemerintah Provinsi Banten dapat menempatkan materi tersebut ke dalam kurikulum muatan lokal di tingkat SMA/SMK.

Salah satu indikator keberhasilan budaya riset dan inovasi adalah munculnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang lahir dari kekhasan lokal. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendorong terciptanya *startup* lokal yang dapat menjawab tantangan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru. Untuk itu, langkah awal yang harus ditempuh adalah menyusun kajian kebijakan yang memetakan potensi *startup* teknologi daerah dan menyusun desain insentif pendukungnya, baik dari sisi regulasi, fiskal, maupun non-fiskal.

Pengembangan *startup* membutuhkan ekosistem yang komprehensif. Layanan inkubasi bisnis yang difasilitasi oleh pemerintah atau mitra swasta harus dioptimalkan sebagai pusat pembinaan *startup* lokal. Inkubator ini perlu menyediakan akses pada pelatihan, pembimbingan bisnis, akses pasar, serta bantuan modal awal (*seed funding*). Selain itu, pelatihan manajemen usaha

berbasis teknologi juga penting dilakukan agar pelaku startup memiliki bekal dalam mengelola organisasi, mengembangkan model bisnis, hingga melakukan transformasi digital.

Keterpaduan dalam riset dan inovasi merupakan prasyarat krusial untuk mewujudkan sistem pembangunan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti. Dalam konteks Provinsi Banten, keterpaduan tidak hanya berarti integrasi data dan informasi, melainkan juga menyangkut sinergi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengimplementasikan hasil-hasil riset. Meskipun sejumlah inisiatif awal telah dilakukan, berbagai kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal masih menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab dengan strategi yang sistematis.

Salah satu capaian awal yang patut diapresiasi adalah penyusunan data dan informasi pembangunan yang merujuk pada isu strategis dalam RPJMD, selaras dengan amanat Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen awal Pemerintah Provinsi Banten dalam menautkan agenda riset dengan arah pembangunan daerah. Namun, strategi ke depan juga perlu melampaui pendekatan berbasis isu dan memasuki tahap integrasi yang lebih dalam, yakni melalui pengembangan database prioritas kebutuhan kebijakan yang secara eksplisit mengidentifikasi area kebijakan yang paling membutuhkan dukungan riset.

Penting untuk dicatat bahwa hingga kini belum tersedia sistem database yang dapat menyajikan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi daerah (baik perda maupun pergub), termasuk urgensi pembaruan atau revisi terhadap regulasi yang sudah usang atau tidak kontekstual dengan dinamika pembangunan terkini. Keberadaan *database* ini menjadi pondasi penting bagi sistem informasi pembuatan kebijakan berbasis bukti, yang dapat berfungsi sebagai landasan objektif dalam memetakan efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi riset terpadu harus menjadi salah satu strategi utama.

Strategi ini perlu diikuti dengan perluasan cakupan data hingga mencakup persoalan-persoalan pembangunan yang memerlukan respons cepat dan bersifat lintas sektor. Dengan cakupan yang lebih luas dan responsif, database ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pasif, tetapi menjadi instrumen aktif dalam mengarahkan riset untuk mendukung percepatan pembangunan dan penyelesaian permasalahan riil.

Strategi berikutnya adalah membangun mekanisme pendampingan hasil riset hingga pada penyusunan dan penetapan kebijakan, khususnya terhadap rekomendasi kebijakan strategis yang saat ini baru sampai pada tahap diseminasi *policy brief*. Diperlukan mekanisme pendampingan yang terstruktur untuk menjembatani hasil kajian menuju formulasi kebijakan nyata, termasuk melalui pelibatan perangkat daerah pengguna, fasilitasi legalisasi kebijakan, serta integrasi ke dalam perencanaan program.

Dari sisi kelembagaan, penguatan koordinasi riset dan inovasi lintas jenjang pemerintahan merupakan strategi yang tak terelakkan. Forum tahunan seperti Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah dan Forum Kelitbangan Provinsi Banten memang telah menjadi ruang awal untuk konsolidasi riset dan

inovasi lintas pemerintahan. Namun, efektivitas forum-forum ini perlu ditingkatkan dengan cara membentuk platform koordinatif formal lintas pemerintah, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan kabupaten/kota.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan platform berbentuk lokakarya tematik, rapat teknis sektoral, atau mekanisme penugasan kolaboratif antar-instansi dan antar-tingkatan pemerintahan. Platform ini menjadi wadah sinkronisasi rencana riset dan inovasi antar lintas pemerintahan serta menjamin keterpaduan arah pembangunan dan menghindari tumpang tindih kegiatan antar lembaga sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN, RPJMD, dan dokumen perencanaan kabupaten/kota.

Sebagai langkah lanjut, perlu juga dibangun unit koordinasi teknis dan pendampingan kelembagaan yang bertugas memperkuat kapasitas pembinaan riset di tingkat kabupaten/kota. Unit RIDA Bappeda Provinsi Banten dapat menyediakan pelatihan reguler, bimbingan teknis, serta modul pembelajaran yang terstandar untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola riset dan inovasi. Keberadaan unit ini juga dapat memperkuat keberlanjutan hasil dari Forum Kelitbang dan Rapat Koordinasi Riset, karena hasil-hasilnya dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan teknis langsung di daerah.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang berlangsung cepat, Provinsi Banten dituntut untuk mengembangkan sistem riset dan inovasi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan dinamika isu nasional dan global. Keselarasan ini menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah, mendorong kebijakan berbasis bukti, serta memperkuat kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, kondisi aktual menunjukkan masih adanya berbagai kesenjangan, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, maupun partisipasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif yang mencakup dua pilar utama, yakni peningkatan kepedulian terhadap isu riset dan inovasi serta peningkatan peran masyarakat dalam ekosistem riset daerah.

Strategi pertama adalah penguatan mekanisme evaluasi substansi riset dan inovasi agar produk riset dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan, berkualitas, dan dapat diandalkan untuk menjawab isu-isu strategis di tingkat nasional maupun global. Meskipun seminar internal dan pelibatan pakar eksternal telah dilakukan dalam proses evaluasi proposal dan hasil riset, hal ini belum dilengkapi dengan sistem pemeriksaan kualitas substansi yang menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu membentuk sistem penilaian mutu riset yang terstandarisasi, mencakup aspek validitas metodologi, relevansi tematik, akurasi data, dan implikasi kebijakan.

Selanjutnya, pembaruan SOP Litbang dan penyusunan kode etik ilmiah menjadi langkah strategis berikutnya. SOP yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan riset kontemporer dan belum mengatur secara detail prinsip-prinsip etik dalam riset. Oleh karena itu, perlu disusun SOP Litbang yang adaptif dan dinamis, disertai kode etik ilmiah yang menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh aktor riset. Kode etik ini perlu disusun secara partisipatif, melibatkan periset, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa prinsip transparansi,

akuntabilitas, integritas data, dan inklusivitas menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik riset dan inovasi di Banten.

Strategi berikutnya menyorot aspek pemberdayaan masyarakat dalam riset dan inovasi daerah, sebagai bentuk demokratisasi pengetahuan dan penciptaan ekosistem inovasi yang inklusif. Saat ini, kontribusi lembaga riset non-pemerintah dan non-perguruan tinggi masih belum terpetakan secara sistematis. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun database lembaga dan aktor riset non-formal, termasuk LSM, komunitas inovator, perusahaan, dan individu independen. Database ini akan memuat informasi mengenai jumlah, sebaran, bidang keahlian, dan kualifikasi SDM yang terlibat. Dengan data tersebut, Banten dapat memperluas jangkauan jejaring kolaborasi riset dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur.

Selain pemetaan, pembentukan platform komunikasi dan kolaborasi multipihak juga menjadi strategi penting. Forum seperti lokakarya inklusif, diskusi publik tematik, dan forum konsultatif dapat menjadi ruang interaksi antara pembuat kebijakan dan pelaku riset dari kalangan non-pemerintah. Platform ini akan memfasilitasi pertukaran gagasan, peninjauan kebutuhan riset, hingga proses advokasi berbasis pengetahuan lokal.

## 5.2. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Subbab ini menguraikan strategi PUD daerah melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, yang dirancang sebagai langkah strategis untuk menjembatani berbagai kesenjangan riset dan inovasi yang telah dipetakan pada bagian sebelumnya. Melalui strategi ini, pengembangan PUD di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, hasil olahan, dan pariwisata diarahkan untuk masuk ke dalam PUD Ekonomi Kreatif yang menempatkan inovasi sebagai fondasi utamanya.

Pendekatan ini menekankan pentingnya riset terapan dan kolaboratif, transformasi digital, serta penerapan prinsip keberlanjutan sebagai basis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.

Tabel 27 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Banten Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi		
A	Reformasi kebijakan riset	Reformasi kebijakan di daerah untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan yang secara eksplisit menetapkan pengembangan PUD</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
	dan inovasi di daerah	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<p>Ekonomi Kreatif sebagai prioritas lintas sektor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun <i>policy framework</i> yang mengintegrasikan riset, inovasi, dan ekonomi kreatif pada sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata;</li> <li>• Menetapkan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Menyusun panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Penataan basis data yang kuat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan <i>Creative Innovation Database</i> yang memetakan pelaku, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyusun sistem informasi berbasis kewilayahan atau geografis untuk pemetaan potensi bahan baku dan sentra produksi unggulan daerah;</li> <li>• Menyediakan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat untuk</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<p>pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem metadata repositori hasil riset daerah agar tidak hilang atau duplikasi; dan</li> <li>• Menghubungkan basis data daerah dengan Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola oleh BRIN dan/atau repositori yang dimiliki perguruan tinggi untuk sinkronisasi kegiatan riset dan inovasi.</li> </ul>
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun <i>Creative Innovation Hub</i> di setiap klaster PUD Ekonomi Kreatif berdasarkan sektor (perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata);</li> <li>• Mengembangkan laboratorium riset kebijakan, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial di tiap wilayah prioritas berdasarkan potensi kewilayahan pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Meningkatkan kapasitas perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah lokal agar menjadi sarana publikasi riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Mengembangkan inkubator bisnis untuk UMKM berbasis hasil riset dan inovasi melalui optimalisasi fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi dan</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			penghubung riset dengan industri.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Penyediaan anggaran untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan secara bertahap dan terencana alokasi APBD untuk riset dan inovasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Mendorong kemitraan pendanaan riset dengan industri, perguruan tinggi, dan lembaga donor (<i>skema co-funding</i>);</li> <li>• Mengembangkan <i>grant scheme</i> kompetitif untuk riset terapan pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyediakan pendanaan khusus bagi penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang terkait dan memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Membentuk <i>Innovation Fund</i> yang berfungsi sebagai dana abadi riset dan inovasi daerah.</li> </ul>
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Pusat Layanan Fasilitas HKI di daerah untuk layanan konsultasi, pendaftaran, pendampingan, dan edukasi HKI;</li> <li>• Menetapkan kebijakan insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh HKI;</li> <li>• Mengembangkan program sosialisasi HKI ke UMKM, pelaku usaha, lembaga pendidikan SMA/SMK, dan masyarakat umum;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk skema <i>royalty-sharing</i> untuk hasil riset dan inovasi yang berhasil dikomersialisasikan; dan</li> <li>• Mendorong penguatan pengakuan indikasi geografis seperti Kopi Banten, Emping Melinjo, Gula Aren Lebak, dan Sate Bandeng Serang.</li> </ul>
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif;</li> <li>• Memperkuat kerjasama riset dan inovasi formal antara Bappeda, BRIN, dan perguruan tinggi di wilayah Banten dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Mendorong kolaborasi riset dengan sektor swasta dan asosiasi industri kreatif;</li> <li>• Mengadakan forum tahunan riset dan inovasi lintas sektor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Menyusun mekanisme <i>research and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
B	Penyediaan sarana	Penyediaan sarana untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jaringan <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative</i></li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
	pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<p><i>center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup melalui penguatan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Meningkatkan kapasitas SDM teknis laboratorium dan peneliti lapangan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Menyusun SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana riset untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.</li> </ul>
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>		
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Penguatan kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan model kemitraan antar aktor <i>pentahelix</i> berbasis kebutuhan pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyusun panduan tata kelola kemitraan riset dan inovasi daerah dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Membentuk nota kesepahaman riset antara pemerintah, industri, dan komunitas serta menetapkan mekanisme pembagian peran, tanggung</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<p>jawab, dan manfaat hasil riset dan inovasi lintas lembaga dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk forum kemitraan riset tematik di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata.</li> </ul>
B	Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan difusi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, publikasi hasil riset, peluang kemitraan, dan promosi produk inovatif lintas sektor;</li> <li>• Menghubungkan platform digital dengan <i>marketplace</i> untuk mempermudah hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar;</li> <li>• Memfasilitasi transfer teknologi antara lembaga riset dengan UMKM dan pelaku usaha lokal melalui penguatan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Menyediakan pelatihan penggunaan teknologi baru bagi pelaku usaha kreatif.</li> </ul>
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan diseminasi hasil riset secara rutin kepada perangkat daerah, industri, dan komunitas;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
		pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan publikasi hasil riset terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif ke jurnal, prosiding, maupun buku ilmiah secara rutin;</li> <li>• Mendokumentasikan hasil riset terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif ke dalam repositori riset dan inovasi daerah atau melalui Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola oleh BRIN;</li> <li>• Menyelenggarakan <i>Banten Innovation Expo and Festival</i> tahunan yang menjadi ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi produk unggulan; dan</li> <li>• Menyusun mekanisme pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif.</li> </ul>
4	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>		
A	Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan kampanye “Banten Inovatif dan Kreatif” di berbagai sektor unggulan;</li> <li>• Memanfaatkan media digital dan sosial sebagai kanal promosi inovasi daerah;</li> <li>• Memperkuat Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi dengan memadupadankan dengan kebutuhan</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<p>pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan mata ajar riset dan inovasi ke dalam kurikulum muatan lokal SMA/SMK sebagai media pengenalan sejak dini pentingnya riset dan inovasi dalam menumbuhkan daya saing daerah melalui pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penguatan apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk penghargaan tahunan <i>Banten Innovation Awards for Creative Economy</i>;</li> <li>• Memberikan insentif publikasi bagi periset yang mampu mempublikasikan hasil riset terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif ke dalam jurnal, prosiding, maupun buku bereputasi global untuk mendorong motivasi dan keberlanjutan riset;</li> <li>• Mendorong pemberian penghargaan bagi inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan;</li> <li>• Mengembangkan sistem yang dapat memantau perkembangan inovasi PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global; dan</li> <li>• Memberikan beasiswa bagi siswa SMA/SMK inovatif</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			yang menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat inkubator bisnis berbasis riset melalui fungsi PLUT sebagai sebagai pusat layanan inovasi terpadu bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Mendorong kemitraan startup dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, dan lembaga lainnya;</li> <li>• Menyusun skema pendanaan awal (<i>seed funding</i>) bagi startup inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyediakan pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Membangun jejaring <i>creative startup community</i> di tiap kabupaten/kota.</li> </ul>
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Penguatan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan bank pengetahuan yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya serta menghubungkan pengetahuan lokal dengan riset modern untuk meningkatkan potensi inovasi produk baru;</li> <li>• Mendokumentasikan praktik tradisional seperti</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<p>pengolahan kopi, gula aren, emping, dan bandeng khas daerah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> </ul>
5	<b>Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>		
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Penguatan prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan agenda riset dan inovasi prioritas tahunan yang berorientasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>Mengintegrasikan kebutuhan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berasal dari berbagai perangkat daerah ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>Mengembangkan mekanisme <i>call for proposal</i> riset sesuai kebutuhan sektoral;</li> <li>Menyusun skema evaluasi efektivitas riset dan inovasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>Mendorong riset kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi untuk mendukung pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun klaster inovasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif di wilayah potensial berdasarkan</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
		PUD Ekonomi Kreatif	<p>masing-masing sektor dan/atau komoditas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungkan kluster inovasi dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga riset lainnya serta lembaga donor dan keuangan;</li> <li>• Menyusun peta rantai nilai dan jaringan pasok tiap kluster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</li> <li>• Mengintegrasikan kluster inovasi pengembangan PUD Ekonomi Kreatif dengan branding Banten Kreatif dan Inovatif.</li> </ul>
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan arah kebijakan riset daerah dengan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Mengoptimalkan program nasional (BRIN, Kemenparekraf, Kementan, KKP) di tingkat daerah untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyusun forum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Mengembangkan sistem pelaporan terpadu lintas level pemerintahan untuk mempercepat</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<p>pengembangan PUD Ekonomi Kreatif; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan indikator kinerja bersama untuk riset dan inovasi untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global		
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kepedulian isu internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarusutamakan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> <li>• Menyesuaikan riset dengan SDGs dan Paris Agreement;</li> <li>• Menyusun kebijakan transisi digital untuk sektor ekonomi kreatif;</li> <li>• Mendorong pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang ramah lingkungan dan berdaya saing global; dan</li> <li>• Menyelenggarakan forum riset internasional di Banten.</li> </ul>
B	Penguatan kerjasama internasional	Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kerja sama riset dan inovasi dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO dan ILO;</li> <li>• Mengikuti jaringan ASEAN Creative Cities Network;</li> <li>• Mendorong kolaborasi riset antar perguruan tinggi di Asia Tenggara dan mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional; dan</li> <li>• Menyusun program study exchange dan magang internasional bagi periset muda daerah.</li> </ul>

## 5.2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Subbab ini menjabarkan strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang dirancang untuk mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Banten, sekaligus merespons berbagai kesenjangan riset dan inovasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Strategi ini berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan degradasi lingkungan diintegrasikan ke dalam kerangka pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tabel 28 Strategi Penyelesaian Permasalahan Utama Provinsi Banten Melalui Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi		
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Reformasi kebijakan di daerah untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kebijakan daerah yang dapat menjadikan riset dan inovasi sebagai fondasi utama untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah melalui transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
		untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun <i>policy framework</i> yang mengintegrasikan riset dan inovasi dengan penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Merumuskan kebijakan pemberian insentif, baik dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal, kepada lembaga dan individu yang berperan aktif dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing; dan</li> <li>• Menyusun panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah.</li> </ul>
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Penataan basis data yang kuat untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan basis data digital dalam bentuk repositori riset daerah agar data dapat terdokumentasikan, tersimpan, dan terkelola dengan baik;</li> <li>• Mengintegrasikan seluruh hasil riset dan inovasi dalam satu platform terbuka berbasis <i>open data</i> untuk</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan untuk mendukung keputusan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam mentransformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing;</li> <li>• Mengintegrasikan basis data riset daerah dengan Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola oleh BRIN guna memperkuat sinkronisasi hasil penelitian serta menjamin perlindungan terhadap karya dan inovasi daerah; dan</li> <li>• Menyusun pedoman tata kelola data untuk menjaga kualitas, validitas, dan keamanan data riset.</li> </ul>
C	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan laboratorium sosial dan teknologi tepat guna untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Memperluas akses laboratorium dan fasilitas dari BRIN dan perguruan</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>tinggi bagi pelaku riset daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kapasitas perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah lokal sebagai media diseminasi pengetahuan dan publikasi hasil riset dalam mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan; dan</li> <li>• Mendorong kemitraan publik-swasta dalam pembangunan fasilitas riset tematik seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan.</li> </ul>
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Penyediaan anggaran untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan secara bertahap dan terencana alokasi APBD untuk kegiatan riset dan inovasi yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan guna memperkuat daya saing daerah;</li> <li>• Mendorong kemitraan pendanaan riset bersama sektor industri, perguruan tinggi, dan lembaga donor melalui skema <i>co-funding</i> untuk memperluas sumber pembiayaan inovasi daerah;</li> <li>• Mengembangkan skema hibah kompetitif (<i>competitive grant scheme</i>) bagi riset</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>terapan yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan dukungan pendanaan khusus bagi penelitian dosen, mahasiswa, serta komunitas lokal yang memiliki relevansi dan potensi kontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah; dan</li> <li>• Membentuk <i>Innovation Fund</i> sebagai dana abadi riset dan inovasi daerah untuk menjamin keberlanjutan pendanaan kegiatan inovatif di berbagai sektor pembangunan.</li> </ul>
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Pusat Layanan Fasilitas HKI di daerah sebagai wadah konsultasi, pendampingan, pendaftaran, dan edukasi bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Merumuskan kebijakan insentif bagi inovator dan pelaku usaha yang berhasil memperoleh perlindungan HKI atas hasil inovasinya;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan program sosialisasi dan literasi HKI bagi UMKM, pelaku usaha, lembaga pendidikan SMA/SMK, serta masyarakat guna memperkuat kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hasil inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah; dan</li> <li>• Membangun skema pembagian royalti (<i>royalty-sharing scheme</i>) bagi hasil riset dan inovasi yang berhasil dikomersialisasikan sebagai bentuk apresiasi dan keberlanjutan.</li> </ul>
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk forum koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen antara Bappeda, dinas terkait, BRIN, perguruan tinggi, industri, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Memperkuat kerja sama riset dan inovasi secara formal antara Bappeda, BRIN, dan perguruan tinggi</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>di Provinsi Banten dalam rangka pengembangan kebijakan dan solusi inovatif yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kolaborasi riset strategis dengan sektor swasta, asosiasi industri, serta lembaga masyarakat guna memperluas penerapan inovasi pada berbagai sektor pembangunan;</li> <li>• Menyelenggarakan forum tahunan riset dan inovasi lintas sektor sebagai sarana pertukaran pengetahuan, promosi hasil riset, dan penguatan jejaring untuk mendukung peningkatan daya saing daerah; dan</li> <li>• Menyusun mekanisme <i>research and innovation matchmaking</i> yang menghubungkan kebutuhan riset dari perangkat daerah dan sektor pembangunan daerah dengan agenda penelitian akademik dan terapan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan.</li> </ul>
B	Penyediaan sarana pendukung riset	Penyediaan sarana untuk mendukung transformasi sosial,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jaringan <i>shared facility</i> dan <i>techno-innovation center</i> sebagai pusat</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
	dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<p>kolaborasi riset, teknologi, dan kreativitas yang berorientasi pada transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses riset, pelatihan, serta inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup melalui penguatan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu guna mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Mengembangkan <i>coworking space</i> bagi startup berbasis riset dan teknologi yang berfokus pada solusi inovatif untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal;</li> <li>• Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknis, baik peneliti lapangan maupun pengelola laboratorium, agar mampu menghasilkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan</li> <li>• Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan serta</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			pemeliharaan sarana dan prasarana riset untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan penggunaan fasilitas riset dan inovasi daerah.
<b>3 Kemitraan Riset dan Inovasi</b>			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Penguatan kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan model kemitraan <i>pentahelix</i> yang berbasis pada kebutuhan transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan guna meningkatkan daya saing daerah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan degradasi lingkungan;</li> <li>• Menyusun pedoman tata kelola kemitraan riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada pemanfaatan hasil riset untuk mendorong transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan;</li> <li>• Membentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama riset antara pemerintah, dunia industri, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi inovasi daerah;</li> <li>• Menetapkan mekanisme pembagian peran, tanggung</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>jawab, dan manfaat hasil riset lintas lembaga agar pemanfaatan inovasi dapat memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun forum kemitraan riset tematik lintas sektor untuk mempercepat difusi inovasi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan di Provinsi Banten.</li> </ul>
B	Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan difusi inovasi untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan platform digital terpadu sebagai kanal utama untuk berbagi pengetahuan, mempublikasikan hasil riset, memperluas peluang kemitraan, serta mempromosikan produk dan inovasi lintas sektor yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan guna meningkatkan daya saing daerah;</li> <li>• Mengintegrasikan platform digital tersebut dengan <i>marketplace</i> agar proses hilirisasi inovasi, komersialisasi hasil riset, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha daerah dapat berlangsung lebih efektif dan inklusif;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi proses alih dan penerapan teknologi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM serta dunia usaha lokal untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi; dan</li> <li>• Menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi baru bagi pelaku usaha lokal sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, serta keberlanjutan lingkungan.</li> </ul>
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil riset secara berkala kepada perangkat daerah, dunia industri, akademisi, dan komunitas masyarakat untuk memperkuat pemanfaatan hasil penelitian dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan guna peningkatan daya saing daerah;</li> <li>• Mempublikasikan hasil-hasil riset yang relevan dengan upaya penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan degradasi</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>lingkungan melalui jurnal ilmiah, prosiding, maupun buku secara rutin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendokumentasikan seluruh hasil riset yang berkontribusi terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam repositori riset dan inovasi daerah, serta mengintegrasikannya dengan Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola oleh BRIN untuk memperluas akses dan perlindungan pengetahuan; dan</li> <li>• Menyusun mekanisme pendampingan berkelanjutan terhadap hasil riset hingga tahap implementasi, baik dalam bentuk dukungan perumusan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif agar manfaat riset dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Budaya Riset dan Inovasi</b>		
<b>A</b>	Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan kampanye “Banten Inovatif dan Kreatif” di berbagai sektor strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan guna peningkatan daya saing daerah;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi, edukasi publik, serta penyebarluasan hasil riset dan inovasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Memperkuat pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi Daerah dengan mengintegrasikannya pada agenda transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar inovasi yang dihasilkan lebih berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan mata pelajaran riset, inovasi, dan kewirausahaan dalam kurikulum muatan lokal SMA/SMK sebagai upaya menanamkan sejak dini pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah dan menyelesaikan tantangan sosial-ekonomi masyarakat; dan</li> <li>• Menyelenggarakan festival riset dan inovasi tematik sebagai ajang apresiasi, kolaborasi, dan pameran</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			hasil karya inovatif yang relevan dengan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Banten.
B	Apresiasi prestasi inovasi	Penguatan apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi yang berkontribusi pada transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah;</li> <li>• Memberikan insentif publikasi bagi peneliti yang berhasil mempublikasikan hasil riset terkait upaya penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan ke dalam jurnal, prosiding, atau buku bereputasi nasional maupun internasional guna mendorong motivasi dan keberlanjutan riset;</li> <li>• Mendorong pemberian penghargaan khusus bagi inovasi yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan di Provinsi Banten;</li> <li>• Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>kemajuan inovasi di berbagai sektor strategis untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, serta kesiapan inovasi daerah dalam menyelesaikan permasalahan utama daerah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan program beasiswa dan pembinaan bagi siswa SMA/SMK yang memiliki minat dan prestasi di bidang riset serta inovasi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai langkah awal membangun generasi muda inovatif yang berperan aktif dalam transformasi daerah berbasis keberlanjutan.</li> </ul>
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat fungsi PLUT sebagai inkubator bisnis berbasis riset dan pusat layanan inovasi terpadu yang berorientasi pada transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah;</li> <li>• Mendorong terbentuknya kemitraan strategis antara startup, BRIN, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lintas sektor guna mempercepat penerapan inovasi dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>wilayah, dan masalah lingkungan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun skema pendanaan awal (<i>seed funding</i>) bagi startup inovatif yang mengembangkan solusi teknologi, sosial, dan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.</li> </ul>
D	<p>Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat</p>	<p>Penguatan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan bank pengetahuan yang berfungsi sebagai pusat arsip data dan informasi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah;</li> <li>• Mendokumentasikan berbagai praktik baik dan kearifan lokal sebagai bagian dari sumber inspirasi inovasi untuk percepatan penyelesaian permasalahan utama daerah;</li> <li>• Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas guna memastikan keberlanjutan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan</li> <li>• Mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan hasil riset modern untuk menciptakan inovasi produk dan teknologi baru yang adaptif, berkelanjutan, serta</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			mampu memberikan solusi terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Banten.
<b>5 Keterpaduan Riset dan Inovasi</b>			
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Penguatan prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan agenda riset dan inovasi prioritas tahunan yang berorientasi penyelesaian permasalahan utama seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Mengintegrasikan kebutuhan riset dan inovasi dari berbagai perangkat daerah ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar arah kebijakan dan implementasi program lebih berbasis bukti dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan mekanisme <i>call for proposal</i> riset yang menyesuaikan dengan kebutuhan sektoral dan isu-isu strategis daerah untuk memastikan relevansi dan efektivitas hasil penelitian;</li> <li>• Menyusun skema evaluasi dan pemantauan efektivitas kegiatan riset dan inovasi dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendukung penguatan daya saing sehingga hasilnya dapat</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>diukur dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelaksanaan riset kolaboratif antara sektor publik, swasta, akademisi, dan komunitas masyarakat guna memperkuat sinergi multipihak dalam menghasilkan solusi inovatif untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.</li> </ul>
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun klaster inovasi daerah di wilayah-wilayah potensial sebagai pusat penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing serta penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Menghubungkan klaster inovasi tersebut dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga riset, serta sektor industri guna memperkuat kolaborasi pengetahuan dan transfer teknologi antar pemangku kepentingan;</li> <li>• Menyusun peta hubungan antar permasalahan sebagai dasar penguatan integrasi antar sektor dan peningkatan efisiensi</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>ekonomi daerah yang berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong terbentuknya kemitraan dan jejaring antar-klaster lintas daerah untuk memperluas skala dampak inovasi dan menciptakan sinergi pembangunan sosial-ekonomi regional; dan</li> <li>• Mengintegrasikan pengembangan klaster inovasi dengan strategi branding daerah yang menonjolkan identitas, keberlanjutan, dan potensi unggulan Banten dalam mewujudkan daya saing berbasis inovasi dan kreativitas.</li> </ul>
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional guna mempercepat transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah serta penyelesaian permasalahan utama seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Mengoptimalkan implementasi program nasional dari BRIN dan kementerian/lembaga terkait lainnya agar dapat diadaptasi secara efektif di tingkat daerah dalam</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<p>mendukung pembangunan berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan forum sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan arah riset, inovasi, dan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti;</li> <li>• Mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan terpadu lintas level pemerintahan guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kolaborasi riset dan inovasi daerah; dan</li> <li>• Menetapkan indikator kinerja bersama dalam bidang riset dan inovasi yang berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mempercepat peningkatan daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Keselarasan dengan Perkembangan Global</b>		
<b>A</b>	<p>Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah</p>	<p>Peningkatan kepedulian isu internasional untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarusutamakan prinsip <i>green economy</i>, <i>circular economy</i>, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan riset dan inovasi daerah untuk mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdaya saing dan berkelanjutan;</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelaksanaan riset kolaboratif yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi lingkungan, dan transformasi digital sebagai solusi atas permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan masalah lingkungan;</li> <li>• Menyelenggarakan forum riset internasional tentang inovasi dan pembangunan berkelanjutan guna memperluas jejaring kerja sama global serta memperkuat posisi Banten dalam ekosistem riset regional dan internasional;</li> <li>• Meningkatkan literasi global bagi ASN, peneliti, dan akademisi daerah agar mampu beradaptasi dengan dinamika pengetahuan global serta berkontribusi pada transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan; dan</li> <li>• Mengembangkan sistem pelaporan capaian SDGs berbasis riset dan data empiris untuk memantau kemajuan transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terukur dan berkelanjutan di tingkat daerah.</li> </ul>

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>			
B	Penguatan kerjasama internasional	Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis inovasi dan keberlanjutan untuk peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jejaring riset global dengan lembaga internasional seperti UNDP, JICA, dan ADB;</li> <li>• Mendorong <i>joint research</i> dan <i>knowledge exchange</i> dengan universitas luar negeri;</li> <li>• Menarik investasi asing untuk mendukung riset hijau dan digitalisasi ekonomi;</li> <li>• Menyusun strategi diplomasi riset daerah untuk branding Banten sebagai pusat inovasi hijau; dan</li> <li>• Meningkatkan partisipasi lembaga riset Banten dalam program riset global dan regional.</li> </ul>

## BAB 6

### PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Penyusunan RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 didasarkan pada paradigma bahwa riset dan inovasi bukan sekadar alat bantu teknokratis untuk pembangunan semata, melainkan merupakan pondasi pengetahuan yang harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. RIPJPID tidak hanya bertujuan untuk mendorong pemanfaatan riset dan inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, tetapi juga menegaskan pentingnya komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan *pentahelix* seperti pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan komunitas, serta media untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi sebagai pondasi ilmu pengetahuan jangka panjang.

RIPJPID disusun dengan mengintegrasikan dua kerangka utama yang saling memperkuat, yaitu *development of science* dan *science for development*. Kerangka pertama menekankan pada upaya sistematis untuk memperkuat dan membangun ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kerangka kedua menekankan pada pemanfaatan riset dan inovasi sebagai instrumen strategis untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Provinsi Banten yang kompleks dan dinamis. Kombinasi dari dua kerangka ini menjadikan RIPJPID sebagai dokumen yang bukan sekadar teknokratis, tetapi strategis dan transformatif dalam membangun Banten yang berdaya saing unggul.

Dengan memadukan kerangka *development of science* dan *science for development*, RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 menegaskan bahwa riset dan inovasi harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah pembangunan daerah. Kedua kerangka tersebut bukanlah pilihan yang saling menegasikan, melainkan dua sisi dari satu kesatuan strategi pembangunan berbasis pengetahuan. Hanya dengan membangun pondasi ilmu pengetahuan yang kuat, dan kemudian memanfaatkannya secara kontekstual untuk pembangunan, Provinsi Banten dapat mewujudkan transformasi menuju daerah yang berdaya saing unggul di masa depan.

Sementara itu, kedua kerangka tersebut tidak bekerja secara linier yang berangkat dari *development of science* dan berakhir di *science for development*, melainkan merupakan sebuah siklus yang terus berkesinambungan. Penguatan ekosistem riset dan inovasi akan menghasilkan pengetahuan baru yang lebih bermutu, relevan, dan aplikatif. Pengetahuan ini kemudian dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berbasis bukti untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah dan menghasilkan inovasi berbagai PUD yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya, pemanfaatan tersebut akan menciptakan umpan balik berupa pengetahuan dan teknologi baru, dan daya saing daerah akan mendorong komitmen bersama untuk terus mengembangkan, memperbesar, dan memutakhirkan ekosistem riset dan inovasi yang pada akhirnya mendorong lahirnya agenda-agenda riset selanjutnya.

Dalam konteks ini, pembangunan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya dalam pembangunan bukanlah dua tahap terpisah, tetapi saling memperkuat dalam transformasi riset dan inovasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, RIPJPID tidak boleh dipahami sebagai dokumen yang bersifat final, melainkan sebagai *living document* yang harus terus diperbarui dan diperkuat seiring dengan berkembangnya dinamika pembangunan daerah, perubahan teknologi, serta tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Provinsi Banten dari waktu ke waktu.

6.2. Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Tabel 29 Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi						
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi berbagai perda, pergub, dan/atau kebijakan daerah eksisting yang mendukung dan menghambat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penyusunan naskah kebijakan dan/atau rancangan perda atau pergub dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penetapan dan implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi dan evaluasi kebijakan dan/atau perda atau pergub untuk mengukur efektivitas keberhasilan dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Penyusunan naskah	Penetapan dan	Implementasi kebijakan	Implementasi kebijakan	Implementasi dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			kebijakan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	implementasi kebijakan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kebijakan untuk mengukur efektivitas keberhasilan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Penyusunan panduan teknis dan SOP riset dan	Penetapan dan implementasi panduan	Implementasi panduan teknis dan SOP riset dan	Implementasi panduan teknis dan SOP riset dan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
B	Penataan basis data	Tersedianya basis data yang kuat untuk	Pengembangan <i>Creative Innovation Database</i>	Pengujian dan pemanfaatan <i>Creative</i>	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Database</i>	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Database</i>	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	riset dan inovasi	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk memetakan pelaku inovasi, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif	<i>Innovation Database</i> untuk memetakan pelaku inovasi, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif	untuk memetakan pelaku inovasi, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif	untuk memetakan pelaku inovasi, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan <i>Creative Innovation Database</i> dalam memetakan pelaku inovasi, kegiatan riset, dan hasil inovasi PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan sistem repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan	Pengujian dan pemanfaatan sistem repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah	Pemanfaatan sistem repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan	Pemanfaatan sistem repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan sistem repositori hasil riset yang

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			n dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	an dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	an dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan sistem informasi berbasis kewilayahan untuk pemetaan potensi bahan baku, sentra produksi,	Pengujian dan pemanfaatan sistem informasi berbasis kewilayahan untuk pemetaan potensi	Pemanfaatan sistem informasi berbasis kewilayahan untuk pemetaan potensi bahan baku,	Pemanfaatan sistem informasi berbasis kewilayahan untuk pemetaan potensi bahan baku,	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan sistem informasi berbasis kewilayahan untuk pemetaan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			hingga pemasaran dan promosi PUD Ekonomi Kreatif	bahan baku, sentra produksi, hingga pemasaran dan promosi PUD Ekonomi Kreatif	sentra produksi, hingga pemasaran dan promosi PUD Ekonomi Kreatif	sentra produksi, hingga pemasaran dan promosi PUD Ekonomi Kreatif	potensi bahan baku, sentra produksi, hingga pemasaran dan promosi PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi permasalahan utama serta tantangan dan peluang dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti di daerah untuk mendukung	Pengembangan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan	Pengujian dan pemanfaatan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat	Pemanfaatan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kepentingan terkait untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
C	Pengembangan infrastruktur	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan <i>Creative Innovation Hub</i> di masing-masing sektor unggulan untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengujian dan pemanfaatan <i>Creative Innovation Hub</i> di masing-masing sektor unggulan	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Hub</i> di masing-masing sektor unggulan untuk pengembangan	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Hub</i> di masing-masing sektor unggulan untuk pengembangan	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>Creative Innovation Hub</i> di masing-masing sektor

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
				untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	unggulan untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
		Pengembangan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk	Pengujian dan pemanfaatan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau	Pemanfaatan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk	Pemanfaatan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau	

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi kapasitas perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset untuk pengembangan	Peningkatan dan pemanfaatan perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset	Pemanfaatan perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset untuk pengembangan	Pemanfaatan perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset untuk pengembangan	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			PUD Ekonomi Kreatif	untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	hasil riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi kapasitas PLUT eksisting dan kesenjangan untuk mengoptimalkan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penyusunan naskah kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengujian dan implementasi fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan fungsi PLUT sebagai pusat layanan inovasi terpadu pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadahi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi tantangan dan peluang skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding scheme</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding scheme</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding scheme</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding scheme</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding scheme</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			Identifikasi tantangan dan peluang skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi riset dengan skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa,	Pengembangan skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan skema kompetitif untuk penelitian dosen,	Implementasi skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan skema kompetitif untuk penelitian dosen,	Implementasi skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan skema kompetitif untuk penelitian dosen,	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	yang memiliki potensi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung pengembang	Penyusunan naskah kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh	Penetapan dan implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kebijakan terkait pemberian insentif bagi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
		n PUD Ekonomi Kreatif	hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan, peluang, dan kesiapan daerah dalam memberikan layanan fasilitasi HKI di daerah untuk	Pengembangan layanan fasilitasi HKI di daerah untuk mendukung pengembangan PUD	Pengujian dan implementasi layanan fasilitasi HKI di daerah untuk mendukung pengembangan	Implementasi layanan fasilitasi HKI di daerah untuk mendukung pengembangan PUD	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan layanan fasilitasi HKI di daerah untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan dan peluang skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan untuk mendukung	Implementasi skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialis	Implementasi skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialis	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
				pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
2	Kapabilitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi						
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan <i>Creative Innovation Council</i> sebagai forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas teknis, perguruan tinggi, industri, pelaku usaha,	Pengujian dan pemanfaatan <i>Creative Innovation Council</i> sebagai forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas teknis, perguruan	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Council</i> sebagai forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas teknis, perguruan	Pemanfaatan <i>Creative Innovation Council</i> sebagai forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas teknis, perguruan	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>Creative Innovation Council</i> sebagai forum koordinasi lintas sektor permanen antara Bappeda, dinas teknis, perguruan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			dan komunitas kreatif untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tinggi, industri, pelaku usaha, dan komunitas kreatif untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelaku usaha, dan komunitas kreatif untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelaku usaha, dan komunitas kreatif untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tinggi, industri, pelaku usaha, dan komunitas kreatif untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan mekanisme <i>reseach and</i>	Implementasi mekanisme <i>reseach and</i>	Implementasi mekanisme <i>reseach and</i>	Implementasi mekanisme <i>reseach and</i>	Implementasi dan evaluasi untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			<i>innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mengukur efektivitas keberhasilan mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk	Identifikasi kapasitas PLUT eksisting dan	Penyusunan naskah kebijakan untuk	Pengujicobaan dan implementasi fungsi PLUT	Implementasi fungsi PLUT dalam menyediakan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kesenjangan fungsionalnya dalam menyediakan akses hasil riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	memperkuat fungsi PLUT dalam menyediakan akses hasil riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dalam menyediakan akses hasil riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	akses hasil riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan fungsi PLUT dalam menyediakan akses hasil riset, pelatihan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan jaringan	Implementasi <i>shared</i>	Implementasi <i>shared</i>	Implementasi <i>shared</i>	Implementasi dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			<i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> di sektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Penyusunan panduan teknis dan SOP	Penetapan dan implementasi panduan	Implementasi panduan teknis dan SOP	Implementasi panduan teknis dan SOP	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
3	Kemitraan Riset dan Inovasi						

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi dan peninjauan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penyusunan, dan penandatanganan nota kesepahaman serta pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			Penyusunan panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Petepatan dan implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam mendukung pengembangan PUD	Implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
				Ekonomi Kreatif			
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi kapasitas PLUT eksisting dan kesenjangan fungsionalnya sebagai unit layanan adopsi teknologi baru ( <i>technology transfer</i> ) dan hilirisasi produk hasil riset bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk pengembangan	Penyusunan naskah kebijakan untuk memperkuat fungsi PLUT sebagai unit layanan adopsi teknologi baru ( <i>technology transfer</i> ) dan hilirisasi produk hasil riset bagi UMKM dan pelaku usaha	Pengujian dan implementasi fungsi PLUT sebagai unit layanan adopsi teknologi baru ( <i>technology transfer</i> ) dan hilirisasi produk hasil riset bagi UMKM dan pelaku usaha	Implementasi fungsi PLUT sebagai unit layanan adopsi teknologi baru ( <i>technology transfer</i> ) dan hilirisasi produk hasil riset bagi pelaku usaha PUD	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan fungsi PLUT sebagai unit layanan adopsi teknologi baru ( <i>technology transfer</i> ) dan hilirisasi produk hasil riset bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk pengembangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			PUD Ekonomi Kreatif	lokal untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	an PUD Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan, yang dihubungkan dengan <i>marketplace</i> untuk mempermudah	Pengujian dan pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan, yang dihubungkan	Pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan, yang dihubungkan dengan <i>marketplace</i>	Pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan, yang dihubungkan dengan <i>marketplace</i>	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan, yang dihubungkan dengan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dengan <i>marketplace</i> untuk mempermudah hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk mempermudah hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk mempermudah hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>marketplace</i> untuk mempermudah hilirisasi inovasi, komersialisasi, dan akses ke pasar untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan	Pengembangan konsep dan proses bisnis <i>Banten Innovation</i>	Penyelenggara-an <i>Banten Innovation Expo and Festival</i>	Penyelenggara-an <i>Banten Innovation Expo and Festival</i>	Penyelenggara-an <i>Banten Innovation Expo and Festival</i>	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	dan inovasi kepada pelaku inovasi	inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>Expo and Festival</i> sebagai ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi dan produk inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tahunan sebagai ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi dan produk inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tahunan yang menjadi ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi produk inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tahunan yang menjadi ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi dan produk inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	keberhasilan <i>Banten Innovation Expo and Festival</i> tahunan yang menjadi ajang pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi dan produk inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan konsep dan proses bisnis pendampingan	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
4	Budaya Riset dan Inovasi						
A		Tersedianya promosi dan	Pengembangan konsep dan	Pemanfaatan media digital	Pemanfaatan media digital	Pemanfaatan media digital	Pemanfaatan dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	Promosi dan kampanye inovasi	kampanye inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	proses bisnis untuk mengkampanye e-kan Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk mengukur efektivitas keberhasilan media digital sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan Gelar	Pengembangan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi eksisting dalam kapasitasnya untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk dapat mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk dapat mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk dapat mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	keberhasilan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk dapat mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan dan peluang untuk mengembang-	Pengembangan mata ajar riset dasar dan ekonomi	Penguji cobaa n dan penyelenggaraan mata	Penyelenggara-an mata ajar riset dasar dan	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			kan mata ajar riset dasar dan ekonomi kewirausahaan berbasis potensi khas dan/atau unggulan daerah ke dalam muatan lokal kurikulum tingkat pendidikan SMA/SMK untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kewirausahaan berbasis potensi khas dan/atau unggulan daerah ke dalam muatan lokal kurikulum tingkat pendidikan SMA/SMK untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	ajar riset dasar dan ekonomi kewirausahaan berbasis potensi khas dan/atau unggulan daerah ke dalam muatan lokal kurikulum tingkat pendidikan SMA/SMK untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	ekonomi kewirausahaan berbasis potensi khas dan/atau unggulan daerah ke dalam muatan lokal kurikulum tingkat pendidikan SMA/SMK untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	efektivitas keberhasilan mata ajar riset dasar dan ekonomi kewirausahaan berbasis potensi khas dan/atau unggulan daerah ke dalam muatan lokal kurikulum tingkat pendidikan SMA/SMK untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan sistem untuk memantau perkembangan rantai nilai PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global	Pengujian dan pemanfaatan sistem untuk memantau perkembangan rantai nilai PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global	Pemanfaatan sistem untuk memantau perkembangan rantai nilai PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global	Pemanfaatan sistem untuk memantau perkembangan rantai nilai PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan sistem untuk memantau perkembangan rantai nilai PUD Ekonomi Kreatif untuk memastikan keberlanjutan pengembangannya sampai pasar global

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			Pengembangan konsep dan proses bisnis pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan	Pengujian dan implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan	Implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan	Implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi terkait pengembangan PUD Ekonomi Kreatif yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
C	Pengembangan perusahaan	Tersedianya pengembangan perusahaan	Pengembangan konsep dan proses bisnis	Pengujian dan implementasi	Implementasi pelatihan manajemen	Implementasi pelatihan manajemen	Implementasi dan evaluasi untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	pemula berbasis riset	pemula berbasis riset untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mengukur efektivitas keberhasilan pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan dan peluang penerapan skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi	Pengembangan dan uji coba skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup	Implementasi skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai	Implementasi skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema pendanaan awal

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			startup inovatif sebagai insentif usaha untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	inovatif sebagai insentif usaha untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	insentif usaha untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	insentif usaha untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Pengembangan jejaring <i>creative startup community</i> di setiap kota dan kabupaten untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pemanfaatan jejaring <i>creative startup community</i> untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pemanfaatan jejaring <i>creative startup community</i> untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pemanfaatan jejaring <i>creative startup community</i> untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan jejaring <i>creative startup community</i> untuk mendukung

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
							pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi tantangan dan peluang dalam membangun bank pengetahuan ( <i>knowledge bank</i> ) yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan	Pengembangan dan uji coba pemanfaatan bank pengetahuan ( <i>knowledge bank</i> ) yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghu-	Pemanfaatan bank pengetahuan ( <i>knowledge bank</i> ) yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset dan inovasi	Pemanfaatan bank pengetahuan ( <i>knowledge bank</i> ) yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset dan inovasi	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan bank pengetahuan ( <i>knowledge bank</i> ) yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			riset dan inovasi modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	bungkannya dengan riset dan inovasi modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	-nya dengan riset dan inovasi modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Penyusunan panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk	Petepatan dan implementasi panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis	Implementasi panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk	Implementasi panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	komunitas untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	tradisional berbasis komunitas untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi						
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk	Tersedianya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi,	Implementasi <i>call for proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai,	Implementasi <i>call for proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai,	Implementasi <i>call for proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai,	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>call for proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset dan inovasi dalam

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		dan/atau pemasaran produk unggulan serta pengembangan mekanisme <i>call for proposal</i> dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan dalam mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
B	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk	Terselenggaranya pengembangan kluster inovasi untuk mendukung pengembangan	Pengembangan kluster inovasi di wilayah potensial sebagai <i>Creative Innovation Hub</i>	Pengujian dan pemanfaatan kluster inovasi di wilayah potensial	Pemanfaatan kluster inovasi di wilayah potensial sebagai <i>Creative</i>	Pemanfaatan kluster inovasi di wilayah potensial sebagai <i>Creative</i>	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kluster inovasi di

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	unggulan daerah	n PUD Ekonomi Kreatif	yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	sebagai <i>Creative Innovation Hub</i> yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>Innovation Hub</i> yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>Innovation Hub</i> yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	wilayah potensial sebagai <i>Creative Innovation Hub</i> yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			Identifikasi permasalahan utama serta peluang dan tantangan pengembangan rantai nilai dan jaringan pasok tiap klaster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan dan uji coba data dan informasi peta rantai nilai jaringan pasok tiap klaster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif Banten Inovatif dan Kreatif	Pemanfaatan data dan informasi peta rantai nilai jaringan pasok tiap klaster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif dan mengintegras i-kannya dengan branding Banten Inovatif dan Kreatif	Pemanfaatan data dan informasi peta rantai nilai jaringan pasok tiap klaster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif dan mengintegras i-kannya dengan branding Banten Inovatif dan Kreatif	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan peta rantai nilai jaringan pasok tiap klaster inovasi untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersesuaikannya kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Identifikasi berbagai perda, pergub, dan/atau kebijakan daerah eksisting yang bertentangan dan/atau tidak selaras dengan kebijakan nasional yang menghambat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penyusunan naskah kebijakan dan/atau rancangan perda atau pergub untuk memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penetapan dan implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Implementasi dan evaluasi kebijakan dan/atau perda atau pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan dan	Pengembangan sistem	Penguji cobaan dan	Implementasi sistem	Implementasi dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			peluang dalam mengembangkan sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	implementasi sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	untuk mengukur efektivitas keberhasilan sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
6	Penyelarasan	dengan Perkembangan Global					
A	Peningkatan kepedulian isu internasional	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan riset,	Implementasi kebutuhan riset, pengembang	Implementasi kebutuhan riset, pengembang	Implementasi kebutuhan riset, pengembang	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
	yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk meningkatkan	an produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mening-	an produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mening-	an produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mening-	efektivitas keberhasilan kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			peluang keberterimaan produk unggulan di pasar global dalam rangka mendukung PUD Ekonomi Kreatif	katkan peluang keberterimaan produk unggulan di pasar global dalam rangka mendukung PUD Ekonomi Kreatif	katkan peluang keberterimaan produk unggulan di pasar global dalam rangka mendukung PUD Ekonomi Kreatif	katkan peluang keberterimaan produk unggulan di pasar global dalam rangka mendukung PUD Ekonomi Kreatif	hijau untuk mening-katkan peluang keberterimaan produk unggulan di pasar global dalam rangka mendukung PUD Ekonomi Kreatif
B	Penguatan kerjasama internasional	Terselenggara nya kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD	Identifikasi dan penjajakan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO,	Penyusunan, dan penandatangan-an nota kesepahaman serta pelaksanaan kemitraan lembaga	Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan	Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
		Ekonomi Kreatif	dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif
			Identifikasi tantangan, peluang, dan kesiapan	Pengembangan konsep dan model bisnis	Pengujian dan implementasi layanan	Implementasi layanan fasilitasi pendampingan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			daerah dalam memberikan layanan fasilitasi pendampingan ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional	layanan fasilitasi pendampingan ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional	fasilitasi pendampingan ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional	n ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional	efektivitas keberhasilan layanan fasilitasi pendampingan ekspor produk PUD Ekonomi Kreatif ke pasar internasional
			Identifikasi peluang dan tantangan serta analisis manfaat dan dampak program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional	Pengembangan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang	Penguji cobaan dan pelaksanaan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan	Pelaksanaan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan yang	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>							
			bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif

6.3. Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Tabel 30 Peta Jalan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi						
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi berbagai perda, pergub, dan/atau kebijakan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja,	Penyusunan naskah kebijakan dan/atau rancangan perda atau pergub dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM,	Penetapan dan implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM,	Implementasi kebijakan dan/atau perda atau pergub dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja,	Implementasi dan evaluasi kebijakan dan/atau perda atau pergub untuk mengukur efektivitas keberhasilan dalam rangka mendukung peningkatan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Penyusunan naskah kebijakan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Penetapan dan implementasi kebijakan terkait pemberian insentif fiskal	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi	Implementasi dan evaluasi kebijakan untuk mengukur efektivitas keberhasilan terkait

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas	lembaga dan individu yang berkontribusi mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	lembaga dan individu yang berkontribusi mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi lembaga dan individu yang berkontribusi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
				lingkungan hidup			lingkungan hidup
			Penyusunan panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan	Penetapan dan implementasi panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset dalam mendukung	Implementasi panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset dalam mendukung peningkatan kualitas	Implementasi panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset dalam mendukung peningkatan kualitas	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP riset dan inovasi daerah yang menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan hilirisasi hasil riset dalam mendukung

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
B	Penataan basis data	Tersedianya basis data yang kuat untuk	Pengembangan sistem repositori hasil riset yang	Pengujian dan pemanfaatan sistem	Pemanfaatan sistem repositori hasil riset	Pemanfaatan sistem repositori hasil riset	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
	riset dan inovasi	mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	efektivitas keberhasilan sistem repositori hasil riset yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			Identifikasi permasalahan utama serta tantangan dan peluang dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti di daerah untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	Pengembangan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan,	Penguji cobaan dan pemanfaatan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti	Pemanfaatan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, penganggura	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk penyelesaian permasalahan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			dan masalah lingkungan	pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	n, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan
C	Pengembangan infrastuktur	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Pengembangan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau	Pengujian laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah	Pemanfaatan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau	Pemanfaatan laboratorium riset, laboratorium produk, dan laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan laboratorium riset, laboratorium produk, dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
		peningkatan daya saing	dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	laboratorium inovasi sosial yang dikelola oleh daerah dan/atau dikerjasamakan dengan BRIN atau perguruan tinggi mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
			Identifikasi kapasitas perpustakaan	Peningkatan perpustakaan digital	Pemanfaatan perpustakaan digital	Pemanfaatan perpustakaan digital	Pemanfaatan dan evaluasi untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	mengukur efektivitas keberhasilan perpustakaan digital daerah dan jurnal ilmiah yang dikelola oleh daerah sebagai media publikasi hasil riset dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadahi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi tantangan dan peluang skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Pengembang an skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Implementasi skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Implementasi skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema kolaborasi pendanaan riset ( <i>co-funding</i> ) dengan industri, UMKM, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			peningkatan daya saing	peningkatan daya saing	peningkatan daya saing	peningkatan daya saing	untuk peningkatan daya saing
			Identifikasi tantangan dan peluang skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi riset dengan skema	Pengembangan skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan	Implementasi skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan	Implementasi skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema anggaran riset dan inovasi khusus yang dialokasikan dari APBD, perguruan tinggi, industri, lembaga donor, dan/atau dana abadi dengan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	skema kompetitif untuk penelitian dosen, mahasiswa, dan komunitas lokal yang memiliki potensi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Penyusunan naskah kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Penetapan dan implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Implementasi kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kebijakan terkait pemberian insentif bagi pelaku inovator yang memperoleh hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			peningkatan daya saing	lingkungan untuk peningkatan daya saing	peningkatan daya saing	peningkatan daya saing	untuk peningkatan daya saing
			Identifikasi tantangan, peluang, dan kesiapan daerah dalam memberikan layanan fasilitasi HKI di daerah dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan	Pengembangan layanan fasilitasi HKI di daerah dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengujian dan implementasi layanan fasilitasi HKI di daerah dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi layanan fasilitasi HKI di daerah dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan layanan fasilitasi HKI di daerah dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			untuk peningkatan daya saing				peningkatan daya saing
			Identifikasi tantangan dan peluang skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,	Pengembangan skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan dalam rangka mendukung	Implementasi skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan dalam rangka mendukung	Implementasi skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan dalam rangka mendukung	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema <i>royalty-sharing</i> kepada peneliti, dosen, dan periset lainnya untuk hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan dalam rangka

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi						
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan	Pengembangan mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk	Implementasi mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset	Implementasi mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset	Implementasi mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan mekanisme <i>reseach and innovation matchmaking</i> antara

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
		untuk peningkatan daya saing	penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	kebutuhan perangkat daerah dengan agenda riset untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan jaringan <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	Implementasi <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	Implementasi <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	Implementasi <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative center</i> untuk penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
							dan masalah lingkungan
			Penyusunan panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk	Penetapan dan implementasi panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Implementasi panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi	Implementasi panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana riset dan inovasi	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			memastikan keberlanjutan dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk memastikan keberlanjutan dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk memastikan keberlanjutan dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan dalam penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
3	<b>Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi dan penjabaran kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Penyusunan, dan penandatangan nota kesepahaman serta pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung transformasi	Pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pelaksanaan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga donor, industri, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			peningkatan daya saing	ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing			peningkatan daya saing
			Penyusunan panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dalam rangka	Petepatan dan implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran,	Implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan	Implementasi panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung jawab, dan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan panduan teknis dan SOP tata kelola kemitraan riset dan inovasi terkait pembagian peran, tanggung

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	tanggung jawab, dan manfaat dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	manfaat dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	manfaat dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	jawab, dan manfaat dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan	Pengembangan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan	Pengujian dan pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama	Pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan,	Pemanfaatan platform digital sebagai kanal utama berbagi pengetahuan,	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan platform digital

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
		lingkungan untuk peningkatan daya saing	peluang kemitraan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan	produk inovatif, dan peluang kemitraan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas	produk inovatif, dan peluang kemitraan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas	sebagai kanal utama berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
				kualitas lingkungan hidup	lingkungan hidup	lingkungan hidup	
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan konsep dan proses bisnis pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung	Penyelenggara-an pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi inovatif untuk mendukung	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan, baik dalam pendampingan kebijakan maupun hilirisasi produk dan teknologi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	inovatif untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
4	Budaya Riset dan Inovasi						
A	Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Pengembangan konsep dan proses bisnis untuk mengkampanye e-kan Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor dalam	Pemanfaatan media digital sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor dalam mendukung	Pemanfaatan media digital sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor dalam mendukung	Pemanfaatan media digital sebagai ajang kampanye Banten Inovatif dan Kreatif di berbagai sektor dalam mendukung	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan media digital sebagai ajang kampanye Banten Inovatif

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target					
			2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Tema Prioritas:</b>								
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>								
		peningkatan daya saing	mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	dan Kreatif di berbagai dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Identifikasi kekuatan dan kelemahan	Pengembangan Gelar Teknologi	Penyelenggara-an Gelar Teknologi	Penyelenggara-an Gelar Teknologi	Penyelenggara-an Gelar Teknologi	Penyelenggaraan dan evaluasi untuk

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			penyelenggara Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi Pelayan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi eksisting dalam kapasitasnya untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	mengukur efektivitas keberhasilan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dan Lomba Cipta Inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	dan masalah lingkungan	dan masalah lingkungan	dan masalah lingkungan	infrastruktur, dan masalah lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan konsep dan proses bisnis pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengujian dan implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan konsep dan proses bisnis pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengujian dan implementasi pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan pelatihan manajemen bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			Identifikasi tantangan dan peluang penerapan skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan dan pengujian skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi tantangan dan peluang dalam membangun <i>Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset modern untuk mendukung penyelesaian permasalahan	Pengembangan dan uji coba pemanfaatan <i>Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset modern untuk mendukung	Pemanfaatan <i>Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset modern untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama	Pemanfaatan <i>Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset modern untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>Knowledge Bank</i> yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, teknik produksi, dan narasi budaya dan menghubungkannya dengan riset modern untuk mendukung penyelesaian

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan
			Penyusunan panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan	Pengujian, penentuan dan implementasi panduan	Implementasi panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan	Implementasi panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			tradisional berbasis komunitas untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	tradisional berbasis komunitas untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	tradisional berbasis komunitas untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	panduan teknis dan SOP perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi						
A	Prakarsa pengembang	Tersedianya prakarsa	Identifikasi dan pemetaan	Implementasi <i>call for</i>	Implementasi <i>call for</i>	Implementasi <i>call for</i>	Implementasi dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
	an riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi serta pengembangan mekanisme <i>call for proposal</i> untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	<i>proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	<i>proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	<i>proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	untuk mengukur efektivitas keberhasilan <i>call for proposal</i> sesuai dengan peta kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan
B	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan klaster inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan klaster inovasi yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung penyelesaian	Pengujian dan pemanfaatan klaster inovasi yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media)	Pemanfaatan klaster inovasi yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung	Pemanfaatan klaster inovasi yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) untuk mendukung	Pemanfaatan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan klaster inovasi yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	media) untuk mendukung penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan
C	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah	Tersesuaikannya kebijakan antara Pemerintah	Identifikasi berbagai perda, pergub, dan/atau	Penyusunan naskah kebijakan dan/atau	Penetapan dan implementasi kebijakan	Implementasi kebijakan dan/atau perda atau	Implementasi dan evaluasi kebijakan dan/atau perda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
	Pusat dan Pemerintah Daerah	Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	kebijakan daerah eksisting yang bertentangan dan/atau tidak selaras dengan kebijakan nasional yang menghambat transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	rancangan perda atau pergub untuk memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	dan/atau perda atau pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	atau pergub yang memperkuat sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing
			Identifikasi permasalahan	Pengembangan sistem	Penguji cobaan dan	Implementasi sistem	Implementasi dan evaluasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			serta tantangan dan peluang dalam tata kelola sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur,	implementasi sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan	pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan	untuk mengukur efektivitas keberhasilan sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten/kota) untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	dan masalah lingkungan	infrastruktur, dan masalah lingkungan	dan masalah lingkungan	infrastruktur, dan masalah lingkungan
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan riset, pengembangan teknologi, serta solusi inovasi yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi	Implementasi kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan	Implementasi kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan	Implementasi kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan/atau pemasaran produk unggulan	Implementasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			digital, dan ekonomi hijau untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	dan/atau pemasaran produk unggulan yang disesuaikan dengan isu global seperti SDGs, Paris Agreement, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
				wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan
B	Penguatan kerjasama internasional	Terselenggara nya kerjasama internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Identifikasi dan peninjauan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara	Penyusunan, dan penandatangan nota kesepahaman serta pelaksanaan kemitraan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset	Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk	Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas keberhasilan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, dan lembaga riset lainnya serta perguruan tinggi mancanegara

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	lainnya serta perguruan tinggi mancanegara untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			Identifikasi peluang dan tantangan serta analisis manfaat dan dampak program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian permasalahan utama daerah seperti	Pengembangan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, penganggura	Pengujian dan pelaksanaan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian permasalahan utama daerah seperti	Pelaksanaan program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, penganggura	Pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tema Prioritas:</b>							
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>							
			kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	n, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	n, ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan	ketimpangan wilayah dan infrastruktur, dan masalah lingkungan

## BAB 7

### RENCANA AKSI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### 7.1. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah dan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten disusun sebagai instrumen implementatif peta jalan penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten untuk tahun 2025–2030. Penyusunan rencana aksi ini didasarkan pada paradigma bahwa riset dan inovasi bukan hanya sekadar instrumen teknokratis pembangunan, melainkan pondasi pengetahuan yang harus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menekankan penguatan ekosistem riset dan inovasi melalui pengembangan regulasi, infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme kolaborasi, budaya riset yang inklusif, serta kesesuaian dengan isu global. Rencana ini terbagi ke dalam beberapa program konkrit yang disusun berdasarkan enam elemen utama ekosistem, yakni kebijakan dan infrastruktur, kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan antar aktor dan sektor, serta keselarasan dengan isu nasional dan global. Penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti, yang kemudian mendorong pengembangan produk-produk unggulan serta penyelesaian permasalahan utama daerah.

Penyusunan rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten, tidak bersifat kaku dan ketat, melainkan dinamis menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder. Hal ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dalam merencanakan kebutuhan riset maupun gagasan inovasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Diharapkan rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten tetap relevan, adaptif, dan mampu merespons tantangan aktual yang muncul di daerah dalam lima tahun ke depan.

Instrumen implementatif terkait rencana aksi penguatan ekosistem riset dan inovasi Provinsi Banten akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam RKPD tahunan.

7.2. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Tabel 31. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi					
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan kebijakan terkait tata kelola riset dan inovasi di daerah	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan kebijakan penguatan sektor unggulan daerah seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata dalam mendukung PUD Ekonomi Kreatif	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
					perlindungan hak kekayaan intelektual	Kelautan dan Perikanan
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya basis data yang kuat untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan basis data riset dan inovasi di daerah, sistem repositori hasil riset yang terintegrasi, serta <i>dashboard</i> rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan basis data pelaku usaha inovatif yang mendukung	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
C	Pengembangan infrastruktur	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan infrastruktur dasar untuk riset dan inovasi di daerah	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			strategis pariwisata sebagai etalase pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadahi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan riset dan inovasi multi-pihak ( <i>co-funding scheme</i> ) dan anggaran riset dan inovasi khusus dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan layanan fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
2	Kapabilitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi					
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor	3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
	pemangku kepentingan	mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif		kekayaan intelektual	Dinas Kelautan dan Perikanan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penguatan kapasitas PLUT dalam menyediakan akses hasil riset, pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
				Pengembangan jaringan <i>shared facility</i> dan <i>tecno-creative</i>	2.17.08	Program pengembangan UMKM

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			<i>center</i> di berbagai sektor unggulan daerah seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata untuk pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			Perindustrian dan Perdagangan
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
3	Kemitraan Riset dan Inovasi					
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penguatan kemitraan berbasis <i>pentahelix</i> dengan berbagai pihak dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2.18.03	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
				5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penguatan kapasitas PLUT sebagai unit layanan adopsi teknologi baru dan hiliriasi hasil riset serta pengembangan kapasitas pelaku kreatif melalui pendampingan dan konsultasi usaha untuk mendorong penguatan rantai nilai	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			
			Pengembangan platform digital sebagai kanal berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan yang dihubungkan dengan <i>marketplace</i> untuk meningkatkan peluang akses ke pasar dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata
				3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Penyelenggaraan pameran riset dan inovasi seperti temu inovator, promosi teknologi baru dan mutakhir, serta	5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
	kepada pelaku inovasi	untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	<i>launching</i> produk inovatif dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			
			Pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan dalam tahap pengembangan usaha hingga hilirisasi produk dan teknologi inovatif dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
4	Budaya Riset dan Inovasi					
A	Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya promosi dan kampanye	Pengembangan mata ajar riset dasar dan ekonomi	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
		inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	kewirausahaan berbasis potensi khas unggulan daerah dalam muatan lokal kurikulum pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk memperkenalkan sedari dini dan meningkatkan talenta anak muda dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan <i>branding</i> produk unggulan di berbagai sektor serta festival inovasi untuk	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			meningkatkan citra produk secara kompetitif dan menarik minat masyarakat dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung	Pemberian penghargaan dalam bentuk hibah dan insentif bagi pelaku riset dan inovasi yang	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
		pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	memiliki kontribusi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan sistem informasi untuk memantau keberlanjutan perkembangan rantai nilai produk unggulan dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
C	Pengembangan perusahaan	Tersedianya pengembangan perusahaan	Penguatan kapasitas PLUT sebagai unit pelatihan manajemen	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
	pemula berbasis riset	pemula berbasis riset untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	bisnis berbasis teknologi bagi startup untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan jejaring <i>creative startup community</i> untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penerapan skema pendanaan awal ( <i>seed funding</i> ) bagi startup inovatif sebagai insentif usaha untuk	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
D	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya inventarisasi dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung pengembangan	Pengembangan bank pengetahuan yang mengarsipkan pengetahuan tradisional, kekayaan sumber daya kearifan lokal, teknologi masyarakat, teknik produksi, dan narasi budaya dengan menghubungkannya dengan riset dan	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
		PUD Ekonomi Kreatif	inovasi modern untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi					
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi	Tersedianya prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan agenda riset dan inovasi berdasarkan peta kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan metode pemasaran yang sesuai kebutuhan daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
	permasalahan daerah					
B	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan	Terselenggaranya pengembangan kluster inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan kluster inovasi di wilayah potensial yang menghubungkan berbagai unsur <i>pentahelix</i> untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM
				3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan data dan informasi peta rantai nilai dan	2.16.03	Program pengelolaan	Dinas Komunikas Informatika

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			jaringan pasok produk unggulan tiap klaster inovasi untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif		aplikasi informatika	Statistik dan Persandian
C	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersesuaikannya kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Penguatan kebijakan melalui harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan untuk	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			mempercepat pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global					
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi perkembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pemetaan kebutuhan riset, pengembangan produk, penguatan rantai nilai, transfer teknologi, promosi, dan metode pemasaran yang disesuaikan dengan isu dan standar global seperti SDGs, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk meningkatkan peluang keberterimaan di pasar global dalam	3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.26.05				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata	
5.05.03				Program riset dan inovasi daerah	Bappeda	

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas: PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			pengembangan PUD Ekonomi Kreatif			
B	Penguatan kerjasama internasional	Terselenggaranya kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	Pengembangan layanan fasilitasi pendampingan ekspor produk unggulan untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	3.26.04	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3.30.05	Program pengembangan ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>PUD Ekonomi Kreatif Provinsi Banten</b>						
			Penguatan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, lembaga riset, lembaga donor, serta perguruan tinggi mancanegara untuk mendukung pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
			Penyelenggaraan <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa potensial yang menaruh perhatian terhadap pengembangan PUD Ekonomi Kreatif	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

7.3. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Tabel 32. Rencana Aksi Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Provinsi Banten dalam Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi					
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya kebijakan di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan kebijakan untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan kebijakan untuk mendorong pemerataan infrastruktur pembangunan dan	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
			interkonektivitas antar wilayah			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan kebijakan untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik	4.01.03	Program pemerintahan dan otonomi daerah	Sekretariat Daerah
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan kebijakan untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
B	Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya basis data yang kuat untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Penguatan basis data kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan penyebaran informasi lapangan kerja	1.06.05	Program perlindungan jaminan sosial	Dinas Sosial
			Penguatan basis data untuk pelayanan kemudahan perizinan usaha dan pengamanan informasi publik	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk	Dinas Komunikas Informatika

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
					pengamanan informasi	Statistik dan Persandian
			Penguatan basis data untuk pemberian informasi pencemaran lingkungan hidup	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
C	Pengembangan infrastruktur	Tersedianya infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial,	Pengembangan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
		dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, dan pemerataan serta interkonektivitas wilayah			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
				1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2.11.03	Program pengendalian pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
					dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran yang memadahi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan riset dan inovasi multi-pihak ( <i>co-funding scheme</i> ) dan anggaran riset dan inovasi khusus dalam mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan	Pengembangan layanan fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
	n kekayaan intelektual	kekayaan intelektual untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	intelektual di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing		pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi					
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan	Tersedianya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi lintas aktor dalam transformasi ekonomi, sosial, dan	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
	pemangku kepentingan	transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	lingkungan untuk peningkatan daya saing	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan jaringan <i>shared facility</i> dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
3	Kemitraan Riset dan Inovasi					

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Tersedianya kemitraan antar kelembagaan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Penguatan kemitraan berbasis <i>pentahelix</i> dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, dan pemerataan serta interkonektivitas wilayah	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2.18.03	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
			Penguatan kemitraan berbasis <i>pentahelix</i> dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
B	Peningkatan difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Pengembangan platform digital sebagai kanal berbagi pengetahuan, produk inovatif, dan peluang kemitraan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b> <b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
		peningkatan daya saing	sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
C	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Meningkatnya praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk	Penyelenggaraan pameran riset, temu inovator, dan promosi teknologi dan produk inovatif dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
				5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan UKM
			Pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan dalam	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
		peningkatan daya saing	rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan kelompok rentan, dan pemerataan serta interkoneksi wilayah	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				2.17.08	Program pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pendampingan hasil riset hingga tahap penerapan dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
4	Budaya Riset dan Inovasi					
A	Promosi dan kampanye inovasi	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan mata ajar riset dasar dan inovasi berbasis kekhasan daerah dalam muatan lokal kurikulum pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk memperkenalkan sedari dini permasalahan serta potensi khas daerah dan menumbuhkan kepedulian dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
			sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing			
			Penyelenggaraan kegiatan festival dan lomba inovasi dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan UKM
B	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan	Pemberian penghargaan dalam bentuk hibah dan insentif bagi pelaku riset dan inovasi yang berkontribusi dalam melakukan transformasi ekonomi,	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
		untuk peningkatan daya saing	sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
C	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersedianya pengembangan perusahaan pemula berbasis riset untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pengembangan jejaring <i>startup community</i> dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
D	Inventarisasi,	Tersedianya inventarisasi	Pengembangan bank pengetahuan yang	2.16.03	Program pengelolaan	Dinas Komunikas Informatika

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
	pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	mengarsipkan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat lokal dengan menghubungkannya dengan riset dan inovasi modern untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing		aplikasi informatika	Statistik dan Persandian
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
5	Keterpaduan Riset dan Inovasi					
A	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di	Tersedianya prakarsa pengembangan riset dan	Pengembangan agenda riset dan inovasi berdasarkan peta kebutuhan riset untuk	5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
	daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	inovasi di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	mempercepat pengentasan permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan wilayah, dan isu lingkungan			
B	Penyelenggara-an pengembangan klaster inovasi	Terselenggaranya pengembangan klaster inovasi untuk	Pengembangan klaster inovasi di wilayah potensial yang menghubungkan berbagai unsur	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
	berbasis produk unggulan	mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	<i>pentahelix</i> dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
C	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tersesuaianny a kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung transformasi	Penguatan dan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah dalam pengentasan permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
		ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	pembangunan wilayah, dan isu lingkungan	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
			Pengembangan sistem pelaporan terpadu lintas tingkat pemerintahan dalam pengentasan permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan wilayah, dan isu lingkungan	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
6	Penyelarasan dengan Perkembangan Global					
A	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi perkembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya kepedulian isu internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	Pemetaan kebutuhan riset yang disesuaikan dengan isu dan standar global seperti SDGs dan Paris Agreement untuk mempercepat pengentasan permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan wilayah, dan isu lingkungan	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda
B	Penguatan kerjasama	Terselenggaranya kerjasama	Penguatan kemitraan dengan lembaga	2.07.03	Program pelatihan kerja dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
1	internasiona	internasional untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing	internasional seperti UNDP, UNESCO, ILO, lembaga riset, lembaga donor, serta perguruan tinggi mancanegara untuk mempercepat pengentasan permasalahan utama daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan wilayah, dan isu lingkungan		produktivitas tenaga kerja	Dinas Koperasi dan UKM
				2.17.07	Program pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyelenggaraan <i>study exchange</i> dan pemagangan internasional bagi dosen, peneliti, dan	5.07.02	Program pelayanan penghubung	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata
				5.05.03	Program riset dan inovasi daerah	Bappeda

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran	Program Indikatif	Rencana Aksi Implementatif		PIC / perangkat daerah
				Kode SIPD	Nama Program / Kegiatan	
<b>Tema Prioritas:</b>						
<b>Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Provinsi Banten</b>						
			mahasiswa potensial yang menaruh perhatian terhadap transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan daya saing			

## BAB 8

### PENUTUP

Penyusunan RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah yang berdaya saing. Dokumen ini disusun sebagai panduan kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2024–2029. Melalui RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030, riset dan inovasi diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berbasis pengetahuan (*knowledge-based development*), yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 menegaskan bahwa riset dan inovasi memiliki peran fundamental dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan, serta mengembangkan produk-produk unggulan daerah. Dokumen ini memuat arah, sasaran, strategi, serta peta jalan riset dan inovasi yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, BRIN, perguruan tinggi, pelaku industri, hingga masyarakat sipil. Sinergi lintas aktor ini menjadi kunci dalam memperkuat kolaborasi antara penyedia pengetahuan dan pengguna inovasi agar hasil riset dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan implementasi RIPJPID Provinsi Banten Tahun 2025–2030 sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program riset dan inovasi yang telah diprioritaskan. Pemerintah daerah perlu memastikan integrasi hasil riset dalam setiap siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Di sisi lain, lembaga penelitian dan perguruan tinggi didorong untuk memperkuat kapasitas riset yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan responsif terhadap isu-isu strategis, seperti ketimpangan wilayah, pengangguran, perubahan iklim, dan transformasi digital. Dunia usaha dan masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung kegiatan inovasi daerah melalui kemitraan publik-swasta, komersialisasi hasil riset, serta partisipasi dalam kegiatan riset terapan yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional dan acuan strategis dalam penguatan sistem riset dan inovasi daerah Provinsi Banten

hingga tahun 2030. Pelaksanaan peta jalan ini harus dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang konsisten sesuai dengan ketentuan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Provinsi Banten diharapkan mampu mewujudkan transformasi menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Komitmen kolektif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan Banten yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global.

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002